Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

59530

LAPORAN PERKEMBANGAN STRATEGI KEMITRAAN NEGARA UNTUK REPUBLIK INDONESIA
PERIODE FISKAL 2009-2012

Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif
untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

THE WORLD BANK | BANK DUNIA

IFC
International
Finance
Corporation
World Bank Group

Laporan Perkembangan Strategi Kemitraan Negara No. 44845-IND
terakhir dibahas oleh Dewan/ the Board pada tanggal 11 September, 2008

PERSAMAAN MATA UANG
Unit mata uang: Rupiah (Rp) per 19 Januari, 2011
US$1 = Rp. 9,044

Tahun Fiskal
1 Januari hingga 31 Desember

WORLD BANK

Wakil Presiden	James W. Adams
Kepala Perwakilan	Stefan G. Koeberle
Task Team Leader	Mark V. Hagerstorm

IFC

Wakil Presiden	Rashad Kaldany
Kepala Perwakilan	Adam Sack
Task Team Leader	Farida Lasida Adji

LAPORAN PERKEMBANGAN STRATEGI KEMITRAAN NEGARA UNTUK REPUBLIK INDONESIA
PERIODE FISKAL 2009-2012

Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif
untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

8 Februari 2011

Indonesia Country Management Unit, World Bank
East Asia and Pacific Region

The International Finance Corporation
East Asia and Pacific Department

Distribusi dan penggunaan dokumen ini terbatas, hanya diperkenankan bagi penerima dokumen dalam melakukan tugas resmi saja. Selain itu isi dokumen tidak boleh diperlihatkan tanpa persetujuan dari Bank Dunia.

Singkatan dan Akronim

ACAP	Anti Corruption Action Plan
ADB	Asian Development Bank
AGO	Attorney General's Office
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
AUSAID	Australian Aid Agency
Bappenas	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BEC	Basic Education Capacity Program
BERMUTU	Better Education through Reformed Management and Universal Teacher
BETF	Bank Executed Trust Fund
BI	Bank Indonesia
BKN	Badan Kepegawaian Nasional
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
CCT	Conditional Cash Transfer
CDD	Community Driven Development
CIDA	Canadian International Development Agency
COREMAP	Coral Reef Rehabilitation and Management Project
CPAR	Country Procurement Assessment Report
CPS	Country Partnership Strategy
CSO	Civil Society Organization
CY	Calendar Year
DAK	Dana Alokasi Khusus
DANIDA	Danish Aid Agency
DDO	Deferred Drawdown Option
DFID	United Kingdom Department for International Development
DGT	Director General Taxes
DPL	Development Policy Loan
DRR	Disaster Risk Reduction
DSF	Decentralization Support Facility
EC	European Commission
ECED	Early Childhood Education and Development
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative
EFO	Externally Financial Output
EU	European Union
FDI	Foreign Direct Investment
FEATI	Farmer Empowerment Through Agriculture Technology Project
GDP	Gross Domestic Product
GFMRAP	Government Financial Management and Revenue Administration Project
GoI	Government of Indonesia
GPOBA	Global Partnership on Output-Based Aid
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
ICT	Information and Communication Technology

IDA	International Development Association
IDB	Islamic Development Bank
IDPL	Infrastructure Development Policy Loan
IEPA	Investment and Export Promotion Agency
IFC	International Finance Corporation
IFF	Infrastructure Financing Facility
ILGR	Initiatives for Local Government Reform
INSW	Indonesia National Single Window
IT	Information Technology
JICA	Japanese International Cooperation Agency
JRF	Java Reconstruction Fund
JUFMP	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project
KKPPI	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LDR	Loan to Deposit Ratio
LG	Local Government
MDF	Multi-Donor (Trust) Fund
MDGs	Millennium Development Goals
MIC	Middle Income Country
MIGA	Multilateral Investment Guarantee Agency
MIS	Management Information System
MRA	Mandatory Retirement Age
MoF	Ministry of Finance
MoHA	Ministry of Home Affairs
MoNE	Ministry of National Education
MoT	Ministry of Trade
NBFI	Non-Bank Financial Institution
NGO	Non-Government Organization
NRW	Non-Revenue Water
PAMSIMAS	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PDAMs	Perusahaan Daerah Air Minum
PEACH	Public Expenditure and Capacity Harmonization
PEFA	Public Expenditure and Financial Accountability
PEKKA	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
PEPI	Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
PER	Public Expenditure Review
PERDA	Peraturan Daerah
PETS	Public Expenditure Tracking Survey
PFM	Public Financial Management
PI	Performance Indicator (PEFA)
PINTAR	Project for Indonesian Tax Administration Reform
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
POPS	Persistent Organic Pollutant

PP	Peraturan Pemerintah
PPP	Public-Private Partnership
PSF	PNPM Support Facility
R&D	Research and Development
REDD	Reduce Emissions from Deforestation and Degradation
ROSC	Report on the Observance of Standards and Codes
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SEETF	South-South Experience Exchange Trust Fund
SMART-D	Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination Project
SMEs	Small and Medium Enterprises
SNA	Systems of National Accounts
SPADA	Support for Poor and Disadvantaged Areas
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
STATCAP	Statistical Capacity Building Project
TA	Technical Assistance
TF	Trust Fund
TSA	Treasury Single Account
TT-SSCF	Task Team for South-South Cooperation
TIMMS	Trends in International Mathematics and Science Study
USAID	United States Agency for International Development
USDRP	Urban Sector Development and Reform Project
VAT	Value Added Tax
WBG	World Bank Group
WSS	Water Supply and Sanitation
WASAP	Water Supply and Sanitation Financing Initiative

Daftar Isi

Singkatan dan Akronim iv
Ringkasan Eksekutif viii
Pengantar 1
Strategi Kemitraan Negara 3
Perkembangan Ekonomi Terkini 5
Penilaian Implementasi 7
- Bidang-bidang Keterlibatan Kerja Sama 7
- Lembaga dan Sistem Pemerintah Pusat 7
- Lembaga dan Sistem Pemerintah Daerah 8
- Pengembangan Sektor Swasta 11
- Infrastruktur 12
- Pengembangan Masyarakat dan Perlindungan Sosial 15
- Pendidikan 18
- Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 19
- Portofolio Kinerja 21

Langkah ke Depan 23
- Prospek dan Perkiraan Makroekonomi 23
- Mempertahankan Kerjasama 23
- Kolaborasi Donor 25
- Keadilan Gender 25
- Pengelolaan Resiko 25

Apendiks dan Lampiran 29
- Lampiran 1: Laporan Kemajuan Strategi Kemitraan Negara: Matriks Hasil 30
- Lampiran 2: Kemajuan ke arah Tujuan Pembangunan Millenium 47
- Lampiran 3: Kemitraan di Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Anti Korupsi 48
- Lampiran 4: Mengarusutamkan Keterlibatan dalam Kesetaraan Gender 52
- Lampiran 5: Kinerja Portfolio 55
- Lampiran 6: Pengelolaan Operasi Trust Fund 57
- Lampiran 7: Pengelolaan Operasi Trust Fund (Lampiran A) 59
- Lampiran 8: Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias 60
- Lampiran 9: Perkembangan-perkembangan Ekonomi Makro Saat Ini 63
- Lampiran 10: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 69
- Lampiran 11: Indonesia - Pengembangan Peranan dalam Pertukaran Antar Negara Berkembang 70

Ringkasan Eksekutif

Indonesia telah mencapai kemajuan pesat sejak krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998. Indonesia adalah perkonomian terbesar di Asia Tenggara dengan demokrasi yang hidup dan pluralis dan telah mencapai keberhasilan yang penting dalam mengentaskan kemiskinan. Indonesia telah melampaui krisis ekonomi baru-baru ini dengan relatif tanpa gangguan dan tengah menikmati peningkatan kepercayaan investor dan manfaat dari pergerakan harga komoditas baru-baru ini. Sebagai anggota G-20 dan ketua ASEAN pada 2011, Indonesia mengemban peran regional dan global yang semakin penting. Namun tetap terdapat tantangan besar dalam mempertahankan pertumbuhan, menguatkan pengentasan kemiskinan dan menangani keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk mencapai potensinya, Indonesia perlu melanjutkan upaya reformasi dalam rangka membangun kapasitas lembaganya dengan cepat untuk menciptakan peluang-peluang lapangan kerja dan mengembangkan keterampilan, meningkatkan pelayanan dan infrastruktur publik dan mengurangi dampak-dampak akibat korupsi.

Indonesia mengakui adanya tantangan yang masih berlangsung melalui fase kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-25) dengan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2010- 14. Kelompok Bank Dunia (*The World Bank Group* - WBG) mendukung Rencana ini melalui the Strategi Kemitraan dengan Negara (*Country Partnership Strategy*/CPS) Tahun Fiskal FY09-12 dengan suatu pendekatan selektif terfokus pada bidang yang dapat memanfaatkan nilai tambah untuk mendukung reformasi lembaga. Bidang utama meliputi pengembangan sektor swasta, infrastruktur, pengembangan masyarakat dan perlindungan sosial, pendidikan dan keberlanjutan lingkungan hidup dan mitigasi bencana serta keterlibatan lintas sektoral pada tingkat nasional dan daerah yang berpusat pada dukungan bagi instansi dan sistem pemerintahan, selaras dengan kebutuhan keseluruhan Indonesia dan tujuan CPS dalam meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas.

Bidang-bidang keterlibatan Bank Dunia ini tetap sesuai untuk tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Indonesia. Krisis keuangan global telah menambah desakan untuk melakukan pengembangan kapasitas dalam manajemen krisis, menguatkan sektor keuangan dan memperluas jaringan pengaman sosial. Adanya desentralisasi yang sangat cepat dan urbanisasi terus mendorong pemerintah daerah dan kota-kota yang sangat tidak siap untuk terpaksa memainkan peran yang penting dalam masa depan Indonesia. Indonesia merupakan kontributor dan dalam waktu yang bersamaan sangat terpapar oleh perubahan iklim yang kini semakin mendapat perhatian. Meskipun sebagian besar anak-anak kini dapat mengakses pendidikan, mutunya masih tertinggal dari negara pesaing dan langkanya lulusan tingkat tinggi memperlemah tingkat ketrampilan tenaga kerja. Tingkat kematian ibu yang sangat tinggi dan gizi buruk anak bertolak-belakang dengan tingkat pendapatan Indonesia. Infrastruktur yang tertinggal mengancam akan melemahkan keberlanjutan pertumbuhan dan tingkat kenyamanan hidup (*livability*) di perkotaan dan penanganannya membutuhkan investasi oleh sektor publik maupun swasta.

Kuatnya permintaan atas pendanaan dan pengetahuan dari Indonesia mempertegas komitmen Pemerintah dan menjadikan CPS tetap relevan. WBG memberikan tanggapan dengan bermitra dengan komunitas donor yang besar dan dermawan. Implementasi CPS masih tetap sesuai dengan jalur yang diinginkan. Dana tak terduga (*contingency funding*) disediakan selama krisis keuangan global. Pinjaman yang berorientasi kebijakan pembangunan (*development policy lending*) juga telah mendukung pembaharuan dalam manajemen sektor publik, infrastruktur dan perubahan iklim. Proyek-proyek inovatif yang berbasis hasil dalam pengembangan masyarakat, pendidikan dan desentralisasi diselaraskan dengan program Pemerintah sendiri dan mendukung transformasi sistem. Hasil dari keterlibatan Bank Dunia dalam membangun kemampuan penanganan bencana dapat terlihat saat tsunami dan letusan

gunung berapi baru-baru ini dan melalui tindakan tanggap dan cepat dalam rekonstruksi Aceh yang akan segera rampung. Layanan pengetahuan yang programatis dan didorong oleh permintaan menentukan relevansi, kesinambungan kedekatan yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi kelembagaan.

Untuk kedepannya, keterlibatan WBG selanjutnya adalah tetap berada pada parameter CPS dan yang sejalan dengan Arahan Pasca Krisis (*Post-Crisis Directions*) WBG. Diharapkan bahwa keterlibatan ini akan terbantu oleh stabilitas ekonomi dan politik, serangkaian prioritas nasional yang telah ditetapkan dan peningkatan kinerja portfolio. Namun demikian, mencapai perubahan transformasional dan mempertahankan perubahan tersebut dengan lembaga yang kokoh masih merupakan suatu tantangan yang membutuhkan kemauan dan kemampuan Indonesia untuk melaksanakan tujuan pembangunannya dan menghindari rasa puas diri.

Warga bergotong royong dalam kegiatan yang didanai oleh PNPM

Meskipun angka kemiskinan telah turun jauh dari titik puncak masa krisis, namun upaya mempertahankan pertumbuhan, menguatkan pengentasan kemiskinan dan menangani keberlanjutan lingkungan hidup tetap menjadi tantangan besar.

PENGANTAR

Sepuluh tahun yang lalu, Indonesia berada dalam krisis ekonomi yang berat dan transisi politik yang sulit setelah berakhirnya rezim otoriter. Kini, Indonesia telah menjadi salah satu negara demokrasi yang paling cemerlang dengan mempertahankan stabilitas politik dan muncul sebagai negara berpendapatan menengah yang percaya diri sekaligus sebagai anggota G-20. Pertumbuhan ekonomi telah meningkat sejak krisis tahun 1998 terutama dalam lima tahun terakhir dan bahkan melalui resesi ekonomi global baru-baru ini. Pembangunan Indonesia telah mengalami kemajuan pesat yang menakjubkan dengan membebaskan jutaan orang dari kemiskinan dan meningkatkan indikator sosial. Selain itu, pengelolaan makroekonomi yang cermat telah menghasilkan defisit anggaran yang lebih rendah, rasio hutang denganProduk Domestik Bruto(PDB) yang lebih rendah dan pengelolaan inflasi Sebagai salah satu ekonomi yang terbesar di Asia, Indonesia telah mampu memanfaatkan lonjakan komoditas ekspor, peningkatan keyakinan investor dan arus masuk modal yang cukup besar.

Pada saat bersamaan, Indonesia perlu mengatasi tantangan pembangunan yang signifikan agar dapat mencapai potensi penuh. Membangun kapasitas lembaga-lembaga Indonesia agar mampu dengan efektif merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program publik tetap merupakan tugas signifikan. Meskipun tingkat kemiskinan menurun dengan cepat dari puncaknya pada masa krisis, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan gender harus terus dilanjutkan di seluruh Nusantara. Kinerja Indonesia dari segi kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals* - MDGs) belum merata karena kesehatan dan nutrisi ibu tidak mencapai tingkatan sesuai harapan untuk negara berpendapatan menengah, kendati perkembangan kelas menengah telah muncul. Penciptaan pekerjaan dengan nilai tambah yang tinggi masih belum cukup bagi para pendatang baru dan mereka yang mencari peluang kerja yang lebih baik. Penyelenggaraan pelayanan masih terus lemah meskipun pembelanjaan publik telah meningkat dan terdapat perbedaan yang menonjol antar daerah. Investasi tetap rendah dibandingkan standar historis dan kurangnya infrastruktur merupakan ancaman bagi kelanjutan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Mutu lingkungan hidup terus memburuk dan pengelolaan sumber daya alam perlu dengan cara yang berkelanjutan. Terakhir, warisan korupsi masih bertahan dan melemahkan efektivitas pembangunan.

Indonesia telah mengakui tantangan ini dengan memulai fase kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (*National Long-Term Development Plan* 2005-25) dengan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMN) untuk periode 2010-14.[1] Kesebelas prioritas pembangunan meliputi: reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal yang berada terdepan, terluar, dan paska konflik dan kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

[1] Lampiran 9 memberikan rincian lebih lanjut tentang Rencana ini dan keselarasan CPS dengannya.

CPS berupaya agar Kelompok Bank Dunia/WBG dapat memberikan tanggapan yang lebih baik dalam membantu Indonesia mengatasi tantangan pembangunan karena Indonesia menuntut dukungan yang handal dan tepat untuk pencapaian prioritas pembangunan dan agenda pengentasan kemiskinan.

STRATEGI KEMITRAAN NEGARA

Strategi Kemitraan Negara (*Country Partnership Strategy* – CPS) untuk Tahun Fiskal (FY) 2009-12[2] menandai awalnya kemunculan kembali Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah yang percaya diri dan telah lulus dari IDA yang tengah menikmati peningkatan keberadaan regional dan global, termasuk keanggotaan dalam G20. CPS berupaya agar Kelompok Bank Dunia/WBG dapat memberikan tanggapan yang lebih baik dalam membantu Indonesia mengatasi tantangan pembangunan karena Indonesia menuntut dukungan yang handal dan tepat untuk pencapaian prioritas pembangunan dan agenda pengentasan kemiskinan.

Kendatipun terdapat pencapaian tersebut, CPS mencatat bahwa tantangan pembangunan dalam fase berikutnya berpotensi untuk menjadi lebih berat lagi bagi Indonesia karena negara ini sedang memasuki masa *reformasi generasi kedua* yang dipusatkan pada transformasi kelembagaan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kegagalan untuk mulai menangani reformasi ini akan beresiko jatuh dalam *jebakan negara berpendapatan menengah* — yaitu terjepit antara inovasi negara berpendapatan tinggi dan biaya tenaga kerja rendah di negara-negara berpendapatan rendah. Potensi konsekuensi dari hal ini mencakup tingkatan kemiskinan yang stagnan, kehabisan sumberdaya alam dan meningkatnya ancaman terhadap keterpaduan sosial.

CPS menjabarkan kemitraan yang berdasarkan pada: dukungan terhadap strategi pembangunan, sasaran kebijakan, dan program-program prioritas pemerintah Indonesia; penguatan dan penggunaan sistem dan prosedur Indonesia; dengan terus memberikan penekanan pada pengawasan fidusia (*fiduciary controls*), akuntabilitas, dan keunggulan teknis; menggunakan kapasitas yang tersedia secara efektif dan melakukan harmonisasi dukungan; serta mendukung upaya-upaya memperkuat konsolidasi dan penyelarasan berbagai sumber daya. WBG berkeinginan menjadi mitra yang berinvestasi pada lembaga-lembaga yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui penguatan *akuntabilitas* dan *kapasitas*. Fokus dalam akuntabilitas terletak pada insentif dan proses untuk mendorong peningkatan efektivitas pemerintah, meliputi: akuntabilitas sosial; transparansi dan akses publik terhadap informasi, termasuk proses pengaduan dari masyarakat; Pemantauan dan Evaluasi (M&E) berbasis hasil; insentif kinerja; dan kontrol fidusia untuk mendorong efektivitas biaya serta mengidentifikasi penyalahgunaan dana. Untuk turut melengkapinya, tujuan peningkatan *kapasitas* kelembagaan difokuskan pada: kerangka hukum dan peraturan; kebijakan, prosedur, dan standar operasional, teknis, dan administrasi; struktur organisasi serta peran dan tanggung jawab; sistem manajemen, informasi, dan evaluasi; kapasitas perencanaan dan penganggaran; kapasitas penelitian dan analisis untuk membantu perumusan kebijakan; serta pengagihan pengetahuan dan informasi, termasuk praktik terbaik skala internasional.

Usulan cara-cara untuk keterlibatan kerja sama ini meliputi: pendanaan bagi program-program pemerintah yang menjadi prioritas serta mendukung investasi sektor swasta; memberikan layanan yang fleksibel dan didasarkan pada kebutuhan, nota kebijakan yang mengandung unsur cepat - tanggap, analisis dan pengetahuan mendalam, serta saran dan bantuan teknis dan terus berupaya mencari peluang untuk bekerja sama dengan mitra-mitra pembangunan lainnya untuk dapat lebih baik lagi menyelaraskan dukungan di bidang kebijakan, analisis, dan keuangan dengan strategi dan prioritas sebagaimana ditetapkan pemerintah Indonesia. Selain itu, terlihat bahwa kemajuan makroekonomi dan kebutuhan pendanaan di Indonesia, bersama

[2] *"Investing in Indonesia's Institutions for Inclusive and Sustainable Development"*, Juli 22, 2008.

dengan upaya reformasi yang berkembang memberikan alasan kuat untuk mengubah pemberian pinjaman dari IBRD yang belakangan ini mengalami penurunan. Diperkirakan IBRD akan menginvestasikan antara $1,5 milyar dan $2,5 milyar per tahun, tergantung pada kinerja makroekonomi, stabilitas keuangan, dan momentum yang terjadi dalam upaya-upaya reformasi utama. Awalnya IFC akan berinvestasi sekitar US$300 juta per tahun untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas, yaitu sektor keuangan, infrastuktur, dan rantai pasokan komoditas, namun besaran investasi ini diharapkan akan tumbuh seiring dengan terjadinya percepatan reformasi yang dijalankan guna memfasilitasi penyediaan infrastruktur dari kalangan swasta. Dukungan dari MIGA juga diperkirakan akan berkembang seiring dengan peningkatan yang terjadi di bidang iklim investasi.

Sekalipun diperkirakan akan terjadi peningkatan dalam pendanaan, CPS mengakui proporsi kontribusi keuangan dari Bank Dunia terhadap pembangunan Indonesia diperkirakan akan terus menurun, dan bahwa kemitraan di bidang pengetahuan akan menjadi semakin penting. WBG akan terus membangun programnya di bidang layanan analitis dan pemberian nasehat, dan menyelaraskan program ini dengan keterlibatan kerja sama utama serta mendukung penguatan lembaga-lembaga dan sistem Indonesia. Dana perwalian (*trust fund*) diperkirakan akan menjadi bagian integral dalam program tersebut, dan akan semakin terjadi penyelarasan melalui kerja sama utama, serta melalui peningkatan harmonisasi dan penyelarasan pendanaan dari mitra-mitra pembangunan di balik program-program utama pemerintah tersebut.

Dana perwalian diperkirakan akan menjadi bagian integral dalam program tersebut, dan akan semakin terjadi penyelarasan melalui kerja sama utama, serta melalui peningkatan harmonisasi dan penyelarasan pendanaan dari mitra-mitra pembangunan di balik program-program utama pemerintah tersebut.

PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI

Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia tidak terlalu terkena dampak penurunan kondisi ekonomi global yang terjadi di tahun 2008-09, dan pola pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menjadi normal kembali pada paruh pertama tahun 2010. Pertumbuhan mengalami pelambatan secara tajam namun tetap positif pada triwulan keempat di tahun 2008, saat krisis global mencapai titik terendah, dan kemudian pulih secara perlahan-lahan di tahun 2009. Ekonomi kemudian tumbuh sebesar 4,5 persen di tahun 2009 secara keseluruhan, dan hingga 5,9 persen di tahun 2010 (data awal). Meskipun berbagai gangguan pasokan pangan kembali mengangkat inflasi ke angka 7 persen pada akhir tahun 2010, krisis tersebut juga dirasa membawa dampak sosial yang terbatas, terlihat dari sedikitnya laporan tentang pemberhentian karyawan, serta terus menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, dan terbantunya kemampuan belanja rumah tangga akibat pelambatan inflasi yang mendekati titik rendah dalam dasawarsa ini.. Setelah melewati krisis, keuangan pemerintah tetap berada dalam kondisi baik, dengan defisit nominal menjadi 1,6 persen PDB di tahun 2009 – masih lebih rendah dari perkiraan sebelumnya - dan 0,6 persen PDB tahun 2010 (berdasarkan angka-angka awal). Jumlah utang publik terus menurun hingga di bawah 30 persen dari PDB di akhir tahun 2009. Lembaga-lembaga pemeringkat internasional telah mengakui ketangguhan perekonomian serta kekuatan manajemen keuangan publik Indonesia, sehingga peringkat utang Indonesia meningkat menjadi hanya sedikit di bawah peringkat investasi.[3]

Selama krisis, kerja sama substansial di bidang pengetahuan serta terus berjalannya rangkaian Pinjaman Kebijakan Pembangunan (DPL) yang mendukung upaya reformasi yang dijalankan oleh kementrian-kementrian utama di bidang perekonomian, Bank Dunia dapat dengan cepat merespon dan memberikan dukungan yang tepat waktu melalui Fasilitas Dukungan Pengeluaran Publik (*Public Expenditure Support Facility DPL-DDO*) sebesar US$2 milyar, untuk mendorong upaya mitigasi sosial, langkah-langkah kebijakan yang memantapkan rasa percaya diri, serta pengaturan keuangan cadangan. Program pendanaan bersama yang dilakukan dengan Australia, Jepang, dan *Asian Development Bank* /Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan jumlah keseluruhan mencapai US$5,5 milyar berupa pendanaan darurat (*contingent financing*) juga mengikutsertakan pembangunan kelembagaan di bidang manajemen krisis dan pemantauan makro, serta membentuk kerangka hukum yang lebih kuat bagi jaring pengaman sistem keuangan.

Indonesia tidak terlalu terkena dampak penurunan kondisi ekonomi global yang terjadi di tahun 2008-09, dan pola pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menjadi normal kembali pada paruh pertama tahun 2010

[3] Lampiran 8 memberikan analisis rinci tentang kondisi dan prospek perekonomian.

Strategi Kemitraan Negara memberi fokus pada lima bidang kerja dimana Bank Dunia dinilai bisa memberi nilai tambah dalam mendukung prioritas pembangunan Indonesia. Kelima bidang tersebut mencakup pengembangan sektor swasta, infrastruktur, pembangunan komunitas dan perlindungan sosial, pendidikan, serta keberlanjutan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

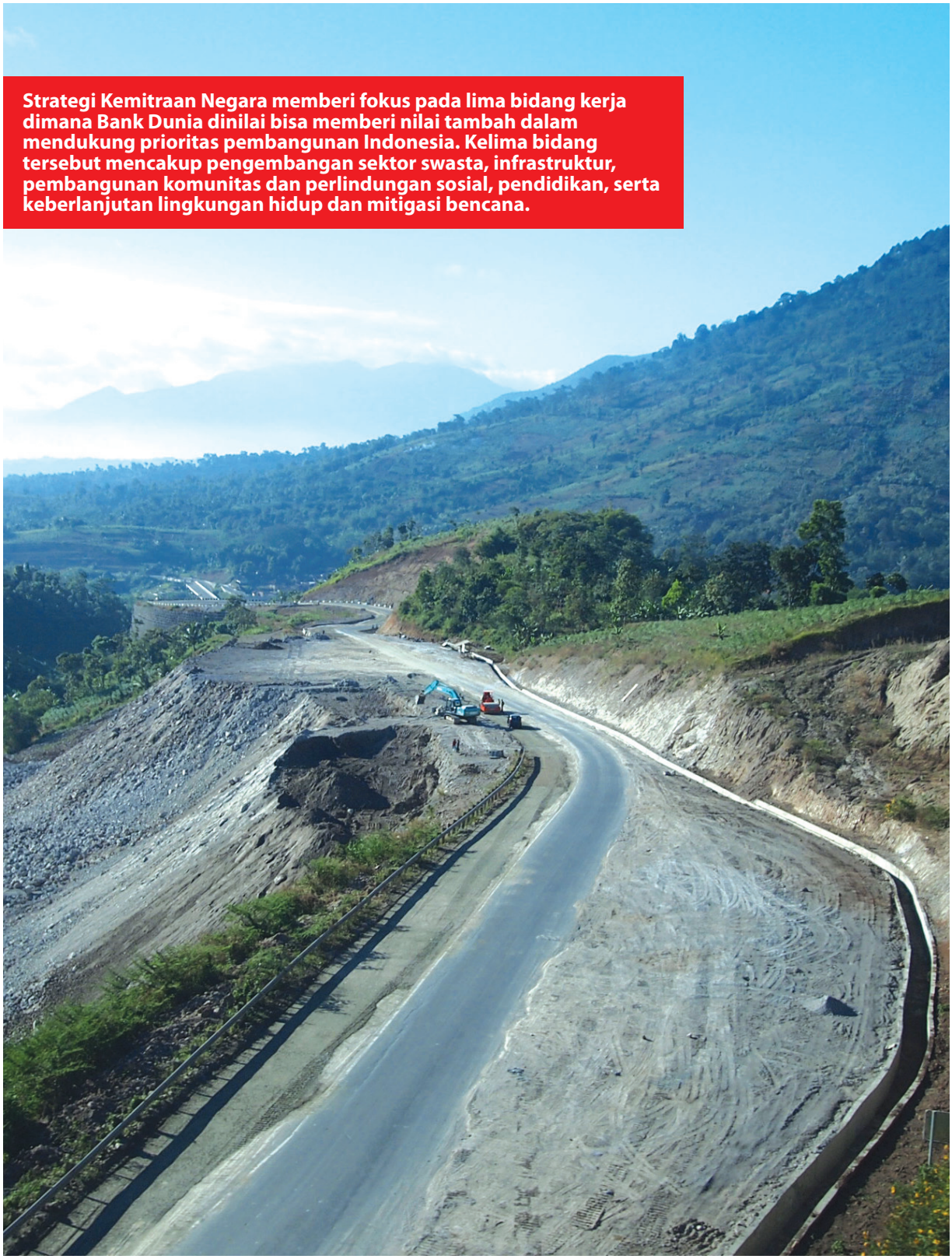

PENILAIAN IMPLEMENTASI

Bidang-bidang Keterlibatan Kerja Sama

CPS mendorong keterlibatan kerja sama di lima bidang inti yang dinilai sesuai bagi Kelompok Bank Dunia (WBG) untuk dapat memberi nilai tambah dalam mendukung prioritas pemerintah Indonesia. Lima bidang tersebut meliputi pengembangan sektor swasta, infrastruktur, pengembangan masyarakat dan perlindungan sosial, pendidikan, serta kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Terdapat beberapa kerja sama lintas bidang-bidang tersebut di tingkat nasional dan tingkat daerah yang memfokuskan pada dukungan bagi sistem dan lembaga pemerintah. Peningkatan tata kelola pemerintahan (*governance*) akan dilakukan melalui kerja sama yang lebih mendalam dengan instansi pemerintah utama di tingkat pusat dan daerah, serta bermitra dengan program-program dan lembaga-lembaga utama Indonesia yang terkait dengan akuntabilitas publik. Dengan menyadari bahwa bidang-bidang keterlibatan kerja sama tersebut memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda yang tercermin dari kedalaman dialog, jenis kegiatan yang didukung, serta variasi spesifikasi hasil yang diharapkan, beberapa bidang yaitu instansi tingkat daerah, infrastruktur, dan lingkungan hidup merupakan bidang yang dinilai baru berkembang sehingga hasil dan kegiatan di bidang-bidang tersebut akan lebih baik ditetapkan selama masa implementasi dan disesuaikan dengan RPJMN.[4] Selain itu, dalam pembahasan CPS oleh Dewan Pengurus (*Executive Board*), terdapat dorongan untuk mulai merumuskan keterlibatan kerja sama yang lebih komprehensif untuk mengarusutamakan keadilan gender ke dalam kegiatan-kegiatan WBG.

Sistem dan Lembaga Pemerintah Pusat

Indonesia berupaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem dan lembaga pemerintah pusat dalam sasaran jangka panjang untuk meningkatkan manajemen keuangan publik dan tata kelola pemerintahan agar dapat meningkatkan prioritas dampak pembangunan dari belanja anggaran.. WBG diharapkan memberi kontribusi pada upaya-upaya yang berorientasi membawa hasil yang lebih besar dengan anggaran yang ada; pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu; peningkatan penyelenggaraan perpajakan melalui peningkatan akurasi pencatatan dan audit terhadap wajib pajak, serta berkurangnya tunggakan pajak; perbaikan ketepatan waktu dan kualitas data statistik utama yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS); dan, peningkatan kapasitas dan penyempurnaan kerangka peraturan pengadaan publik di tingkat nasional dan provinsi, serta kualitas audit dan efektivitas sanksi.

Rangkaian program Pinjaman Kebijakan Pembangunan (*Development Policy Loan - DPL*), yang didukung pendanaan paralel dari Pemerintah Jepang dan ADB serta didasarkan pada suatu program penting di bidang layanan pengetahuan, telah membantu memperkuat dan memperluas komiten serta rasa memiliki terhadap hasil-hasil dalam tonggak-tonggak pencapaian reformasi.[5] Proyek pinjaman lain turut melengkapi dengan memberikan dukungan pelaksanaan teknis dan investasi melalui proyek Manajemen Keuangan Pemerintah dan Administrasi Pendapatan (*Government Financial Management and Revenue Administration Project* - GFMRAP) dan proyek

[4] Rincian tentang hubungan antara prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan perkiraan kontribusi yang akan diberikan terhadap hasil-hasil pembangunan, kemajuan yang dicapai, tonggak-tonggak pembiayaan dan perkiraannya, serta layanan di bidang pengetahuan dapat dilihat pada Appendix 1 dan 9.

[5] Rangkaian DPL juga telah mendukung reformasi di bidang-bidang selain manajemen keuangan dan modernisasi sektor publik, termasuk iklim investasi dan kemiskinan.

Reformasi Penyelenggaraan Perpajakan Indonesia (*Project for Indonesian Tax Administration Reform* - PINTAR). Manajemen Keuangan Publik – Dana Perwalian (*Multidonor Public Financial Management - Multi Donor Trust Funds*) turut menyalurkan sumber daya untuk mendukung berbagai kegiatan penting, dengan membawa-serta mitra-mitra pembangunan yaitu Komisi Eropa, Pemerintah Belanda, dan Pemerintah Swiss, selain Bank Dunia untuk hasil yang terkoordinir.

Hasil-hasil pembangunan yang diharapkan dari kontribusi Bank Dunia tetap berjalan sesuai pada jalurnya, meskipun terdapat beberapa keterlambatan/penundaan. RPJMN memberikan suatu langkah maju dengan menjabarkan hasil-hasil terukur serta indikator sasaran, dan anggaran tahunan tahun kalender (CY) 2011 memiliki kaitan yang semakin erat dengan proses perencanaan; pelaporan keuangan yang lebih andal dan tepat waktu terlihat dari menurunnya jumlah audit yang memperoleh hasil wajar-dengan-pengecualian (*qualified*); peningkatan di bidang penyelenggaraan perpajakan terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar, meskipun cakupan masih tetap amat rendah; dan, dengan dukungan dari Bank Dunia, telah dibentuk suatu lembaga pengadaan berikut peraturan-peraturan baru untuk mendukung proses tersebut.

Sebagai langkah ke depan untuk kerja sama yang berkelanjutan, GFMRAP harus memberikan landasan untuk memperluas penguatan kelembagaan dan reformasi yang terkait dengan tata kelola pemerintahan pada kementerian-kementerian lainnya. Hal ini didukung dengan suatu program substansial di bidang layanan pengetahuan yang sebagian besar didanai melalui trust fund hasil kolaborasi dengan donor-donor lainnya. Program ini mencakup Prakarsa untuk Analisis Belanja Publik (*Initiative for Public Expenditure Analysis* - IPEA), yang berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik serta membangun kapasitas penelitian dan analitis untuk meningkatan perumusan kebijakan dan anggaran, serta Prakarsa untuk Transparansi Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative* - EITI), yang bertujuan meningkatkan transparansi di sektor minyak, gas, dan pertambangan. Selain itu, usulan pemberian pinjaman untuk program Penguatan Sistem Statistik Nasional Indonesia (*Strengthening the National Statistical System of Indonesia* - STATCAP), akan menyediakan pendanaan dan dukungan bagi modernisasi teknologi, pembangunan kapasitas, dan manajemen perubahan.

Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan dan upaya memerangi korupsi masih berjalan lamban. Indonesia telah menunjukkan beberapa peningkatan di beberapa bidang, berdasarkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Sedunia (*World Governance Index*), termasuk aspirasi dan akuntabilitas, stabilitas politik, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, dan supremasi hukum.[6] Pada khususnya, proyek pada sektor peradilan yang merupakan sektor dengan keterlibatan donor-donor lainnya, mengalami ketidakpastian, terutama karena intervensi peradilan yang sewenang-wenang serta korupsi pada umumnya terus merupakan hambatan besar bagi investasi.

Lembaga dan Sistem Pemerintah Daerah

Sebagai area yang baru berkembang sesuai identifikasi dalam CPS, hasil pada perkembangan tengah waktu ini meliputi arti luas peningkatan sistem dan proses untuk perencanaan, alokasi sumber daya dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik, serta peningkatan standar pemberian layanan baik di tingkat kota maupun desa. Saat ini hasil-hasil tersebut telah dipertajam untuk turut mencakup

[6] Appendix 3 memberikan rincian lebih lanjut tentang upaya-upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan anti-korupsi, termasuk diskusi tentang pengamanan bagi operasi-operasi Kelompok Bank Dunia.

penyempurnaan kerangka desentralisasi fiskal dengan insentif atas akuntabilitas serta peningkatan belanja infrastruktur di tingkat daerah.

Sepuluh tahun lalu Indonesia mulai menjalankan reformasi desentralisasi secara menyeluruh. Pemberdayaan yang dilakukan dalam dasawarsa terakhir membuat pemerintah daerah menjadi semakin berperan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Indonesia. Saat ini ada sekitar 500 pemerintah daerah di Indonesia dan mereka mengelola hampir 35 persen belanja publik. Namun demikian, tingkat dan kualitas belanja di tingkat daerah masih menjadi isu, seperti halnya dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab di tingkat kementerian/pemerintah pusat serta struktur insentif dalam sistem transfer fiskal. Pemerintah juga mengidentifikasi kapasitas kelembagaan sebagai faktor yang menghambat pemerintah daerah, dan program untuk mengatasi masalah ini juga telah terbentuk, termasuk berbagai upaya yang didukung oleh donor, namun masalah dengan insentif dan akuntabilitas, sebagaimana telah diidentifikasi dalam CPS, terus menghambat efektivitas. Untuk meningkatkan dampak belanja publik dan meningkatkan pemberian pelayanan, pemerintah Indonesia terus memfokuskan pada upaya memperkuat pemerintah daerah dan lembaga-lembaga di daerah.

WBG pada mulanya memusatkan perhatian pada kerja sama dengan sebagian kecil pemerintah daerah yang berkomitmen mengatasi masalah-masalah akuntabilitas dan kapasitas melalui program Harmonisasi Belanja Publik dan Kapasitas Pemerintah (*Public Expenditure and Capacity Harmonization* - PEACH), suatu keterlibatan melalui mekanisme trust fund yang didukung oleh AusAID dan CIDA guna membangun kapasitas dalam keuangan dan belanja publik. Bank Dunia juga berfokus pada program Proyek Prakarsa Reformasi Tata Kelola Pemerintah Daerah (*Initiative for Local Governance Reform Project* - ILGRP) dan Proyek Reformasi Pengembangan Sektor Perkotaan (*Urban Sector Development Reform Project* - USDRP) yang merupakan program bersama dengan beberapa pemerintah daerah terpilih yang bertujuan meningkatkan manajemen keuangan publik dan pemberian layanan. Program ini juga dilengkapi dengan upaya-upaya IFC untuk membantu meningkatkan iklim investasi daerah. Dukungan bagi agenda desentralisasi lintas sektoral bersama dengan Pemerintah Pusat yang dijadikan kerangka bagi kegiatan ini telah disediakan oleh *Decentralization Support Facility* (DSF), suatu dana perwalian multidonor yang sebagian besar didukung oleh UKAID.

Dalam dua tahun terakhir, keterlibatan ini ini telah memperoleh beberapa kemajuan. PEACH telah meningkatkan cakupan kegiatannya ke bidang-bidang lain, termasuk memasukkan diagnosis pertumbuhan dalam analisis yang dibuat, serta meningkatkan daya manfaat, keberlangsungan, dan keterbukaan program dengan jalan melibatkan universitas di tingkat daerah dan nasional untuk menyusun dan membuat analisis tersebut. Program ini telah meningkatkan kemitraanya dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk dalam bentuk bantuan sistem pemantauan dan pembangunan kapasitas. Sementara itu, ILGRP dan USDRP disusun kembali agar dapat lebih fokus pada tata kelola pemerintahan utama dan reformasi keterbukaan. DSF terus bekerja secara intensif dengan berbagai kementerian di tingkat pusat untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi.

Kemajuan di bidang-bidang lainnya telah dapat melampaui perkiraan yang tercantum dalam CPS. Kemajuan yang paling signifikan ialah dukungan Bank Dunia bagi program pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (*Local Government and Decentralization Project*). Program DAK menggunakan sistem pemerintah untuk mengkaitkan insentif dengan hasil kerja dan dampak. Hal ini diharapkan akan dapat mendukung proses penganggaran yang lebih baik, serta transfer dana yang lebih besar dan fleksibel untuk mengatasi

kekurangan pendanaan di bidang infrastruktur dan pemberian layanan. Selain itu, terdapat kemajuan dalam dukungan bagi mitra-mitra strategis di tingkat daerah, termasuk melalui usulan proyek *Jakarta Urgent Flood Management Project*/Manajemen Banjir di Jakarta yang diharapkan akan dapat memberikan terobosan baru dalam meningkatkan akses daerah terhadap pendanaan untuk tujuan peningkatan kehidupan perkotaan. Pemerintah telah mulai mendesentralisasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), suatu program hibah bagi sekolah melalui dukungan Bank Dunia sebagai peluang jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi belanja dan hasil-hasil di bidang pendidikan. Perkembangan terbaru terjadi dalam program pemerintah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk memberikan landasan kerja dalam mengintegrasikan dan meningkatkan kerangka desentralisasi dengan lebih baik melalui peningkatan akuntabilitas di tingkat daerah dan pengintegrasian dengan inisiatif sektoral.

Terdapat dua bidang yang baru berkembang dan WBG dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang tersebut. Pertama, pemerintah tengah berfokus pada kesenjangan antar daerah dan kebutuhan untuk meningkatkan konektivitas, khususnya dalam mengurangi hambatan transportasi dalam dan antar daerah. Fokus awal diberikan pada kegiatan analitis untuk meningkatkan belanja pemerintah daerah di area-area penting, serta mengatasi tantangan-tantangan kebijakan dan pelaksanaan. Kedua, dalam sepuluh tahun mendatang, seluruh pertumbuhan penduduk di Indonesia nantinya akan terjadi di perkotaan dan sebagian besar orang Indonesia akan tinggal di kota. Suatu pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu perkotaan yang baru berkembang ini akan diberikan melalui studi-studi tentang urbanisasi dan hambatan aglomerasi. Daerah perkotaan juga semakin dihadapkan pada kondisi lingkungan hidup dan perubahan iklim yang sulit dan menantang. Hal-hal tersebut dibahas melalui program Kota Ekonomi dan Ekologi (Eco2) yang Berkelanjutan (*Economic and Ecologically Sustainable (Eco2) Cities Program*) dengan tujuan menjadikan kelangsungan lingkungan hidup sebagai strategi investasi utama. Jakarta khususnya memainkan peran penting sebagai anggota Satuan Tugas Walikota (*Mayors' Task Force*) di bidang pengentasan kemiskinan perkotaan, pemberian pelayanan, dan perubahan iklim.[7]

Ke depannya, keterlibatan Bank Dunia baik yang baru maupun yang tengah berjalan akan diperkuat oleh RPJMN, yang mengakui bahwa desentralisasi memiliki sifat lintas-sektoral. Matriks hasil CPS telah disesuaikan agar dapat memberikan kerangka bagi hasil-hasil pembangunan yang diharapkan dapat memperoleh pengaruh WBG: meningkatnya kerangka desentralisasi fiskal dengan insentif untuk akuntabilitas; dan meningkatnya belanja infrastruktur di tingkat daerah. Guna mendukung hasil-hasil tersebut, WBG berupaya mengajak-serta para pemangku kepentingan dan melakukan dialog untuk menginformasikan tentang desentralisasi melalui berbagai instrumen; meningkatkan dan memperluas DAK; bekerja melalui program BOS-KITA guna memastikan tercapainya keberhasilan desentralisasi serta mempersiapkan manfaat-manfaat di masa mendatang; meningkatkan kapasitas warga setempat untuk turut menilai dan memantau belanja publik melalui PEACH; serta mendukung kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntabilitas keuangan publik dan penyediaan infrastruktur.

[7] Jakarta adalah satu dari empat kota utama, selain Dar es Salaam, Mexico City, dan Sao Paulo.

Pengembangan Sektor Swasta

Pertumbuhan dengan ujung tombak sektor swasta merupakan hal penting bagi daya saing Indonesia di tingkat regional dan global, dan sekaligus penting untuk mengatasi kesenjangan dalam pemberian layanan dan infrastruktur. Sasaran Indonesia untuk jangka yang lebih panjang ialah memperbaiki lingkungan untuk pengembangan sektor swasta agar dapat membantu percepatan pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. WBG berkeinginan mendukung penguatan sektor swasta dan keuangan melalui: kerangka peraturan yang lebih baik; peningkatan iklim investasi; lembaga keuangan yang lebih kokoh; meningkatnya akses pasar; keterhubungan usaha dan kemitraan; meningkatnya kapasitas beberapa pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan usaha; meningkatnya lingkungan peraturan dan koordinasi antar instansi dalam menyusun kebijakan penanaman modal; menguatnya kapasitas kelembagaan di Kementrian Perdagangan untuk menghasilkan kebijakan perdagangan yang lebih efektif; serta meningkatnya akses pasar bagi usaha-usaha di Indonesia dan petani kecil di sektor komoditas dan sektor industri tertentu.

Guna mendukung hasil-hasil pembangunan tersebut, melalui sinergi antara tim IFC dan Bank Dunia, didirikanlah kemitraan dengan lembaga-lembaga utama Indonesia yang membentuk iklim investasi. Melalui proses DPL serta kegiatan pemberian konsultasi dan pemantauan, sekaligus pembangunan kapasitas kelembagaan yang dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah Belanda, Selandia Baru, Swiss, dan Australia, WBG telah secara aktif terlibat dalam kerja sama dalam memberikan dukungan bagi: (i) diluncurkannya Undang-undang Penanaman Modal dan Perekonomian Khusus; (ii) dua paket kebijakan ekonomi utama yang mencakup peraturan dan lembaga penanaman modal, bea-cukai, perpajakan, infrastruktur, keuangan, dan UKM; (iii) dirampingkannya syarat-syarat pendirian usaha baru melalui penyederhanaan prosedur untuk mendirikan perseroan terbatas dan pengurusan izin usaha; (iv) pemberian persetujuan bagi investor asing dalam jangka waktu yang lebih cepat; (v) pengembangan sistem nasional resi gudang, dan; (vi) kapasitas untuk memonitor iklim investasi. Terdapat dukungan tambahan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendukung jalannya kegiatan usaha melalui Program Reformasi Peraturan Pendirian Usaha (*Business Entry Regulatory Reform Program*) yang melengkapi upaya yang dilakukan Fasilitas Multidonor untuk Perdagangan dan Iklim Investasi (*Multi-donor Facility for Trade and Investment Climate*) dari Bank Dunia untuk menyederhanakan peraturan-peraturan kegiatan usaha di tingkat nasional.

Kementerian Perdagangan telah dijadikan sasaran sebagai lembaga yang menjalankan reformasi dengan pembangunan kapasitas untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan perdagangan dan penanaman modal dalam dan luar negeri, menegosiasikan kesepakatan perdagangan, serta mengelola sumber daya manusia dan operasional kementerian. Dengan dukungan dari para donor melalui perwalian hibah, Bank Dunia telah membentuk tim penasihat untuk memberi dukungan langsung di lapangan. Meskipun terdapat hambatan yang signifikan, prakarsa-prakarsa tersebut tampak menjanjikan dalam membantu memperkuat kapasitas dalam memonitor perdagangan dan menyusun kebijakan perdagangan, termasuk Cetak Biru Logistik (*Logistics Blueprint*) dan Rencana Konektivitas (*Connectivity Plan*), serta mengembangkan berbagai opsi untuk memitigasi dampak peningkatan harga pangan.

Dipicu oleh krisis yang terjadi belakangan ini, hasil-hasil pembangunan yang mendukung penguatan sektor keuangan telah mendapat manfaat dari dukungan Bank Dunia Program Penilaian Sektor Keuangan (*Financial Sector Assessment Program*),

termasuk implementasi protokol manajemen krisis dan pembangunan kapasitas. Suatu studi tentang Akses ke Pendanaan (*Access to Finance*) mendukung dikembangkannya layanan keuangan bagi para pekerja migran, yang sebagian besar perempuan, serta memfasilitasi rekening tabungan kecil. Lebih luas lagi, studi ini telah membantu memperluas kesadaran tentang inklusi keuangan di kalangan para pengambil kebijakan senior, yang melahirkan beberapa kegiatan percontohan dan dukungan Indonesia untuk memasukkan hal tersebut ke dalam agenda G20. Kegiatan restrukturisasi dana arisan/pinjaman bergulir, yang kebanyakan digunakan perempuan untuk membiayai usaha mikro, saat ini masih terus berjalan dan mendapat dukungan dari WBG, yang sekaligus turut berkontribusi pada keadilan gender. IFC telah membentuk Aliansi Usaha Global (*the Global Business Alliance*), suatu kelompok bank umum yang berasal baik dari negara berkembang maupun dari negara maju yang menyediakan layanan dan produk yang khusus menyasar usaha-usaha milik perempuan serta diperkirakan akan meluncurkan proyek pertama di bidang layanan pemberian nasihat yang diarahkan secara eksklusif bagi para perempuan pemilik usaha.

Keterlibatan terus berfokus pada penguatan akses terhadap layanan keuangan untuk mendapatkan daya saing yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang inklusif. Melalui operasional WBG, termasuk pinjaman IBRD dan bantuan permodalan IFC, *Indonesia Infrastructure Finance Facility*/Fasilitas Pendanaan Infrastruktur Indonesia (IFF) diharapkan dapat meningkatkan tersedianya pendanaan bagi infrastruktur. IFC saat ini bekerja dengan Bank Indonesia mengelola satu-satunya biro kredit nasional untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan, khususnya terhadap UKM. Suatu studi diagnostik tentang kerangka transaksi yang dilindungi jaminan (*secured transaction*) telah dirampungkan, dan suatu proyek untuk mendorong penggunaan register/daftar agunan benda-bergerak telah dikembangkan bersama Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, melalui kerja sama dengan Badan [Pengawas] Perdagangan Berjangka Komoditi yang berada di bawah Kementerian Perdagangan, IFC membantu penyusunan peraturan, kebijakan, dan prosedur untuk sistem resi gudang yang berlaku nasional. Upaya-upaya yang terus berjalan ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mengembangkan infrastruktur keuangan bagi perekonomian yang amat mengandalkan usaha mikro dan kecil.

Sebagaimana diharapkan, MIGA mulai meningkatkan kegiatannya untuk memberi dukungan bagi Indonesia. Saat ini terdapat dua proyek yang aktif berjalan di Indonesia, dengan jumlah penjaminan keseluruhan mencapai US$257 juta di sektor listrik dan pertambangan. Patut dicatat bahwa operasi Weda Bay Nickel merupakan upaya inovatif untuk melibatkan kegiatan pertambangan di tingkat hulu selama masa eksplorasi agar mereka dapat memberikan manfaat sosial dan menjaga lingkungan hidup dengan lebih baik.

Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur merupakan aspek penting dalam memperkuat daya saing Indonesia. Jika kondisi investasi yang rendah di bidang infrastruktur terus berlanjut, hal ini akan mengancam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Pada saat ini investasi publik di bidang infrastruktur masih berada di bawah tingkat saat sebelum terjadinya krisis (1997) dan potensi sektor swasta masih banyak yang belum tertampung. Alhasil, Indonesia relatif masih belum memberikan pelayanan yang selayaknya bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemacetan merupakan tantangan yang signifikan dan kapasitas sistem tenaga listrik masih belum dapat memenuhi permintaan yang terus tumbuh. Tingkat tarif yang dibebankan menghambat investasi di bidang tenaga listrik dan air. Masalah-masalah operasional dan pembiayaan, serta prosedur pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur masih dirasa rumit dan seringkali dirasa

tidak adil. Tujuan jangka panjang Indonesia ialah meningkatkan efisiensi investasi publik dan swasta di bidang infrastruktur untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperkuat daya saing, dengan fokus di bidang energi, transportasi, air, dan sanitasi. Upaya-upaya di tingkat lokal diberi dukungan agar dapat menghasilkan peningkatan jumlah dan kualitas investasi infrastruktur di tingkat pemerintah nasional dan daerah melalui penyempurnaan kebijakan subsidi, kerangka insentif, serta perencanaan dan penganggaran; dan meningkatnya investasi swasta di bidang infrastruktur dengan dibentuknya kerangka Kemitraan Publik-Swasta (KPS) yang transparan, kredibel, dan memiliki kemantapan fiskal.

Di dalam CPS, infrastruktur diidentifikasikan sebagai area kerja sama yang sangat berkembang. Rangkaian Pinjaman untuk "Kerangka Kebijakan dalam Pembangunan Infrastruktur (IDPL), melalui kolaborasi dengan ADB dan Pemerintah Jepang, telah membantu menyiapkan perpanjangan proyek-proyek infrastruktur lanjutan dengan pembiayaan WBG untuk mendukung reformasi di tingkat sektor.

Jalanan akses di Pulau Simeleu Island, Aceh. MDF telah membantu restorasi jaringan transportasi penting di Aceh dan Nias.

Pada sektor energi, keterlibatan WBG berfokus pada penguatan kapasitas teknis, manajerial, dan operasional. Tujuannya ialah meningkatkan efisiensi untuk mendukung pemberian subsidi listrik yang lebih tepat-sasaran dalam jangka pendek, serta kebijakan penetapan harga yang berkelanjutan dalam jangka menengah, sekaligus meningkatkan kerangka untuk mendorong penanaman modal swasta. Sejalan dengan dukungan kelembagaan, program pendanaan investasi berupaya mengurangi dampak terhadap lingkungan hidup di tingkat lokal dan global, dan berfokus pada energi bersih dan terbarukan seperti misalnya investasi pada tenaga panas bumi, penampung air (*pumped storage*), dan proyek distribusi dan transmisi tenaga listrik, termasuk distribusi gas. Masih terdapat berbagai tantangan yang penting dalam hal cakupan listrik dan efisiensi energi, khususnya di sektor manufaktur Indonesia. WBG telah bekerja sama dalam menyiapkan Program Investasi untuk Indonesia (*Country Investment Program* - CIP) di dalam Dana Teknologi Bersih (*Clean Technology Fund* - CTF,) yang dikelola oleh *Global Environment Fund*/ Dana Lingkungan Global (GEF). IFC mengusulkan penggunaan dana CTF untuk mendukung pendanaan bagi proyek-proyek penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi, serta proyek-proyek energi panas bumi di sektor swasta, sedangkan IBRD berfokus memberikan dukungan pada program nasional percepatan pengembangan tenaga panas bumi. Kerja sama dengan bank-bank umum untuk memperluas pendanaan yang berkelanjutan di bidang energi juga didukung lebih lanjut melalui *Advisory Services* dari IFC.

IDPL memberikan dukungan bagi penyusunan kebijakan harga agar dapat secara signifikan menurunkan subsidi di dalam RPJMN. Undang-undang Kelistrikan yang baru memberikan kerangka bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk dapat bergerak menjadi perusahaan yang lebih efisien dan berbasis-kinerja, mengurangi subsidi dan menyalurkan subsidi secara lebih baik pada kelompok sasaran miskin, serta membuka persaingan bagi

para pemasok energi. Portofolio di sisi investasi mencakup *Java-Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project*/Proyek Restrukturisasi dan Penguatan Sektor Listrik Jawa-Bali, yang membantu PLN meningkatkan efisiensi dan keandalan pasokan, *Domestic Gas Markets Development Project*/Proyek Pengembangan Pasar Gas Dalam Negeri, yang membantu mengembangkan gas alam sebagai alternatif dari batu bara, dan *Power Transmission Development Project*/Proyek Pengembangan Transmisi Tenaga Listrik, untuk meningkatkan dan memperbaiki keandalan jaringan transmisi. Proyek-proyek yang saat ini tengah disiapkan dan diusulkan untuk dibiayai oleh Bank Dunia termasuk proyek PLTA Cisokan Hulu dengan mekanisme pompa air berpenampung (*pumped storage*) dan Investasi Energi Bersih Panas Bumi (*Geothermal Clean Energy Investment*).

Di sektor jalan, WBG terlibat dalam kerja sama untuk memperkuat kerangka kelembagaan di tingkat nasional dan daerah, termasuk sistem pengawasan fidusia, operasional, teknis, dan manajemen untuk membantu berbagai upaya pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan melalui kemitraan dengan ADB, AusAID, dan pemerintah Jepang. Ini merupakan hal penting bagi sektor yang dilanda masalah lemahnya eksekusi, serta berbagai isu pengadaan, korupsi, dan kolusi. Pendanaan saat ini diberikan melalui beberapa operasi dari Bank Dunia yang tengah berjalan (*Second Eastern Indonesia Road Transport Project*/Proyek Transportasi Jalan di Kawasan Timur Indonesia Tahap Dua dan *Strategic Roads Improvement Project*/Proyek Peningkatan Jalan Strategis), dan berbagai persiapan saat ini tengah dilakukan untuk beberapa proyek yang diusulkan pelaksanaannya di kawasan Indonesia bagian Barat dan untuk mendukung dana pemeliharaan jalan. IFC mendukung pendanaan swasta dalam pembangunan jalan tol dengan menawarkan modal jangka panjang dan mengagihkan praktik terbaik, membantu penyusunan dan peluncuran kesepakatan konsesi berstandar internasional, serta mengambil langkah tindak lanjut bagi pendanaan atas beberapa model transaksi.

Di sektor air, dukungan diberikan untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan serta meningkatkan kapasitas teknis, operasional, dan manajemen, termasuk untuk beberapa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta menata ulang irigasi, bendungan, dan waduk untuk diadaptasikan dengan perubahan iklim dan meningkatkan produktivitas. Di bidang sanitasi dan layanan air berbasis masyarakat, proyek PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang didukung oleh Bank Dunia dan AusAid, membangun kapasitas untuk merencanakan pengintegrasian sistem untuk sanitasi terpusat, sanitasi masyarakat, dan sanitasi rumah tangga, serta membantu menyediakan pendanaan jangka panjang bagi pemerintah kotamadya untuk pembangunan infrastruktur. Untuk membantu mengatasi masalah dalam penyaluran air melalui jaringan pipa, proyek *Urban Water Supply and Sanitation Project*/ Penyediaan Air dan Sanitasi Perkotaan memberi bantuan investasi di tiga PDAM. Adanya tunggakan utang pada PDAM menimbulkan hambatan bagi investasi, dan restrukturisasi utang sebagaimana didorong melalui rangkaian IDPL menjadi terobosan yang signifikan bagi sektor ini secara umum. Pemberian hibah yang didasarkan pada keluaran kepada PDAM juga diharapkan mampu memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki aliran pendanaan. Proyek investasi berikutnya untuk meningkatkan sambungan air diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai target MDG.[8]

[8] Kemajuan yang diraih Indonesia dalam pemenuhan MDG diuraikan pada Appendix 2.

Begitu banyak harapan diletakkan pada kemitraan publik-swasta (KPS) untuk dapat membantu pengembangan infrastruktur di Indonesia, akan tetapi kontribusi mereka sejauh ini masih berjalan lambat. Bantuan Bank Dunia melalui IDPL telah menghasilkan peningkatan di kerangka program KPS, termasuk pengembangan lebih lanjut ke tingkat daerah dan BUMN. Namun demikian, program ini mengalami masalah kurangnya koordinasi satu-pintu untuk penyaluran jaminan dari pemerintah, perlunya proyek-proyek yang sudah siap didanai, dan proses pembebasan lahan yang menghambat pengembangan proyek.

Ke depan, tantangan untuk mendukung peningkatan investasi di bidang infrastruktur masih dirasa penting. Kerangka kebijakan yang didukung melalui IDPL diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas investasi publik, baik di tingkat nasional dan daerah, dan satu rangkaian pengembangan yang memfokuskan pada konektivitas dan koridor ekonomi akan berupaya meningkatkan dialog dan koordinasi untuk menghidupkan kembali tingkat investasi secara keseluruhan serta membantu mengurangi kesenjangan antar daerah. IFF diharapkan dapat meningkatkan tersedianya pendanaan jangka panjang, dan KPS selayaknya dapat memperoleh manfaat atas perundang-undangan tentang pembebasan lahan yang lebih ramah-investor, yang diharapkan akan segera disahkan. Selain itu, melalui usulan *Infrastructure Guarantee Fund*/Dana Penjaminan Infrastruktur, dukungan saat ini tengah diberikan untuk terbentuknya suatu lembaga satu-pintu untuk pemberian jaminan Pemerintah, dan Bank Dunia tengah membantu mengidentifikasi dan menyiapkan suatu proyek percontohan.

Pengembangan Masyarakat dan Perlindungan Sosial

Sasaran jangka panjang Indonesia ialah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan keadilan dengan jalan memperbaiki penghidupan dan pemberian layanan, serta mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Prioritas WBG adalah bekerja dengan pemerintah untuk memastikan tercapainya kemajuan yang berkelanjutan dalam upaya mencapai tujuan menanggulangi kemiskinan, serta mencapai keadilan dan turut mengikutsertakan semua daerah. Tujuan-tujuan dalam CPS untuk periode ini termasuk peningkatan kondisi sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintah daerah bagi kelompok miskin di daerah kota dan desa melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih meluas; belanja publik diarahkan agar menjadi lebih pro-masyarakat miskin dengan cara mengalokasikan kembali hasil penghematan subsidi untuk dijadikan intervensi strategis yang terarah tertentu serta untuk pelaksanaan bantuan tunai bersyarat; dan perbaikan dalam pengintegrasian dan pelaksanaan program-program penaggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Kemajuan yang dicapai Indonesia dalam mengurangi kemiskinan didukung oleh diperkenalkannya berbagai program nasional penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2004, jumlah masyarakat miskin menurun dari 16,7 persen menjadi 13,3 persen (2010). Pertumbuhan ekonomi yang terus bertahan turut berkontribusi pada keberhasilan ini dengan terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya belanja publik untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Perluasan program nasional penanggulangan kemiskinan juga berkontribusi dengan pengalihan sumber daya dari pemberian subsidi menjadi program-program penanggulangan kemiskinan yang menyasar rumah tangga miskin dan hampir-miskin.

Bank Dunia, melalui dukungan yang senantiasa diberikan, berkontribusi pada keberhasilan program pembangunan pemerintah berbasis masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan. Inti keterlibatan kerja sama dengan Bank Dunia berbentuk hubungan jangka panjang yang menyediakan layanan pengetahuan dan pendanaan bagi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang

juga merupakan hasil kolaborasi dengan mitra-mitra pembangunan lainnya.[9] Evaluasi-dampak menunjukkan bahwa kelompok yang benar-benar miskin dalam program tersebut menikmati peningkatan yang lebih tinggi secara signifikan dalam hal kesejahteraan rumah tangga, konsumsi per kapita mengalami peningkatan riil sebesar 10 persen, dan mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk keluar dari jerat kemiskinan. Terlebih lagi, angka kematian bayi berkurang hingga separuhnya di area tersebut. Pembangunan infrastruktur secara ekstensif, termasuk pembangunan jalan, jembatan, sistem air dan irigasi, serta toilet umum/sarana MCK menunjukkan adanya penghematan biaya rata-rata sebanyak 20 persen bila pembangunan tersebut dilakukan melalui pendekatan berbasis masyarakat. PNPM juga telah memberikan dukungan bagi keadilan gender melalui berbagai pendekatan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan.[10]

Pembangunan kelembagaan merupakan bagian mendasar dari dukungan Bank Dunia bagi PNPM, dengan beragam kegiatan untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kapasitas di tingkat masyarakat. Akuntabilitas meliputi prosedur yang praktis dan sederhana dalam hal pengawasan, pengungkapan, umpan balik, pengaduan, tindak lanjut, dan penyelesaian masalah di bidang keuangan. Penghargaan di tingkat masyarakat yang didasarkan pada kinerja diberikan mengikuti mekanisme akuntabilitas sosial yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya pemantauan independen melalui /Organisasi Masyarakat Sipil dan media dalam mendorong tuntutan dari masyarakat akar rumput untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Program ini berinvestasi dalam melatih fasilitator/pendamping di tingkat masyarakat, memperkuat ketrampilan mereka dalam melakukan monitoring dan evaluasi, perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan proyek dengan menggunakan metode partisipatif untuk memastikan agar masyarakat memahami dasar-dasar akuntansi, perencanaan, dan manajemen. Program ini juga menggunakan banyak keahlian yang dapat diperoleh di tingkat setempat untuk mendapat masukan dan penilaian teknis agar dapat memperkuat kapasitas masyarakat.

Bank Dunia juga turut mempengaruhi strategi secara keseluruhan dan memperkuat lembaga-lembaga di tingkat pusat dengan terbentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang melakukan kegiatan pengawasan dan koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (berbasis rumah tangga, berbasis masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja), dengan diketuai oleh Wakil Presiden dan dengan beranggotakan para menteri/setingkat kabinet. Bank Dunia berkolaborasi dengan tim tersebut dalam membuat rancangan dan implementasi pendekatan baru dalam mengurangi kemiskinan. Upaya ini termasuk membuat program uji coba pemberian bantuan tunai bersyarat yang menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan oleh perempuan; penyusunan sistem penetapan sasaran nasional yang menggunakan basis data gabungan; mendorong para ahli (*think tank*) untuk merumuskan kebijakan; dan mendukung M&E berbasis-hasil serta peningkatan akuntabilitas.

Melalui RPJMN, pemerintah Indonesia bermaksud mempercepat laju pengurangan kemiskinan dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 8-10 persen di tahun 2014. Ke depannya, Bank Dunia diharapkan dapat melanjutkan kontribusinya pada sisi kebijakan dan kelembagaan dengan

[9] Para donor meliputi ADB, AusAID, CIDA, Danida, DFID, Belanda, EU, IDB, JICA, dan USAID, serta LSM, termasuk PEKKA, Oxfam, dan Bina Swadaya serta para ahli (*think tank*), termasuk Smeru, Akatiga, Asia Foundation, dan Ford Foundation.

[10] Rincian pendekatan ini serta kerja sama anggota Kelompok Bank Dunia lainnya di bidang keadilan gender dapat dilihat di Appendix 4, yang juga menguraikan rencana penyusunan strategi keseluruhan.

keterlibatan kerja sama lebih mendalam dalam bentuk kemitraan untuk pengurangan kemiskinan berbasis pengetahuan. Hal ini mencakup kajian atas program dan peningkatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, pengukuran kemiskinan dan pentargetan, serta pemberdayaan pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan di tingkat daerah untuk memberikan layanan yang berkualitas. Saat ini PNPM telah menjangkau 70.000 kelompok masyarakat yang berada di seluruh Indonesia dan perluasan program ini secara cepat ke tingkat nasional memerlukan konsolidasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan fidusia. Di masa mendatang, program ini dapat memainkan peran penting dengan beberapa inovasi untuk meningkatkan dampak, termasuk pendekatan-pendekatan uji coba untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menghubungkan pemberdayaan masyarakat dengan program-program bantuan sosial yang berbasis keluarga.

Meningkatnya harga pangan memberi pukulan yang lebih berat bagi Indonesia dibandingkan kebanyakan negara sekawasan lainnya. Harga beras di tingkat lokal naik 25 persen tahun ini, lebih besar dari kenaikan harga beras di kebanyakan negara-negara Asia Timur lainnya. Meski program PNPM memungkinkan pemerintah meredam dampak kenaikan harga tersebut di kelompok masyarakat miskin di kota dan desa, untuk jangka menengah dan jangka panjang, meningkatnya produktivitas petani kecil di Indonesia akan menjadi kunci dalam menurunkan volatilitas harga, kemiskinan, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Bank Dunia saat ini memberikan dukungan bagi pemberdayaan petani kecil melalui proyek pemberdayaan petani melalui teknologi pertanian (*Farmer Empowerment Through Agricultural Technology Project* - FEATI) yang masih terus berjalan, dan berencana meningkatkan dukungan bagi penelitian di bidang pertanian dan penyebaran teknologi melalui usulan proyek pengelolaan berkelanjutan bagi penelitian pertanian dan penyebaran teknologi (*Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination Project* - SMART-D)yang akan dipresentasikan pada Dewan Pengurus pada Tahun Fiskal 12 (FY12). Selain itu, Bank Dunia menyediakan dukungan bagi pemerintah melalui dana perwalian *Food Price Crisis Response*/Respon Krisis Harga Pangan yang berupaya memperkuat analisis kebijakan dan pengambilan keputusan seputar isu ketahanan pangan.

Terakhir, sejalan dengan prioritas-prioritas RPJMN untuk meningkatkan perlindungan sosial, suatu program pengetahuan yang ekstensif dengan pendanaan donor dalam sektor kesehatan menandai kelanjutan keterlibatan kerja sama dengan Kelompok Bank Dunia (WBG), yang diidentifikasi bukanlah merupakan bidang inti dalam CPS. Berbagai upaya pada khususnya dilakukan untuk meraih peluang bekerja sama dalam memperkuat efisiensi dan kelangsungan finansial dalam program asuransi kesehatan bagi rakyat miskin yang dijalankan pemerintah, serta meraih peluang-peluang untuk berkontribusi meningkatkan kesehatan ibu dan gizi anak, yang merupakan dua indikator MDG yang memerlukan lebih banyak lagi upaya berkesinambungan dalam pencapaian target.

Anak-anak di Nias berpose setelah aktivitas menanam pohon di sekolah mereka. Pada akhir Juni 2011, sejumlah 117.000 pohon mahogani telah ditanam. Angka ini hampir dua kali lipat angka target

Proyek BOS-KITA mendukung program hibah operasional sekolah di seluruh Indonesia

Pendidikan

Sasaran Indonesia secara jangka panjang ialah meningkatnya akses ke pendidikan dasar untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) dan meningkatkan kualitas pendidikan demi peningkatan daya saing dan inklusivitas. Hasil-hasil pembangunan yang akan didukung oleh Bank Dunia mencakup: peningkatan jumlah guru di pendidikan dasar yang telah memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana disyaratkan; peningkatan efisiensi dan keadilan dalam penggunaan sumber daya untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar; peningkatan program-program pelatihan dan sistem pendidikan tinggi melalui akreditasi kelembagaan; studi pelacakan yang dilakukan secara rutin untuk mengukur efektivitas pelatihan; serta peningkatan informasi dan perencanaan, monitoring dan evaluasi atas dana pendidikan.

Indonesia hampir mencapai tingkat partisipasi universal di sekolah dasar dan sekolah menengah. Terlebih lagi, Indonesia telah bergerak dengan cepat untuk meningkatkan keadilan gender dan diharapkan dapat mencapai sasaran MDG dalam hal menghilangkan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah. Saat ini, hampir setiap anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, turut serta dalam pendidikan dasar, dan sebagian besar siswa yang masuk mulai dari kelas 1 akan tamat kelas 9. Terlepas dari hasil tersebut, pendidikan terus menghadapi tantangan yang signifikan. Indonesia menduduki peringkat 36 dari 48 negara yang mengikuti ujian internasional dari *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) di tahun 2007.[11] Penyebab hal ini dikaitkan dengan beragam isu kompleks termasuk kualitas pengajaran dan sistem penjaminan mutu yang lemah.

Keterlibatan Bank Dunia di bidang pendidikan didasarkan pada kemitraan yang erat dengan Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama, yang bertujuan memberikan dukungan pada transformasi di sektor pendidikan. Kerja sama ini mencakup spektrum pendidikan secara keseluruhan — mulai dari pendidikan dan pengembangan anak usia dini hingga ke pendidikan tinggi serta peningkatan kemampuan guru — melalui layanan pengetahuan, serta kegiatan-kegiatan yang didanai melalui trust fund dan proyek-proyek investasi.

Salah satu bagian penting dalam strategi ini adalah secara langsung membidik sekolah-sekolah. Bank Dunia bersama-sama dengan Pemerintah Belanda dan Komisi Eropa mendanai program pemerintah dengan nama Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang mendukung inisiatif untuk melakukan pengelolaan dana sekolah dengan lebih baik melalui peningkatan informasi, pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, serta prosedur yang lebih ramping. Proyek BOS-KITA (Bantuan Operasional Sekolah - *Knowledge Improvement for Transparency and Accountability*) difokuskan untuk memberdayakan para pengelola sekolah dan masyarakat setempat serta meningkatkan rasa kepemilikan mereka

[11] *Trends in International Mathematics and Science Study*, International Study Center, Boston College.

atas layanan pendidikan melalui praktik-praktik manajemen berbasis sekolah yang mendorong pengambilan keputusan secara bersama-sama terkait penggunaan dana BOS. Sebagai satu fitur utamanya, program ini berkontribusi meningkatkan tata kelola dengan cara meningkatkan kesadaran para orang tua dan masyarakat setempat, serta memperkenalkan berbagai langkah untuk meningkatkan aliran informasi untuk keterbukaan, pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pemantauan. Pendanaan bersama yang diberikan secara paralel dengan AusAID juga memberi dukungan pelatihan bagi tim BOS setempat.

Ke depannya, dalam sektor yang amat terdesentralisasi ini, dengan jangkauan atas sekitar 180.000 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan meliputi 42,5 juta siswa dan 1,8 juta guru, BOS mencerminkan instrumen yang berdaya guna untuk mendukung reformasi dan dapat digunakan sebagai landasan untuk mengatasi kesenjangan antar sekolah dan antar kabupaten dalam hal kinerja dan pendanaan di bidang pendidikan. Di luar pendidikan dasar, berbagai studi yang tengah berjalan tentang pendidikan usia dini, termasuk aspek gizinya, akan digunakan untuk membangun keterhubungan dengan PNPM. Selain itu, dukungan sektoral melalui operasi-operasi yang sedang berlangsung maupun yang tengah diusulkan akan membantu insentif bagi peningkatan kemampuan guru dan memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pelatihan guru baik pemerintah maupun swasta, yang bermaksud memberikan pengaturan yang lebih baik atas pasokan dan penempatan guru untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem yang ada.

Pemerintah memberikan semakin banyak penekanan dalam menghubungkan pendidikan dan pelatihan dengan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia memang perlu semakin meningkatkan pendidikan untuk memperbaiki kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Keterlibatan lebih lanjut dimaksudkan untuk memperluas kemitraan dan berkontribusi pada reformasi di bidang pendidikan tinggi untuk membantu meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.

Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan terkait lingkungan hidup dan bencana alam. Sebagian penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada tanah ulayat, dan sumber-sumber daya pesisir dan lingkungan hidup semakin berkurang. Karena pesatnya laju urbanisasi, sebagian penduduk lainnya menghadapi masalah polusi air dan udara, banjir, kurangnya sanitasi, kemacetan, dan polusi suara. Indonesia rentan menghadapi berbagai risiko, baik yang alami maupun buatan manusia, serta dampak perubahan iklim. Laju deforestasi di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Secara kelembagaan Indonesia masih belum memiliki cukup bekal untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dengan kondisi kewenangan dan tanggung jawab yang terkotak-kotak dan tumpang tindih serta lemahnya mekanisme untuk melakukan upaya terkoordinasi yang diperlukan. Sasaran Indonesia lsecara jangka panjang ialah memperkuat kapasitas untuk beradaptasi pada perubahan iklim dan mengatasi tantangan-tantangan lingkungan hidup, termasuk pengembangan penanggulangan bencana secara terintegrasi.

Bidang ini diidentifikasi di dalam CPS sebagai kerja sama yang sedang berkembang, dan dengan semakin meningkatnya komitmen pemerintah di bidang perubahan iklim memungkinkan WBG secara lebih baik mendefinisikan hasil-hasil pembangunan yang akan dibantu serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini mencakup bantuan untuk membangun mekanisme koordinasi dan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk menanggulangi perubahan iklim, membantu Indonesia dalam

mengakses pendanaan internasional, mendorong penggunaan energi terbarukan dan penanaman hutan di lahan-lahan rusak di daerah terdepan/perbatasan, serta penguatan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.

Keterlibatan dengan WBG telah mengalami percepatan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi secara signifikan dan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin di bidang perubahan iklim di kalangan negara-negara berkembang. Pinjaman Kebijakan Pembangunan dalam Perubahan Iklim (*Climate Change DPL*), dengan pembiayan bersama oleh Perancis dan Jepang, mendorong kelestarian lingkungan hidup dan langkah-langkah untuk mendorong penggunaan sumber daya secara efektif dan transparan. Praktik dan pelajaran terbaik di tingkat global diterapkan dalam mengkaji jalur-jalur alternatif dalam kebijakan dan pembangunan demi "pertumbuhan ramah lingkungan". Dialog kebijakan berupaya mengarusutamakan diskusi tentang perubahan iklim ke dalam berbagai pelaku. Para mitra meliputi kementerian dan instansi yang berurusan dengan isu-isu lintas sektoral di bidang perubahan iklim, dan juga jejaring aktif CSO yang membangun akuntabilitas sosial dan mekanisme partisipasi. IFC memainkan peran sebagai katalis dalam melibatkan sektor swasta melalui kerja sama di bidang mitigasi perubahan iklim dan upaya-upaya adaptasi melalui kegiatan analitis dan pemberian nasihat yang dilakukannya. IFC mengupayakan investasi untuk proyek-proyek tenaga panas bumi dan efisiensi energi, termasuk memobilisasi dukungan finansial bagi proyek-proyek tersebut; membantu meningkatkan hasil-hasil lingkungan hidup dan sosial pada sektor-sektor penting seperti misalnya kelapa sawit; dan mempromosikan praktik-praktik perhutanan lestari agar Indonesia dapat berpartisipasi dalam pasar karbon global.

Untuk mitigasi bencana dan pemulihan, Bank Dunia bekerja sama dengan Bappenas dan pemerintah daerah Aceh, Nias, Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam mendukung tindakan-tindakan untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana alam. Pembangunan kembali Aceh dan Nias terus berlanjut melalui MDF (*Multi Donor Fund*/Dana Multidonor),[12] sedangkan kegiatan serupa juga dilakukan di Yogyakarta dan Jawa Tengah melalui JRF (*Java Reconstruction Fund*/Dana Rekonstruksi Jawa). Saat ini Aceh berada dalam masa transisi dari rekonstruksi pascatsunami ke arah pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan sebagian proses yang penting tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas lokal. Lebih luas lagi, Bank Dunia terlibat dalam kerja sama di bidang pembangunan kelembagaan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bergerak di bidang mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana. Bank Dunia juga mendukung Fasilitas Dana Multidonor untuk Pemulihan dan Rekonstruksi Pascabencana Indonesia (*Indonesian Multi-Donor Fund Facility for Disaster Recovery and Reconstruction*) yang terbentuk guna memprioritaskan tanggap bencana yang membutuhkan penanganan segera dan dalam jangka menengah, serta untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam suatu proses perencanaan berbasis risiko dan meningkatkan kajian kebutuhan dan rekonstruksi pascabencana.

Sebagai langkah ke depan dalam perubahan iklim, keterlibatan kerja sama WBG akan membantu koordinasi dan memfasilitasi kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional tentang Perubahan Iklim. Salah satu contohnya ialah *Indonesia Forest Carbon Alliance*/Aliansi Karbon Hutan Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini berkolaborasi dengan aliansi multidisipliner yang terdiri dari LSM dan organisasi riset — yang didukung oleh mitra-mitra internasional termasuk

[11] Lihat Lampiran 7.

Jumlah proyek yang bermasalah, yang mencapai seperempat dari keseluruhan operasi yang dijalankan, dapat diturunkan hingga kurang dari 10 persen pada Tahun Anggaran (TA) 10-11

WBG— untuk menyusun dan mengujicobakan suatu kerangka dan program REDD (*Reduce Emissions from Deforestation and Degradation*), mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi. WBG juga membantu Indonesia dalam memanfaatkan berbagai dana dan instrumen baru yang tersedia untuk membantu dalam hal barang pemerintahan global (*global public goods*), seperti misalnya dana investasi iklim, *Adaptation Fund*/Dana Adaptasi, serta pasar karbon global. Untuk mitigasi bencana dan pemulihan, sebagai langkah ke depannya, fokus kelembagaan akan terus dilanjutkan bersama dengan penguatan instrumen dan instansi pemerintah, serta penilaian atas opsi-opsi pendanaan.

Portofolio Kinerja

Semakin larasnya kemitraan dengan prioritas dan program pemerintah, serta dengan manajemen yang semakin proaktif dan terkoordinasi, termasuk dalam pengelolaan dana perwalian, telah membawa manfaat bagi portofolio kinerja dan membuat pelaksanaan CPS berjalan sesuai rencana. Jumlah proyek yang bermasalah, yang mencapai seperempat dari keseluruhan operasi yang dijalankan, dapat diturunkan hingga kurang dari 10 persen pada Tahun Anggaran (TA) 10-11, dan saat ini perbandingannya kurang lebih sama dengan kinerja negara-negara berpendapatan menengah-besar lainnya yang juga merupakan peminjam dana IBRD. Penyelarasan yang makin erat antara program dengan prioritas pemerintah dan manajemen portofolio yang proaktif telah dapat memutarbalikkan kondisi efektivitas pembangunan yang dahulu dirasa lemah--45 persen proyek yang dimulai di awal tahun 2000-an dan dirampungkan dalam lima tahun anggaran terakhir dinilai dapat mencapai hasil-hasil sasaran pembangunan.[13]

Performa dana perwalian juga terbantu oleh adanya pendekatan yang lebih terkoordinasi dalam mobilisasi dan pengelolaan dana. Semua dana tersebut kini dipastikan sesuai dengan priortas-prioritas Indonesia dan diintegrasikan dengan perencanaan keuangan dan SDM program secara keseluruhan. Proses kajian kualitas dibuat menyerupai proses yang dijalankan dalam operasi-operasi Bank Dunia. Dana perwalian yang lebih besar terbantu karena dimasukkan dalam manajemen operasional Bank Dunia secara umum, dan kajian terhadap portofolio yang berbasis hasil untuk semua dana perwalian dilakukan secara rutin dengan bekerja sama dengan Bappenas. Pertimbangan khusus diberikan untuk memastikan adanya kontribusi pada keseluruhan sasaran CPS dalam pembangunan kapasitas, dan saat ini dana perwalian yang dilaksanakan oleh penerima dana berjumlah 82 persen portofolio dana perwalian dari segi volume.[14]

[13] Keseluruhan delapan operasi yang kurang memuaskan yang dinilai oleh IEG adalah operasi yang disetujui sebelum tahun 2004. Lampiran 5 memberikan rincian lebih lanjut tentang portofolio kinerja.
[14] Lampiran 6 memberikan rincian tentang trust fund dan pengelolaannya.

Kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami momentum ekonomi yang akan terus terbangun, dengan peningkatan angka pertumbuhan 6,2 persen di tahun 2011

LANGKAH KE DEPAN

Prospek dan Perkiraan Makroekonomi

Kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami momentum ekonomi yang akan terus terbangun, dengan peningkatan angka pertumbuhan 6,2 persen di tahun 2011 dan dengan cakupan pertumbuhan menjadi rata-rata 7 persen hingga pertengahan dasawarsa meskipun kondisi perekonomian global masih belum dapat dipastikan. Angka pertumbuhan ini menunjukkan kemajuan yang terus berjalan di bidang pengentasan kemiskinan, meskipun hal ini dapat melambat atau berbalik arah apabila kenaikan harga pangan di tahun 2010 mengakibatkan laju inflasi kembali seperti pada dasawarsa sebelumnya. Pada periode 2010-14, belanja anggaran diperkirakan meningkat lebih dari 30 persen secara riil dibandingkan dengan periode 2005-2009 (sekitar US$500 milyar untuk kondisi pada tahun 2008), dan hal ini membuka peluang yang signifikan untuk meningkatkan layanan publik. Untuk dapat meraih peluang tersebut, Indonesia akan memerlukan lembaga-lembaga yang lebih efektif dan akuntabel agar dapat menerjemahkan sumber daya-sumber daya yang ada menjadi hasil-hasil pembangunan yang lebih baik. Hal ini pada khususnya dirasa penting saat Indonesia berjuang untuk memberikan kemajuan layanan di bidang infrastruktur, pendidikan yang lebih baik, dan sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan bagi populasi masyarakat yang semakin terurbanisasi dan banyak tuntutan. Akan tetapi proyeksi peningkatan laju pertumbuhan dan peningkatan hasil-hasil sosial ini bergantung pada apakah pemerintah akan memutuskan untuk terus melaju dalam agenda tersebut.

Mempertahankan Kerja Sama

Periode dua tahun pertama CPS telah membantu Indonesia membuka jalan menuju hasil-hasil pembangunan yang penting di beberapa bidang, namun upaya mencapai perubahan transformasional dan mempertahankan perubahan tersebut melalui lembaga-lembaga yang kuat masih menjadi tantangan. Ringkasnya, kajian yang dilakukan menunjukkan adanya kebutuhan akan keterlibatan kerja sama oleh Kelompok Bank Dunia (WBG) untuk terus mendukung agenda reformasi pemerintah melalui kerja sama erat yang amat penting untuk berinvestasi pada lembaga. Sebagai langkah ke depan, dengan stabilitas ekonomi dan politik, rangkaian prioritas yang jelas, dan meningkatnya portofolio kinerja, dasar bagi kemajuan yang terus berjalan dalam pelaksanaan CPS masih tetap baik dan sejalan dengan Arahan Pascakrisis Kelompok Bank Dunia. Kerja sama yang terus dipertahankan ini diharapkan dapat memasukkan berbagai layanan pendanaan dan pengetahuan dari WBG yang terus membantu inovasi dan berfokus pada hasil-hasil pembangunan. Dengan adanya jangkauan global Bank Dunia, keterlibatan kerja sama ini akan memperdalam kerja sama antar negara berkembang dengan membawa pengalaman internasional tentang tantangan-tantangan pembangunan Indonesia di bidang-bidang seperti pengelolaan hutan, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan, dan dalam mengangkat keberhasilan Indonesia, di bidang-bidang seperti pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat, tanggap bencana, dan upaya membangun perdamaian. Demikian pula halnya, WBG akan terus menyediakan dukungan bagi Indonesia dalam perannya yang penting sebagai negara berkembang yang juga menjadi anggota G-20 dan ketua ASEAN.

Untuk bidang-bidang kerja sama secara spesifik, kajian pelaksanaan menggarisbawahi langkah ke depan berdasarkan pengalaman yang didapat sejauh ini. RPJMN dan komitmen pemerintah Indonesia memperkuat bidang-bidang yang telah disepakati akan menjadi prioritas dalam kerja sama serta menyediakan kerangka kerja yang diperbaharui

[15] Lampiran 10 memuat rincian lebih lanjut tentang kegiatan Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan terkini.

untuk mengambil langkah ke depan dalam bidang-bidang yang baru berkembang, seperti misalnya pemerintah daerah, infrastruktur, dan perubahan iklim.

- Reformasi pemerintah pusat. Dengan banyaknya dukungan operasional yang saat ini telah tersedia, percepatan pelaksanaan diperkirakan akan dapat mengejar ketertinggalan yang terjadi dan mendukung langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan keberhasilan awal di kalangan kementerian-kementerian di bidang perekonomian dengan pandangan ke depan untuk melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya untuk memodernisasi dan mereformasi birokrasi mereka.

- Reformasi di tingkat daerah. Kerja sama yang terus berlanjut menjadikan WBG dapat bermitra dalam pengembangan kerangka kelembagaan melalui suatu program layanan pengetahuan yang terus berkembang yang didukung oleh donor-donor lainnya. Pendekatan-pendekatan berbasis kinerja yang inovatif saat ini tengah diujicobakan agar dapat semakin efektif mendukung akuntabilitas dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Kemajuan-kemajuan tambahan lainnya diperkirakan akan tercapai, termasuk keterlibatan dalam kerja sama operasional dengan beberapa kota.

- Pengembangan sektor swasta. Penguatan sektor keuangan saat ini dikombinasikan dengan inklusi finansial. Pendekatan yang inovatif di bidang perbankan dan simpanan tabungan di tingkat masyarakat akan diujicobakan. Perbaikan lebih lanjut di bidang iklim investasi selayaknya memperoleh manfaat dari percepatan di bidang kerja sama lintas sektoral dalam reformasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- Infrastruktur. Melalui dialog yang berkelanjutan, pemberian pinjaman kebijakan dan pendanaan inovatif, serta layanan pengetahuan, telah membantu memulai perubahan dalam kerangka kelembagaan, meningkatkan insentif, dan meningkatkan akses ke pendanaan bagi publik maupun swasta. Investasi WBG di bidang transportasi, air, dan energi diharapkan dapat mengalami percepatan. Kerangka kerja bagi KPS saat ini sebagian besar sudah tersedia, namun dukungan Bank Dunia saat ini tengah diintensifkan untuk dapat mendorong instrumen tersebut.

- Pengembangan masyarakat dan perlindungan sosial. Kerja sama yang berkelanjutan telah membantu menciptakan instrumen yang efektif untuk menjangkau rakyat miskin dengan berbagai infrastruktur dan layanan sosial, sedangkan dorongan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan kerja sama berdasarkan pengetahuan dalam isu kemiskinan, termasuk kesehatan, akan membantu meletakkan dasar bagi upaya pemerintah untuk mempercepat pengurangan kemiskinan.

- Pendidikan. Indonesia, dengan program Bank Dunia yang luas yang memberikan dukungan melalui pendanaan inovatif dalam bentuk program serta layanan pengetahuan, saat ini tengah melakukan intensifikasi upaya-upaya reformasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan bagi angkatan kerja.

- Kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Upaya-upaya pemerintah untuk mendorong agenda perubahan iklim telah meningkatkan permintaan agar WBG memberikan dukungan bagi kerangka kebijakan, koordinasi, dan akses ke pendanaan internasional. Upaya-upaya untuk melembagakan tanggap bencana terus berlanjut dengan cepat, sebagaimana terlihat setelah tsunami yang belum lama melanda Mentawai dan letusan gunung Merapi.

Pendanaan dalam sisa dua tahun ini sebagian besar diperkirakan akan tetap berada dalam parameter awal. Dalam dua tahun pertama pelaksanaan, rata-

rata komitmen tahunan IBRD mencapai $2,5 milyar, sejalan dengan kisaran yang lebih tinggi sebagaimana telah diantisipasi dalam CPS, walau tidak mencakup DDO.[16] Dengan semakin meningkatnya permintaan dalam pemberian pinjaman investasi, khususnya untuk infrastruktur, dalam dua tahun terakhir CPS ini secara keseluruhan akan dapat mendorong pemberian pinjaman secara keseluruhan sebesar US$2,8 milyar per tahun. Pemberian pinjaman yang lebih besar ini masih akan berada dalam parameter risiko IBRD atas eksposur selama sisa jangka waktu CPS.

Kolaborasi Donor

Pendanaan dan layanan pengetahuan saat ini ditingkatkan melalui kerja sama erat dengan komunitas donor yang aktif di Indonesia. Pendanaan bersama untuk pemberian pinjaman investasi dan kebijakan, termasuk partisipasi aktif dalam dialog, dan juga hibah, melibatkan berbagai donor multilateral dan bilateral dan juga LSM. Kolaborasi semacam ini telah membantu Kelompok Bank Dunia (WBG) bermitra dalam kerja sama kelembagaan yang erat di bawah CPS. Sebagian besar DPL merupakan pendanaan bersama, demikian pula halnya beberapa operasi, dan cukup banyak Kerja Sektor Ekonomi (*Economic Sector Work* – ESW) dan Bantuan Teknis (*Technical Assistance* – TA) yang didukung dengan hibah. Sebagai satu komponen penting dalam model usaha, sebagaimana dicatat, pengelolaan dana perwalian telah diperkuat dan semakin banyak berkontribusi pada pencapaian sasaran CPS untuk penguatan kelembagaan dan bukannya sebagai pengganti fungsi-fungsi inti pemerintah atau merintangi pengembangan kapasitas kelembagaan setempat. Terlebih lagi, Bank Dunia tetap berpegang teguh pada Komitmen Jakarta,[17] yang memuat serangkaian prinsip spesifik di Indonesia untuk meningkatkan harmonisasi dan penyelarasan pendanaan dari berbagai mitra pembangunan untuk mendukung program-program yang menjadi prioritas pemerintah yang sejalan dengan Deklarasi Paris tentang koordinasi donor.

Keadilan Gender

Terlepas dari adanya kerangka nasional yang relatif positif tentang keadilan gender, perempuan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan laki-laki dalam beberapa bidang sosial dan ekonomi, termasuk kesehatan, partisipasi tenaga kerja, keterwakilan politik, akses terhadap hukum dan keadilan, serta proses perencanaan pembangunan. WBG telah bekerja secara aktif dengan pemerintah Indonesia dalam program-program yang bertujuan membantu menghilangkan hambatan terhadap keadilan gender sebagaimana tercatat dalam kajian atas bidang kerjasama dan dalam Lampiran 4. Namun demikian, mengarusutamakan isu keadilan gender di seluruh portofolio membutuhkan upaya komprehensif yang lebih besar lagi. Sebagai langkah ke depan, berdasarkan pengalaman tersebut dan untuk dapat meningkatkan efektivitas serta meningkatkan dukungan bagi upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam isu-isu keadilan gender dalam beragam instrumen dan sektor yang lebih luas, WBG telah memulai suatu proses penyusunan Strategi Gender untuk pengarusutamaan keadilan gender, sebagaimana dirinci dalam Lampiran 4, serta memberikan arahan bagi pelaksanaan CPS untuk periode yang masih tersisa dan sesudahnya.

Pengelolaan Risiko

Berbagai risiko yang diidentifikasi dalam CPS meliputi risiko politik, sosio-ekonomi, sentimen anti-utang, pelaksanaan reformasi, dan risiko tata kelola dan korupsi, serta risiko-risiko yang menyangkut kinerja Kelompok Bank Dunia. Risiko-risiko tersebut tetap

[16] Rincian tentang antisipasi pinjaman dan layanan pengetahuan berdasarkan bidang keterlibatan kerja sama dapat dilihat di Annex B3 dan B4.
[17] Komitmen Jakarta, yang ditandatangani pada bulan Januari 2009, pada intinya merupakan komitmen spesifik Indonesia atas Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan yang telah ditandatangani 22 negara dan donor multilateral.

Indonesia telah menetapkan standar kinerja yang tinggi serta memiliki akses terhadap sumberdaya yang semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan bantuan teknis.

berpotensi untuk mengancam efektivitas kegiatan Bank Dunia di Indonesia serta keberlangsungan hasil-hasil pembangunan. Terpilihnya kembali presiden sebelumnya dalam pemilihan presiden telah meningkatkan konsolidasi demokratis, memperkuat stabilitas politik, dan menjaga kelanjutan upaya-upaya reformasi. Pendekatan pemerintah saat ini ialah berupaya mencapai mufakat dalam menanggapi tantangan-tantangan pembangunan utama, namun dengan pendekatan semacam itu, ada kemungkinan terjadinya penundaan dan mungkin kemunduran. Tanpa mengabaikan proses perdamaian yang terus berlanjut di Aceh serta upaya memelihara stabilitas politik di seantero nusantara, ketegangan etnis dan agama dapat muncul kembali ke permukaan, dan kesenjangan antar daerah bisa jadi diikuti konflik setempat. CPS mencatat risiko adanya guncangan eksternal namun kemampuan Indonesia bertahan dari guncangan semacam itu telah meningkat. Untuk krisis yang terjadi baru-baru ini, hasil kajian tersebut dirasa masih berlaku. Akan tetapi, resesi global yang mungkin saja terjadi untuk kedua kalinya serta terjadinya pelambatan pertumbuhan global yang berkepanjangan masih tetap menjadi risiko. Selain itu, meski sudah lebih siap dibanding pada tahun 2004, Indonesia masih tetap rentan terhadap bencana alam dan biaya sosial yang ditimbulkannya. Kekhawatiran akan digunakannya pendanaan asing untuk mendukung anggaran pemerintah masih terus memunculkan tentangan atas pemberian pinjaman asing, khususnya dari kelompok masyarakat sipil. Sentimen anti-utang juga terdapat di kalangan anggota dewan, sehingga mengurangi potensi dukungan yang dapat diberikan bagi anggaran dalam bentuk dukungan operasional. Pada saat yang sama, , pengelolaan utang Indonesia masih tetap dinilai mantap berdasarkan standar internasional. Kapasitas

untuk melaksanakan reformasi kelembagaan yang kompleks dan mengambil keputusan yang melibatkan beberapa departemen pemerintah dan beberapa yurisdiksi tetap menjadi tantangan yang serius, dan hal ini memperkuat dukungan agar fokus CPS diberikan pada pembangunan lembaga untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan bagi reformasi yang dijalankan oleh pemerintah. Risiko-risiko fidusia masih tetap signifikan dan tampaknya akan meningkat dengan adanya keterlibatan kerja sama dengan pemerintah daerah. Investasi pada program-program yang lebih besar yang dipimpin pemerintah meningkatkan risiko Kelompok Bank Dunia dikaitkan dengan program yang mungkin ternodai korupsi. Oleh karenanya, Kelompok Bank Dunia menerapkan pendekatan ini hanya pada bidang-bidang tertentu, yaitu bidang yang memiliki kewenangan dan yang berkomitmen untuk melakukan pengawasan fidusia secara efektif, serta memiliki kredibilitas dan langkah-langkah anti-korupsi. Untuk portofolio Bank Dunia sendiri, suatu kerangka manajemen risiko yang komprehensif untuk tata kelola pemerintahan dan anti-korupsi telah tersedia sejak tahun 2003 dan terus-menerus diperkuat. Fokus utama dari upaya penerapan Tata laksana & Anti-Korupsi (GAC) Bank Dunia yang terus berjalan ialah mengintegrasikan fitur-fitur tata kelola pemerintahan yang efektif ke dalam program-program pemerintah (lihat Annex 3).

Terakhir, sehubungan dengan risiko kinerja Kelompok Bank Dunia, Indonesia menetapkan standar kinerja yang tinggi serta memiliki akses pada sumber daya yang semakin banyak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bantuan teknis dan pendanaan. Krisis internasional yang terjadi belakangan ini menunjukkan kemampuan Bank Dunia dalam memberikan layanannya secara cepat di bidang pengetahuan dan pendanaan darurat, yang telah diterima dengan baik. Indonesia juga berhasil menjalankan uji coba reformasi pemberian pinjaman investasi dari Bank Dunia yang, bersama-sama dengan pendekatan program dalam layanan pengetahuan dan pendanaan, telah meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas. Kolaborasi erat dengan para donor serta pendanaan dalam bentuk hibah yang terus mengalir deras saat ini telah secara signifikan meningkatkan besarnya dan dalamnya keterlibatan kerja sama kami, serta membantu meningkatkan efektivitas bantuan pembangunan secara keseluruhan di Indonesia. Namun fokus untuk mendukung pembangunan kelembagaan merupakan tantangan yang signifikan dan bersifat jangka panjang, karena hal ini melibatkan lebih dari sekedar dukungan teknis, namun juga membutuhkan perubahan perilaku dan budaya organisasi, serta menunjukkan pentingnya kebutuhan untuk melakukan kerja sama yang berkelanjutan dengan Kelompok Bank Dunia.

APENDIX DAN LAMPIRAN

Lampiran 1

Laporan Kemajuan CPS: Matriks Hasil:Kemajuan Terakhir

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
Bidang Keterlibatan Lintas Sektoral 1: Lembaga dan Sistem Pemerintahan Pusat					
Memperkuat lembaga-lembaga dan sistem pemerintah pusat untuk meningkatkan manajemen keuangan publik dan tata kelola untuk meningkatkan dampak pembangunan akan pengeluaran anggaran prioritas dalam menuju Indonesia yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan	Sistem anggaran berbasis input, terlalu rinci dan tidak fleksibel serta semata-mata tahunan, yang menghambat pelaksanaan proyek-proyek multi-tahun	RPJMN yang baru merupakan suatu langkah maju yang penting dengan hasil dan indikator sasaran yang terukur dan anggaran tahunan 2011 lebih kuat untuk proses perencanaan	1. Peningkatan orientasi hasil dalam proses anggaran. *Baseline*: Alokasi anggaran berdasarkan organisasi, jenis pengeluaran, fungsi, program dan kegiatan terinci; dokumen anggaran mencakup proyeksi makroekonomi pengeluaran dan pendapatan agregat, namun proses penyusunan anggaran tetap tahunan secara ketat dan tidak adanya referensi untuk meneruskan perkiraan untuk tahun di luar itu. *Sasaran*: Program-program berorientasi hasil dengan hasil yang terukur menjadi unit utama untuk alokasi anggaran dan kontrol, dengan klasifikasi lain (oleh organisasi dan/atau jenis belanja) yang diterapkan secara selektif pada tingkat agregat.	• Struktur program revisi untuk RPJM 2010-14 menetapkan hasil-hasil dan sasaran yang terukur dan disesuaikan dengan struktur organisasi. **Selesai** • Perintah tetap untuk realokasi anggaran (virement) memungkinkan departemen untuk reaklokasi antara unit-unit pembelanjaan, kegiatan, beberapa kategori ekonomi dan lokasi dalam satu program tanpa persetujuan Depkeu sebelumnya. **Sesuai Rencana** • Kemajuan menuju titik di mana dokumen anggaran menyediakan perkiraan anggaran tahun ini dan estimasi untuk dua tahun ke depan. **Sesuai Rencana**	**Pendanaan:** Dukungan Fasilitas Pengeluaran Publik - DDO DPL; GFMRAP **Pengetahuan**: Reformasi Anggaran di Indonesia; Sedang berlangsung: Meningkatkan Kerangka kerja Antar Pemerintah; Transfer Antar pemerintah; Analisis Pengeluaran Publik untuk Litbang pertanian, DPR Tahun Anggaran 08; PETS HIV / AIDS; Strategi Pembangunan; Belanja untuk Pembangunan; PER Pertanian; PER Perlindungan Sosial; PER Infrastruktur; Diagnostik Pertumbuhan Jawa Timur; Dialog Kebijakan Ekonomi Aceh; Tindak lanjut PEFA; mempromosikan Efektivitas Pembangunan;
	Saldo tunai Pemerintah terfragmentasi dan terbatasnya informasi untuk pengelolaan uang tunai yang efisien; pengoperasian pembendaharaan saat ini dikelola melalui pengumpulan data terfragmentasi dan sistem konsolidasi yang memiliki kapasitas terbatas untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu mengenai pelaksanaan anggaran.	Pelaksanaan bertahap Treasury Single Account (TSA), pembentukan kapasitas prakiraan kas, pengembangan standar akuntansi untuk membentuk sebuah kerangka kerja akuntansi "kas menuju akrual", inventarisasi aset pemerintah berkelanjutan.	2. Pengoperasian TSA yang efektif, bersamaan dengan rencana kas yang diperkuat dan tepat waktu dari kementerian lini. *Baseline*: TSA diperluas ke semua rekening pengeluaran tetapi belum ke sisi pendapatan. Perencanaan kas yang sangat sederhana yang tidak didasarkan pada pengeluaran yang diharapkan. *Sasaran*: Cakupan TSA yang komprehensif dari semua saldo utama kas pemerintah, termasuk sisi penerimaan. Penyimpangan maksimum 10% dalam rencana kuartal kas kementerian lini dibandingkan dengan arus kas yang sebenarnya.	• Memasukkan akun pendapatan utama ke rezim TSA. **Selesai** • Kontrak ditandatangani untuk pengadaan sistem Pembendaharaan dan Anggaran baru. **Sesuai Rencana** • Memasukkan secara progresif sisa saldo kas lembaga pemerintah pusat ke rezim TSA. **Sesuai Rencana** • Depkeu memaksa perencanaan kas triwulan di kementerian lini. **Sesuai Rencana** • Pelaksanaan secara Progresif Sistem Manajemen Keuangan Terpadu di Departemen Keuangan dimulai dengan 5 departemen percontohan. **Terlambat**	**Pendanaan**: GFMRAP **Pengetahuan**: National Single Window (Layanan Satu Atap Nasional)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
	Pengendalian dalam proses pelaksanaan anggaran pada umumnya tidak memadai dan bisa merusak keuntungan yang diperoleh dari perbaikan yang dilakukan di area lainnya dari PKP.	Peningkatan sistem pengendalian internal dan audit internal dan eksternal, dan pelaporan keuangan yang lebih tepat waktu dan dapat diandalkan ini dibuktikan dengan pengurangan penting dalam audit kualifikasi	3. Implementasi yang efektif dan dapat diandalkan dari reformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sebagaimana dibuktikan oleh pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. *Baseline*: indikator PEFA: PI 18 pada efektivitas pengendalian penggajian adalah di D+; PI 20 pada efektivitas pengendalian internal atas pengeluaran non-gaji adalah di D+; PI 25 pada kualitas dan ketepatan waktu laporan keuangan tahunan pada C+. *Sasaran*: indikator PEFA: PI 18 untuk naik ke C, PI 20 untuk naik ke A; dan PI 25 untuk naik ke A.	• Kerangka kerja pengendalian COSO diujicobakan di 3 kementerian terpilih untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas tantangan dari pengendalian internal di kementerian. **Tertunda tapi diharapkan** • Pada pengendaliam penggajian, dibuat desain awal sistem informasi yang menghubungkan BKN dan MDAs. **Tertunda namun diharapkan.**	**Pendanaan:** GFMRAP
	Perbaikan dalam administrasi pajak terhambat oleh pendaftaran yang tidak efisien, pengolahan pengembalian pajak, pengelolaan dokumen, dan keterbatasan dalam infrastruktur dasar TI.		4. Administrasi perpajakan yang lebih efisien melalui: peningkatan jumlah catatan pendaftaran wajib pajak yang akurat dalam database pendaftaran dengan menggunakan data pihak ketiga dan call center; peningkatan jumlah audit komprehensif dan berbasis risiko dari deklarasi wajib pajak; tunggakan pajak dikurangi melalui rekening pembayar pajak dan prosedur pengumpulan yang lebih baik dan lebih akurat. *Baseline*: (i) akurasi 40% (2007; berdasarkan total 11 juta catatan Wajib Pajak); (ii) audit reguler akan dibatasi untuk restitusi PPN, (iii) proses untuk mengumpulkan tunggakan tidak diklasifikasikan ke dalam barang koleksi dan non-koleksi; penegakan pengumpulan tidak efektif. *Sasaran*: (i) akurasi 100%; (ii) DJP melakukan audit komprehensif yang memperluas jumlah restitusi yang terkena program kepatuhan; (iii) prosedur yang efektif dibuat untuk mengumpulkan tunggakan sehingga tunggakan dilaporkan tidak melebihi 5% dari kewajiban pajak yang diumumkan.	• Pembuatan Entri ganda untuk proses pendaftaran. **Selesai** • Pembuatan sistem pendaftaran tersentralisasi. **Selesai** • File Master Pendaftaran dibersihkan dari catatan yang keliru dan duplikasi. **Selesai** • Pengembangan model penilaian risiko wajib pajak. **Selesai** • Penentuan informasi tunggakan yang dapat diandalkan. **Selesai** • Kontrak untuk pengadaan sistem inti administrasi perpajakan ditandatangani. **Sesuai Rencana** • Pengembangan dan implementasi yang Progresif dari sistem inti dministrasi pajak. **Tertunda tapi diharapkan** • Penerapan secara progresif manajemen audit berbasis risiko. **Tertunda tapi diharapkan** • Implementation of systematic collection program. **Tertunda tapi diharapkan**	**Pendanaan**: PINTAR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
	Sistem pengadaan publik masih memiliki kelemahan signifikan dalam hal perbaikan kerangka peraturan dan alat pelaksanaan serta kapasitas praktisi pengadaan; kolusi dan praktek-praktek korupsi dalam proses penawaran masih terjadi, yang menyebabkan kebocoran dan kerugian dalam sistem.	Pembentukan lembaga pengadaan baru; penerbitan dokumen lelang standar nasional.	5. Perbaikan kerangka peraturan; tingkat kapasitas yang lebih tinggi di tingkat nasional dan provinsi, dan pembentukan unit pengadaan profesional di instansi pelaksana; peningkatan kualitas audit pengadaan dan efektivitas sanksi. *Baseline*: (i) Belum adanya Undang-undang pengadaan dan tidak ada set dokumen lelang standar nasional, (ii) tidak ada program pengembangan kapasitas yang jelas dan persentase staf pemerintah yang lulus uji sertifikasi masih di bawah 15% (pertengahan -2008), (iii) sanksi terhadap perusahaan berkolusi relatif terbatas dan tidak berlaku di luar lembaga pelaksana di mana kolusi umum terjadi. *Sasaran*: (i) Undang-undang Pengadaan dan peralatan-peralatan terkait diterbitkan, (ii) dijalankannya program pengembangan kapasitas, (iii) memberikan sanksi jera untuk perusahaan yang berkolusi.	• LKPP memiliki staf penuh dan fungsional. **Selesai** • Revisi Keppres 80/2003 dan penerbitan dokumen standar lelang nasional. **Selesai** • Pengembangan strategi pembangunan kapasitas. **Selesai** • Dukungan untuk penyedia program peningkatan kapasitas di tingkat nasional dan provinsi. **Tertunda tapi diharapkan** • Pengadaan unit didirikan di lembaga pelaksana yang dipilih. **Tertunda tapi diharapkan** • Penguatan fungsi audit pengadaan di IG dan BPKP. **Sesuai Rencana** • Pengadaan peraturan yang berlaku. **Selesai** • Aliran pengadaan profesional didirikan di instansi pelaksana. **Tertunda tapi diharapkan**	**Pengetahuan**: CPAR; Reformasi Pengadaan Publik
	Meningkatnya permintaan atas perbaikan kualitas, ketepatan waktu dan ketersediaan data yang responsif terhambat oleh infrastruktur TIK dan manajemen data yang buruk, dan proses bisnis yang tidak efisien.		6. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu statistik kunci yang diproduksi oleh BPS, misalnya, data akun nasional, data kemiskinan, dll *Baseline*: (i) Inkonsistensi antara statistik BPS dari berbagai sumber yang berbeda, (ii) rendahnya tingkat keterlibatan dan kepercayaan pengguna, dan (iii) data jadwal produksi yang berkepanjangan. *Sasaran*: (i) Akun Nasional berpindah dari Sistem Neraca Nasional (SNA) 1968 ke SNA 1993; perbedaan penurunan antara statistik dari berbagai sumber, (ii) meningkatnya tingkat kepuasan dan kepercayaan pengguna, dan (iii) berkurangnya waktu keterlambatan antara pengumpulan dan penyebaran data.	• Semua petugas statistik kecamatan dilengkapi dengan teknologi GPS. **Tertunda tapi diharapkan.** • 66 kantor kota dihubungkan oleh wide area network (WAN). **Tertunda tapi diharapkan.** • Rekayasa ulang proses bisnis dilakukan atas 5 lini produk. **Tertunda tapi diharapkan.** • Kajian metodologi dilakukan atas 5 lini produk. **Tertunda tapi diharapkan.** • Prototipe gudang data didesain dan dikembangkan. **Tertunda tapi diharapkan.** • Strategi Pelatihan Perusahaan dikembangkan dan diimplementasikan untuk sistem manajemen informasi baru. **Tertunda tapi diharapkan.** • Mekanisme jaminan kualitas ditetapkan dan dilaksanakan. **Tertunda tapi diharapkan.**	**Pendanaan**: STATCAP **Pengetahuan**: Peningkatan Basis Bukti (PERDA); Meningkatnya Kualitas Data Kemiskinan; Dukungan Analisis & Monitoring yang Diperkaya; Dukungan Pembentukan Pemantauan Krisis; Perencanaan & Pengukuran Kinerja; Data untuk Pemantauan;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
Keterlibatan Lintas Sektor Area 2: Institusi dan Sistem Pemerintah Daerah					
Memperkuat lembaga-lembaga pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan tingkat dan dampak pengeluaran publik untuk pelayanan.	Kurangnya koordinasi dan kepemimpinan atas agenda desentralisasi di tingkat pusat; peran yang terbatas dan tidak jelas bagi provinsi. Kerangka desentralisasi fiskal yang tidak memberikan insentif yang tepat untuk peningkatan belanja dengan kualitas yang lebih tinggi. Lemahnya kapasitas pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola aset dan pelayanan. Sebuah kerangka kerja yang tidak memadai dan pendanaan yang tidak mencukupi untuk program infrastruktur skala besar multi-tahun..	Pertemuan reguler antara Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu dengan DSF sebagai platform untuk agenda desentralisasi di tingkat pusat. Perwakilan dari asosiasi PEMDA disertakan. Program untuk mempromosikan isu-isu akuntabilitas dan menyiasati untuk meningkatkan kerangka pendanaan dan fiskal (DAK). Diambilnya keputusan untuk mendesentralisasikan BOS. Program untuk mendukung harmonisasi pengeluaran dan kapasitas daerah (PEACH). Proyek Banjir Jakarta dalam persiapan sebagai preseden untuk pendanaan infrastruktur..	1. Sebuah kerangka desentralisasi fiskal yang lebih baik dengan insentif untuk akuntabilitas. *Baseline*: Kerangka Fiskal mendistorsi insentif, membatasi sumber pendapatan sendiri dan membatasi pendanaan *Sasaran*: upaya terkoordinasi untuk kerangka kerja baru sedang berlangsung; dimulainya pendekatan DAK yang mengikat transfer dengan kinerja; peningkatan kapasitas masyarakat untuk menilai dan memantau (PEACH); desentralisasi BOS. 2. Meningkatnya pengeluaran infrastruktur di *Baseline*: tingkat PEMDA : Terbatasnya akses daerah untuk pendanaan infrastruktur dan proyek-proyek perkotaan, kurangnya fokus pada isu-isu perkotaan *Sasaran*: Pendanaan infrastruktur daerah berlangsung melalui pendekatan luas sektor atau proyek-proyek perkotaan tertentu; belanja modal PEMDA terus meningkat	• Peningkatan keterlibatan dengan instansi pemerintah pusat untuk kerangka desentralisasi fiskal. **Sesuai Rencana** • Tambahan pendanaan, dengan kemungkinan pelaksanaan berbasis kebijakan, berbasis kinerja dan berfokus pada PKP. **Akan dimulai** • Transisi sukses dari program BOS ke PEMDA. **Sesuai Rencana** • PEACH diperluas. **Sesuai Rencana** • JEDI dan DAK II sedang berlangsung, dan operasi tindak lanjut sedang dalam pengembangan. **Sesuai Rencana** • Keterlibatan pada isu-isu perkotaan, termasuk langkah-langkah terhadap dukungan program untuk tier ke-2 urban kota. **Akan dimulai**	**Pendanaan**: DAK I&II; ILGR; USDRP; SPADA; TF: SPADA di Aceh/Nias BOS, dan Perubahan Iklim DPL, Desentralisasi DPL **Pengetahuan**: Studi DSF tentang Reformasi Teritorial; Cadangan dan Surplus Daerah; Pinjaman Daerah, pengembangan pasar modal daerah; Pemerintah Daerah dan Urbanisasi; PER daerah; Analisa Pengeluaran dan Pengembangan Kapasitas Publik; Peningkatan Kapasitas PEACH TA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
Keterlibatan Inti Area 1: Pengembangan Sektor Swasta					
Meningkatkan lingkungan untuk pengembangan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan yang pesat dan pengentasan kemiskinan dan memperkuat daya saing dan keterutsertaan.	Rendahnya intermediasi keuangan; lembaga keuangan non-bank dan pasar modal yang kecil; jenis dan akses terhadap pendanaan terbatas; terbatasnya sumber daya keuangan domestik jangka panjang dan kurangnya keahlian pendanaan infrastruktur lokal.	Stabilitas dan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan telah dipertahankan sejak tahun 2008. Bank dan lembaga keuangan non-bank terus mengembangkan aset mereka, di tengah krisis keuangan global. Sampai bulan Juni 2010, LDR mencapai 75,3% dan BI memperkirakan pertumbuhan kredit tahunan sekitar 200% pada tahun 2010, Pinjaman kepada UKM meningkat sebesar 16,3% pada tahun 2009; Berdasarkan hasil survey rumah tangga nasional, 41% rumah tangga memiliki rekening bank atas nama mereka; Penetrasi LKNB di ekonomi telah meningkat dari 21% dari PDB pada tahun 2008 menjadi 24% pada tahun 2009.	1. Penguatan sektor swasta dan keuangan melalui: kerangka peraturan yang lebih baik; iklim investasi yang lebih baik; penguatan bank dan lembaga keuangan non-bank. *Baseline*: rasio keuangan kunci bank yang sehat; LDR 60%, 35% rumah tangga memiliki akses ke rekening bank; terbatasnya tabungan, investasi dan produk manajemen risiko yang relevan untuk penduduk miskin dan rentan. *Sasaran*: rasio keuangan kunci bank tetap sehat dan LDR mencapai minimal 80%, aktiva LKNB sebagai proporsi pinjaman kepada UKM naik dua kali lipat, minimal 45% rumah tangga memiliki rekening bank, infrastruktur lembaga keuangan mapan dan berfungsi dengan baik. Peningkatan efisiensi dan cakupan biro kredit; peningkatan jumlah kredit terhadap jaminan bergerak yang aman.	• Kredit perbankan secara konsisten meningkat lebih tinggi dari tingkat inflasi tahunan dan LDR mencapai 70% (2008) dan meningkat 5% setiap tahun. **Sesuai Rencana** • Peningkatan yang teratur atas aset reksadana dan jumlah modal yang diperoleh melalui IPO ekuitas dan pasar obligasi. **Sesuai Rencana** • Pengarusutamaan hasil survei tentang akses nasional untuk pendanaan dalam kebijakan pemerintah. **Sesuai Rencana** • Penetrasi dana pensiun dan asuransi yang lebih tinggi. **Sesuai Rencana** • Pengoperasian biro kredit yang lebih efisien dan efektif memfasilitasi akses UKM yang lebih besar atas pendanaan. **Sesuai Rencana** • Registrasi Jaminan berfungsi secara nasional dan daerah untuk memfasilitasi akses akan kredit yang dijamin dengan agunan bergerak. **Sesuai Rencana**	**Pendanaan**: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Tanah **Pengetahuan**: Terselesaikan: Dukungan Kebijakan Sektor Keuangan; sedang berlangsung: Memahami Pasar Tenaga Kerja, Review KUR (Kredit Usaha Rakyat): Program Penjaminan Pemerintah parsial; Meningkatkan akses terhadap Jasa Keuangan di Indonesia; Pemberdayaan Perempuan Buruh Migran; Harmonisasi Anti-Korupsi, Pemberantasan Korupsi; Meningkatkan Permintaan atas Reformasi Hukum; Institut Anti-Korupsi **IFC**: investasi IFC di bank dan lembaga keuangan mikro. Jasa penasihat keuangan IFC - Akses ke Program Pendanaan, Program Iklim Investasi termasuk dukungan yang terus menerus untuk Biro Kredit dan Registri Agunan Berpindah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
	Proses pemerintah daerah yang lambat, rumit dan kurang transparansi	Survei Putaran 1 Perilaku Bisnis di Daerah selesai dengan diluncurkannya laporan Doing Business di Indonesia 2010 pada Desember 2009. Temuan telah disampaikan kepada para pemangku kepentingan nasional kunci dan sebagai hasilnya dijadikan rujukan publik oleh badan-badan nasional, termasuk Menteri Dalam Negeri. Proyek Daerah Generasi Investasi, fasilitasi investor, layanan purna, advokasi kebijakan dan pemasaran lokasi dasar di dua provinsi.	2a.Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mendukung operasi bisnis melalui pengenalan prosedur yang tidak berbelit-belit untuk memulai dan memperoleh izin usaha. *Baseline*: Studi Sub-national Doing Business (DB) untuk 15 kota dan studi baseline lainnya. *Sasaran*: Pengurangan 50% dalam waktu dan biaya memulai usaha dan perizinan di kota-kota klien. 40.000 usaha menyelesaikan prosedur yang baru, sehingga mengakibatkan peningkatan 10% atas nilai agregat penghematan di sektor swasta dari baseline 2010 (saat ini sedang dibangun). 2b.Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk menarik dan mempertahankan investor (Generasi Investasi). *Baseline*: Tidak adanya penggunaan sistem pelacakan investor dan pendekatan manajemen hubungan klien untuk generasi investasi. Tidak adanya pedoman untuk fasilitasi investor yang efektif, layanan purna, advokasi kebijakan dan pemasaran lokasi dasar. *Sasaran*: Pelaksanaan penerapan sistem pelacakan investor dan pendekatan manajemen hubungan klien di dua provinsi. Pengembangan pedoman untuk fasilitasi investor yang efektif, layanan purna, advokasi kebijakan dan pemasaran lokasi dasar.	• Peningkatan kapasitas monitoring dan evaluasi efektivitas kantor perizinan oleh pemerintah kabupaten atau provinsi. **Sesuai Rencana** • Pengesahan Perundangan nasional yang mempengaruhi dan memperbaiki proses perizinan usaha pemerintah nasional dan daerah. **Sesuai Rencana-** Penyingkatan waktu dan prosedur untuk memperoleh perizinan usaha di klien WBG daerah yang terpilih, misalnya, Provinsi DKI Jakarta. **Sesuai Rencana** • Penyingkatan waktu dan prosedur untuk memperoleh perizinan usaha di klien WBG daerah yang terpilih, misalnya, Provinsi DKI Jakarta. **Sesuai Rencana**	**IFC**: Survei Putaran II berlanjut Perilaku Bisnis Sub Nasional; Menyelesaikan Kebijakan Investor dan Program Promosi; Reformasi perizinan berlanjut di DKI Jakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
	Lingkungan Peraturan yang Kompleks menghambat investasi sektor swasta; prosedur yang memakan waktu dan mahal untuk mendirikan perusahaan, membayar pajak, dan menyelesaikan impor; lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah untuk kebijakan investasi.	Kebijakan investasi terkoordinasi melalui PEPI termasuk: (i) PP konsultasi sebuah Daftar Negatif Investasi revisi, (ii) Analisis Independen biaya-manfaat pembatasan FDI; (iii) pemecahan masalah investor, konsultasi kebijakan dan saran, dan (iv) Sekretariat PEPI beralih dari eksekusi bank menjadi eksekusi pemerintah. Portal Layanan Satu Atap Indonesia (INSW); peningkatan transparansi peraturan perdagangan dan prosedur untuk izin impor. Doing Business (DB) meningkat dari peringkat 129 (2009) menjadi 122 (2010). Waktu memulai bisnis diperpendek menjadi 60 hari untuk memulai sebuah perusahaan dari 105 hari.	3. Peningkatan lingkungan peraturan dan koordinasi antar lembaga dalam pengembangan kebijakan investasi. *Baseline*: 105 hari untuk mendirikan sebuah perusahaan; proses konsultasi lemah sebelum adanya penerbitan peraturan; link tidak memadai antara bea cukai dan instansi pemerintah lain yang berpartisipasi dalam INSW; kebijakan investasi tidak terkoordinasi. *Targets*: 50 hari untuk mendirikan sebuah perusahaan, 2 bulan untuk mendapatkan restitusi PPN; hubungan baik antara bea cukai dan Gas lainnya melalui pengajuan tunggal dan sinkronisasi pengolahan informasi melalui INSW; koordinasi kebijakan investasi melalui PEPI; perbaikan peringkat DB.	• Pemantauan dan pengumuman publik tentang lama mendirikan perusahaan, lama waktu pengembalian PPN; dan lama waktu tunggu kontainer. **Sesuai Rencana** • Kemajuan menuju sekretariat PEPI berstaf penuh yang profesional dan fungsional. **Sesuai Rencan** • Pemantauan peraturan, data, IT dan harmonisasi dan perampingan proses bisnis untuk setiap GA dalam INSW. **Sesuai Rencana**	**Pengetahuan**: Reformasi Regulasi, National Single Window (Layanan Satu Atap Nasional), Survei Pemantauan Iklim Investasi, Jasapoenasihat IFC - Program Iklim Investasi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
	Keputusan Kebijakan diambil tanpa analisis yang memadai dari alternatif dan biaya dan manfaat; kurangnya spesialis untuk memberikan informasi pada tingkat yang diperlukan, koordinasi yang lemah antara unit penelitian	Monitoring Team Empat tim spesialis telah ditetapkan: (i) Pusat Hubungan Masyarakat, (ii) Tim Logistik, (iii) Tim Pameran dagang, (iv) Tim Pemantau Perdagangan	4. Penguatan struktur kelembagaan dan kapasitas dari Departemen Perdagangan untuk memungkinkan dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan perdagangan yang lebih efektif. *Baseline*: Tidak adanya tim spesialis yang dapat memberikan tingkat analisis yang dibutuhkan untuk keputusan kebijakan. *Sasaran*: Setidaknya 4 tim khusus yang melekat pada masing-masing Direktorat Jenderal di Departemen Perdagangan memberikan dukungan analitis untuk pengembangan strategi perdagangan domestik dan internasional dan untuk memberi respon kebijakan yang cepat; tim terlibat secara efektif dengan mitra kebijakan di Departemen.	• Setidaknya 3 tim spesialis dibentuk dan sepenuhnya dikelola oleh staf dan penasehat Departemen Perdagangan. **Selesai** • Tim Spesialis yang terlibat dalam pengembangan analisis untuk keputusan kebijakan. **Sesuai Rencana** • Penerbitan / perubahan peraturan yang dianggap dapat memperbaiki iklim bisnis perdagangan. **Sesuai Rencana**	**Pengetahuan**: Program untuk Meningkatkan Kebijakan Perdagangan Indonesia; Peningkatan Kapasitas Perdagangan; Perdagangan Domestik Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
	Hubungan transparan dan efisien antara petani kecil, UKM dan bisnis pedesaan dan pasar komersial yang masih lemah. Dua pertiga penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan hampir 50% dari jumlah tersebut terlibat dalam kegiatan terkait pertanian. Petani kecil biasanya memiliki pemahaman yang terbatas tentang bagaimana untuk terlibat dalam rantai pasokan komersial; posisi tawar yang jelek, akses yang terbatas terhadap informasi pasar yang lebih luas, insentif / peningkatan kapasitas terbatas untuk mengadopsi praktek lingkungan dan pertanian yang baik.	Peraturan dan prosedur untuk sistem nasional struk gudang dikembangkan bersama dengan Departemen Perdagangan dan Industri. Identifikasi mitra yang dapat digunakan untuk mempromosikan lebih lanjut dan mengembangkan pendanaan yang berhubungan dengan komoditas pertanian. Perjanjian untuk mempelajari rantai pasokan kopi dan kakao dan desain produk keuangan untuk petani kecil. Pusat Pelatihan bagi petani kopi petani kecil di Sumatera didirikan dengan sponsor dari pengumpul kopi internasional.	5. Peningkatan akses ke pasar untuk bisnis Indonesia pada komoditas pilihan atau sektor berbasis industri. *Baseline*: Tidak adanya tim spesialis yang dapat memberikan tingkat analisis yang dibutuhkan untuk keputusan kebijakan. *Sasaran*: Investasi / pendanaan baru untuk UKM dalam rantai pasokan; kontrak UKM meningkat dengan perusahaan besar, penjualan dan pendapatan untuk perusahaan yang terkena dampak meningkat, meningkatnya transparansi harga. 6. Peningkatan akses pasar dan keberlanjutan jangka panjang bagi petani kecil dengan menghubungkan mereka ke perusahaan yang dipilih (dikenal sebagai 'pemimpin kemitraan') yang mencari sumber-sumber pasokan aman dan berkembang. *Baseline*: rantai pasokan yang panjang terdiri dari banyak tengkulak dengan akses terbatas bagi petani kecil atas pasar, informasi dan teknologi. *Sasaran*: rantai pasokan yang lebih pendek dengan akses langsung bagi petani ke pemimpin kemitraan, peningkatan akses atas bibit ber kualitas, informasi harga dan teknologi pertanian.	• Peningkatan teratur dalam investasi melalui sumber langsung oleh perusahaan perintis. **Sesuai Rencana** • Hubungan atau Forum Bisnis yang diciptakan untuk memfasilitasi hubungan-hubungan perusahaan perintis atau UKM. **Sesuai Rencana** • Perbaikan dakam mekanisme temuan harga komoditas pertanian melalui sistem struk gudang. **Sesuai Rencana** • Meningkatkan kompetensi UKM untuk memenuhi standar pasar. **Sesuai Rencana**	**Pengetahuan**: Layanan Advisory IFC - Program Mata rantai Agribisnis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
Core Engagement Area 2: Infrastructure					
Meningkatkan tingkat dan efisiensi investasi publik dan swasta dalam infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dan memperkuat daya saing.	Kurangnya investasi di bidang infrastruktur, yang belum sejalan dengan pertumbuhan ekonomi; investasi dalam infrastruktur turun dari sekitar 6% dari PDB pada tahun 1997 menjadi 2% pada tahun 2000, dan hanya 3,2% pada tahun 2005.	Investasi publik kembali ke tingkat sebelum krisis (1997), tapi masalah dalam pelaksanaan dan efisiensi mengurangi dampak yang seharusnya tercapai.	1. Peningkatan kuantitas dan efisiensi belanja pemerintah nasional dan daerah untuk infrastruktur melalui perbaikan kebijakan subsidi, kerangka insentif, dan perencanaan pengeluaran dan penganggaran. *Baseline*: Realisasi belanja untuk infrastruktur nasional adalah Rp 18,9 triliun pada tahun 2006. *Target*: Realisasi belanja untuk infrastruktur nasional untuk tahun 2010 meningkat 25% dibanding tahun 2006.	• Peningkatan anggaran daerah (APBD) pengeluaran modal sebesar 20% dari tingkat tahun 2005. **Sesuai Rencana** • 35% dari penduduk perkotaan memiliki akses ke air pipa. dibandingkan dengan 31% pada tahun 2006. **Sesuai Rencana** • 60% dari penduduk dengan akses listrik dibandingkan dengan 55% pada tahun 2003. **Sesuai Rencana** • 86% dari jalan nasional tetap dalam kondisi baik / cukup baik dibandingkan dengan 81% di tahun 2006. **Sesuai Rencana**	**Pendanaan**: Transportasi Wilayah Indonesia Timur 2; Infrastruktur Jalan Strategis; Restrukturisasi Listrik Jawa-Bali; Pembangunan Pasar Gas Domestik; Infrastruktur Sarana Keuangan; Manajemen Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi; Perbaikan Operasional Dam; WSSLIC II; WSSLIC III; Air Minum & Sanitasi Perkotaan TF : Rekonstruksi Penyelesaian Masyarakat Aceh; Pembangkit Listrik Panas Bumi; IRFF Aceh; Rekonstruksi Infrastruktur Aceh; Rehab Pemukiman Berbasis Masyarakat Jogya; Fasilitas Pendanaan Pengembangan Ekonomi Aceh; Rekonstruksi Livelihood Jogya / Jawa; Dukungan PAMSIMAS; DAS NTB; Program W & S **Pengetahuan**: Selesai: Strategi Infrastruktur Papua; sedang berlangsung: Strategi Pengelolaan Air Surabaya; Penilaian Industri Konstruksi Jalan; Kerangka dan Kebijakan PPP; Pendanaan Inisiatif WASAP II; Kebijakan dan Pendanaan Perumahan berpenghasilan rendah; Sumber listrik Geothermal; Dialog Kebijakan Sektor Energi; Dana Jaminan Infrastruktur; Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur; Dukungan Penasehat Telekom dan TIK; Nasihat Kebijakan Telecom dan TIK; Nilai Utilitas air berfungsi baik; Pembangunan TA Telkom dan TIK; Pondasi untuk Kemampuan E-Pemerintah; Program Administrasi WSP; Dukungan Penasehat WSP ; Fasilitas W & S Aceh-Nias; Layanan Penasihat IFC - Kemitraan Publik Swasta.
	Persyaratan penyediaan Infrastruktur di Indonesia sangat besar, dan melampaui apa yang dapat didukung melalui investasi publik.	Revisi Perpres Pengembangan Proyek Produsen Listrik Tenaga panas bumi Independen	2. Peningkatan investasi swasta di bidang infrastruktur melalui pembentukan kerangka PPP yang sehat secara fiskal, kredibel dan transparan. *Baseline*: komitmen keuangan Sektor Swasta untuk proyek-proyek infrastruktur swasta adalah 0,5% dari PDB pada tahun 2005. *Sasaran*: komitmen keuangan sektor swasta untuk meningkatkan proyek-proyek infrastruktur swasta menjadi 0,75% dari PDB pada tahun 2010. 3. Ketersediaan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) yang dijamin bank dan formula harga yang kuat. Peningkatan kapasitas instansi pemerintah terkait untuk melakukan tender dan untuk melayani sebagai model untuk IPP panas bumi berikutnya. *Baseline*: *Sasaran*:	• Transaksi PPP ditenderkan. **Tertunda tapi diharapkan** • Komitmen keuangan sektor swasta untuk meningkatkan proyek-proyek infrastruktur swasta menjadi 0,75% dari PDB dibandingkan 0,5% pada tahun 2005. **Tertunda tapi diharapkan** • IPP panas bumi yang dijamin Bank, mobilisasi dana sektor swasta untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan listrik bagi 750.000 menjadi 3,7 juta orang. **Tertunda tapi diharapkan** • Letter of Intent untuk panas bumi dengan Provinsi Jawa Barat. **Sesuai Rencana**	

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
Core Engagement Area 3: Community Development and Social Protection					
Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan dengan meningkatkan mata pencaharian dan pelayanan, dan mengurangi sisa kantong-kantong kerentanan untuk memperkuat inklusivitas. Sasaran: Mengurangi penduduk miskin ekstrim sampai 8-10% pada akhir 2014 dari 15,4% (2008).	Sekitar 110 juta orang masih hidup di bawah US $ 2 per hari (perkiraan Bank Dunia); Penduduk miskin perkotaan dan pedesaan yang berjumlah besar karena kurangnya pendapatan dan tidak memadai kesempatan kerja produktif; kurangnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat miskin; kesenjangan antar daerah yang luas (khususnya, provinsi di wilayah timur); penduduk miskin rentan terhadap guncangan seperti kenaikan harga pangan, bencana alam.	Cakupan PNPM diperluas sebagai pendekatan yang efektif dan bertarget untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.	• 1. Perbaikan kondisi tata kelola sosial-ekonomi dan tingkat lokal (kelurahan-desa) kaum miskin perkotaan melalui penerapan yang lebih luas dari pengurangan kemiskinan dan program pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan atau hibah untuk infrastruktur tingkat tersier.	• Peningkatan tingkat pengeluaran rumah tangga atau peningkatan akses terhadap layanan ekonomi dan sosial di 7.800 desa (pada 6240 (80%). **Sesuai Rencana** • Infrastruktur dibangun 20% lebih murah daripada yang dibangun oleh pendekatan tak berbasis komunitas di 80% dari desa partisipan. **Sesuai Rencana** • EIRR> 30% untuk tipe infrastruktur pedesaan yang besar di desa PNPM. **Sesuai Rencana** • 80% tingkat kepuasan pengguna mengenai layanan dan pemerintahan tingkat lokal yang lebih baik (92% (PNPM-Rural 7/31/09) **Sesuai Rencana** • Peningkatan tingkat pengeluaran HH dan memperbaiki akses ke layanan ekonomi dan sosial minimal 2.500 kecamatan miskin (4.371 (PNPM-Rural 7/31/09). **Sesuai Rencana** • Peningkatan indikator kesehatan dan pendidikan di 130 desa di 5 provinsi melalui pilot PNPM Generasi CCT: imunisasi bayi: 53,2%; persalinan dibantu: 64,7%; pendaftaran SD: 88,2%; pendaftaran SMP: 62,1% **Sesuai Rencana** • DAK berbasis kinerja diperkenalkan. **Sesuai Rencana** • MIS didirikan untuk memeriksa pemenuhan program CCT. **Sesuai Rencana** • Perluasan daerah cakupan CCT. **Sesuai Rencana**	**Pendanaan**: PPK Ketiga; Kemiskinan Urban II; Kemiskinan Urban III; PNPM Perkotaan, PNPM Perkotaan III **Pengetahuan**: Pengurangan Kemiskinan Melalui Tata Ekonomi; Penguatan Kapasitas Lokal untuk Kemiskinan; Peningkatan Kapasitas PNPM Mandiri;
		Tingkat kemiskinan ekstrim: 14,2% (2009) 13,3% (2010)	2. Perbaikan tata kelola sosial-ekonomi dan tingkat lokal (kelurahan-desa) di daerah pedesaan melalui penerapan yang lebih luas dari pengurangan kemiskinan dan program pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sumber daya untuk mendukung usulan investasi produktif yang dikembangkan oleh masyarakat, dengan menggunakan proses perencanaan partisipatif. *Baseline*: Tingkat kemiskinan 16,7% pada tahun 2007. *Sasaran*: Tingkat kemiskinan turun menjadi 12% pada tahun 2012. Sasaran PNPM-Pedesaan: imunisasi bayi: 61,2%; persalinan dibantu: 69,5%; pendaftaran SD: 99.5%; pendaftaran SMP: 72%		**Pendanaan**: PNPM Pedesaan, PNPM Pedesaan III; FEATI; TF: PPK Nias **Pengetahuan**: Selesai: Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan untuk Aceh; Kebijakan pembangunan PNPM; masih berlangsung: Program Kinerja Penargetan Kemiskinan; Perbaikan MIS untuk PNPM; Review Akuntansi Biaya untuk CDD; Dialog Kemiskinan dalam Pro-miskin dan Pro-kerja; CDD; Strategi Komunikasi PNPM; Arah Strategis PNPM; Pilot Umum PNPM; Desain dan Implementasi Program SP ; Membantu Hasilkan Lapangan Kerja untuk Pertumbuhan Pro-miskin; M & E TA; Mekanisme Alternatif Pelayanan; M &E PNPM; MIS Terpadu untuk PNPM; Mgmt & Admin Program CPDA;
			3. Pengeluaran publik dibuat lebih pro-masyarakat miskin dengan mengurangi subsidi bahan bakar dan merealokasikan penghematan untuk intervensi strategis yang ditargetkan untuk masyarakat miskin dan keberhasilan pelaksanaan CCT. *Baseline*: 3,8% dari PDB sebesar US $ 83/bbl. *Sasaran*: subsidi BBM menurun sebesar 50% dan sumber daya yang di-realokasikan diantaranya program pro-miskin.		**Pengetahuan**: Penilaian Biaya Pengguna untuk CDD; Standar Pelayanan Minimum;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
		Pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan nasional (Peraturan Presiden No 15/2010).	4. Integrasi dan pelaksanaan program kemiskinan dan perlindungan sosial diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi; keputusan kebijakan dan program didasarkan atas data dan analisis pemantauan kemiskinan.. *Sasaran*: Meningkatkan cakupan manfaat bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak miskin (menurunnya kekeliruan pencatatan, meningkatnya jumlah rumah tangga miskin yang menerima manfaat, meningkatnya bagian rumah tangga miskin dalam manfaat total).	• Pembentukan dan pelaksanaan sistem penargetan nasional dan sistem informasi manajemen terpadu (MIS). **Tertunda tapi diharapkan** • Sistem pemantauan dan respon shock dan kerentanan nasional dibentuk. . **Tertunda tapi diharapkan** • Peningkatan frekuensi, ketepatan waktu dan aksesibilitas data sosial-ekonomi dan tenaga kerja. **Tertunda tapi diharapkan**	Seperti diatas. Juga DPL7-9
Core Engagement Area 4: Education Sector					
Meningkatkan pendidikan dasar untuk mencapai MDG tingkat pendaftaran sekolah dasar dan target melek huruf dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan daya saing dan inklusivitas. Mengurangi prevalensi kekurangan gizi bayi: menjadi <15% dari 18,4% pada tahun 2008.	Kurangnya layanan ECED yang terjangkau, khususnya bagi kaum miskin.	Standar ECED diterbitkan.	1. Perkembangan anak-anak miskin yang membaik antara usia 0 sampai 6 di provinsi-provinsi terpilih: Persentase anak usia 0-6 kurang gizi menurun. *Baseline*: 27% gizi anak-anak (2001). *Sasaran*: 20%.	• ECED berbasis komunitas di provinsi terpilih. 6000 desa telah mengadopsi pendekatan berbasis komunitas untuk memberikan layanan ECED. **Sesuai Rencana** • Pembentukan dan pemanfaatan standar untuk layanan pengembangan anak usia dini. **Sesuai Rencana** • Standar ECED yang diterbitkan dan digunakan di lebih dari 10 provinsi. **Sesuai Rencana** • Pengurangan guru absen: Sasaran: untuk mengurangi ketidakhadiran sampai 10 persen dari 19 persen (survei tahun 2002). **Sesuai Rencana** • Insentif yang buruk bagi kabupaten untuk mempekerjakan guru dihapuskan. **Sesuai Rencana**	**Pendanaan**: BERMUTU; Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini; BOS-KITA; Pendidikan Tinggi DISINI; Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan; TF: Kapasitas Pendidikan Dasar **Pengetahuan**: Manajemen Guru; Pemuda Keterampilan & Devt; Dialog & Strategi Sektor Pendidikan; studi manajemen Berbasis Sekolah; Penilaian Sektor Pendidikan; Informasi Pendidikan & Komunikasi;
	Rendahnya kualitas pendidikan dasar.	Jumlah absen sebesar 12% di kabupaten BERMUTU	2. Meningkatnya jumlah guru pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi akademik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Guru. *Baseline*: 30% dari guru sekolah dasar dan menengah memegang gelar S1 atau lebih. *Sasaran*: 70% dari guru memegang gelar S1 atau lebih.		

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
	Inefisiensi pengeluaran akibat lemahnya manajemen pendidikan di tingkat kabupaten dan sekolah dalam kerangka desentralisasi yang tidak lengkap		3. Improved efficiency and equity in the use of resources to increase access to basic education; inefficiencies resulting from excess supply and unequal distribution of teachers are reduced: oversupply of teachers as measured by student-teacher ratio (STR) in basic education is reduced. *Baseline*: Primary STR=20 and junior secondary STR=14. *Target*: Primary STR=26 and junior secondary STR=22.		
	Tingginya biaya yang harus dikeluarkan sendiri pada semua tingkat pendidikan.		4. Membesarnya bagian sumber daya pendidikan dasar disalurkan ke pengguna akhir sehingga pendidikan dasar terjangkau oleh siswa miskin dan meningkatkan partisipasi pendidikan menengah. 4a.Rata-rata biaya tahunan per siswa di SD dan SMP untuk anak-anak termiskin semakin berkurang *Baseline*: Rp 182.810 untuk tingkat SD dan Rp 416.010 untuk sekunder per siswa per tahun pada tahun 2006 harga (Susenas, 2006). *Sasaran*: Melalui pendanaan bersama dari program BOS, Rp 150.000 untuk tingkat SD dan Rp 250.000 untuk pendidikan menengah per siswa per tahun pada harga tahun 2006. 4b.Partisipasi netto di pendidikan menengah (gabungan SMP dan SMA) meningkat. *Baseline*: 57% (2007). *Sasaran*: Melalui pendanaan bersama dari program BOS, meningkat menjadi 70% (2012).	• Meningkatnya ukuran dan pengelolaan BOS yang lebih baik. **Sesuai Rencana** • Mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendaftaran, biaya kuliah, tes / ujian, buku, belajar materi pendukung dan alat tulis. **Sesuai Rencana**	

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
	Kurangnya daya saing lulusan dari sistem pendidikan.	Tracer studies underway.	5. Peningkatan program pelatihan dan sistem pendidikan tinggi: 5a.Kelembagaan akreditasi diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan penyedia layanan pelatihan sektor swasta. *Baseline*: 215 lembaga pelatihan sektor swasta terakreditasi, dan tidak ada lembaga pendidikan tinggi terakreditasi. *Target*: 430 lembaga pelatihan swasta terakreditasi dan 5% dari lembaga pendidikan tinggi terakreditasi. 5b. Studi pelacak Reguler lulusan universitas dan lulusan dari program pelatihan kerja untuk membangun posisi mereka berikutnya di pasar tenaga kerja. *Baseline*: Study Tracer (pelacak pendidikan) belum berfungsi *Target*: Study Tracer berfungsi.	• Peningkatan kurikulum di lembaga pendidikan tinggi dan penyedia layanan pelatihan sektor swasta. **Sesuai Rencana**	

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
	Kurangnya informasi, dan pemantauan dan evaluasi yang lemah atas pendanaan pendidikan.		6. Perbaikan informasi dan implementasi yang lebih baik, pemantauan dan evaluasi pendanaan pendidikan melalui program BOS-KITA. *Baseline*: Tidak ada pemantauan independen reguler dana pendidikan. yang sistematis. *Sasaran*: Sistem informasi Sekolah dan distrik (TRIMS) didirikan.	• Survei independen pemantauan pelaksanaan BOS daerah diselesaikan. **Sesuai Rencana** • TRIMS beroperasi di daerah terpilih. **Sesuai Rencana**	
Keterlibatan Utama Bidang 5: Kelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana					
Memperkuat kapasitas negara untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengatasi tantangan lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan. Pengurangan emisi gas rumah kaca 26% pada tahun 2020. Rehabilitasi 500.000 ha / tahun dan menghindari percepatan deforestasi.	Kurangnya koordinasi kewenangan penggunaan lahan yang terfragmentasi, tumpang tindih dan desentralisasi menghambat kemampuan mengelola lahan hutan dan gambut, dan eksploitasi sumber daya energi terbarukan.	Rencana Umum rehabilitasi lahan gambut di Kalimantan Tengah diterbitkan dan mulai diimplementasi. Program Kesiapan Nasional untuk REDD diluncurkan. Perjanjian Partisipasi Fasilitas Kemitraan Pendanaan Karbon Hutan diselesaikan. Menandatangani Letter of Intent untuk REDD.	1. Membantu Pemerintah membangun mekanisme koordinasi dan lembaga yang diperlukan untuk manajemen perubahan iklim untuk memenuhi target. Mendukung Indonesia dalam mengakses dan memanfaatkan pendanaan internasional. Mempromosikan energi terbarukan. Target sedang dikembangkan.	• Koordinasi mekanisme Perubahan iklim ditetapkan. **On Track** • Peraturan tentang bisnis panas bumi dikeluarkan. **On Track** • Rencana energi nasional dikeluarkan. Completed • Peraturan hukum Energi diterbitkan.**Completed** • Aksi Perubahan iklim disertakan dalam rencana pembangunan jangka menengah. **Completed** • Aksi dianggarkan dan dalam pelaksanaan. **On Track** • Master plan lahan gambut Kalimantan Tengah dilaksanakan. **On Track** • Inventarisasi lahan Gambut, analisis baseline dan risiko selesai. **On Track** • Keputusan Menteri dan pedoman untuk program REDD. **Completed** • "Kesiapan" REDD tercapai. **On Track**	

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
	Terbatasnya insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan perkebunan hutan dan program mitigasi perubahan iklim pada padang rumput terdegradasi dan untuk menerapkan praktek-praktek terbaik karena biaya dan risiko tinggi, serta kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam penggabungan mitigasi perubahan iklim berbasis hutan dan investasi kehutanan komersial.		2. Penciptaan hutan tanaman yang layak pada lahan di daerah perbatasan dengan tujuan menggabungkan produksi kayu dan permanfaatan perubahan iklim dengan bekerja sama dengan perusahaan perkebunan hutan, pemerintah daerah, LSM, masyarakat lokal dan sektor kehutanan yang lebih luas. Target sedang dikembangkan.	• Pelaksanaan dua proyek pilot hutan karbon dengan perusahaan perkebunan hutan dan masyarakat lokal. **On Track** • Keterlibatan para pemangku kepentingan dan strategi komunikasi untuk hutan perkebunan lestari. **On Track**	
Memperkaya kemampuan untuk meningkatkan kesiapan risiko bencana, tindakan mitigasi, dan pemulihan pasca-bencana dan tanggap rekonstruksi untuk memperkuat kelestarian.	Kemungkinan duplikasi upaya karena namyaknya mitra pembangunan dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB); Struktur Badan Manajemen Bencana baru mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengarusutamakan PRB.	PBR telah diarusutamakan melalui proses perencanaan berbasis risiko. Meningkatnya kapasitas dalam penilaian kebutuhan dan rekonstruksi wilayah pasca bencana.	2. Menguatnya Pengurangan risiko bencana (PRB) dalam perencanaan dan administrasi pembangunan. *Baseline*: tingkat yang ada pendanaan untuk PRB. *Sasaran*: meningkat 20% pada tahun 2010	• Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang dikeluarkan oleh Bappenas. **Sesuai Rencana** • Badan Penanggulangan Bencana beroperasi. **Sesuai Rencana** • Rencana Lokal manajemen bencana disusun. **Sesuai Rencana** • Pusat operasi darurat dirancang dan berfungsi. **Sesuai Rencana**	

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)	Masalah dan Hambatan	Kemajuan Terakhir	Sasaran Pembangunan yang diharapkan dapat terbantu oleh WBG	Indikator/Tonggak Menengah untuk melacak sasaran CPS	Instrumen WBG
			3 Memperkuat penataan kelembagaan dan memungkinkan lingkungan untuk memfasilitasi pelaksanaan partisipatif pengurangan risiko bencana. *Baseline*: Situasi kini lemah dan terfragmentasinya kapasitas dan kebijakan / peraturan PRB. *Target*: Meningkatnya kapasitas dan kerangka operasional untuk PRB di tingkat kabupaten / provinsi pada tahun 2012.	• Kebijakan, perundangan dan peraturan pengurangan risiko bencana disusun dan dilaksanakan di provinsi terpilih. **Sesuai Rencana**	
			4 Public awareness program implemented to promote a culture of safety. *Baseline*: Currently no systematic quality public awareness program. *Target*: Increased public awareness by 2012.	• Five-year strategic development plans are developed and implemented by provincial government. **On Track** • Public awareness programs developed and implemented. **On Track**	

Lampiran 2

Kemajuan ke Arah Millenium Development Goals (MDGs)

Secara keseluruhan, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai sebagian besar Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*- MDGs). Indonesia telah mencapai target menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$ 1 sehari sampai setengahnya menjadi 10,3 persen di tahun 2006. Angka Partisipasi Murni untuk sekolah dasar juga akan tercapai. Indonesia telah secara baik berhasil menurunkan ketimpangan-ketimpangan gender. Kemajuan-kemajuan yang signifikan telah dilakukan dalam penurunan tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun. Target untuk proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum mungkin bisa tercapai. Target untuk proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi yang memadai telah tercapai. Target untuk kepemilikan yang aman, didefinisikan sebagai rumah tangga-rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah, kemungkinkan juga akan tercapai. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah memperlihatkan adanya kemajuan dalam melindungi lingkungan hidupnya. Hal ini tercermin dari pertumbuhan dalam penetapan kawasan-kawasan hutan lindung dan komitmen Indonesia dalam menggunakan sumber-sumber energi alternatif untuk menurunkan efek rumah kaca. Namun demikian, indikator-indikator lain kurang positif. Tingkat kematian ibu menunjukkan kecenderungan yang kurang memberi harapan dan negara ini mungkin tidak akan mencapai target MDG tersebut sebelum tahun 2015. Menurunkan proporsi populasi yang menderita gizi buruk juga tetap merupakan sebuah tantangan.

Kemajuan Indonesia ke arah Pencapaian MDGs

Tujuan	Target	Target 2015	Nilai	Sejak	Di jalur yg sesuai untuk ketercapaian
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan	Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan di bawah US$1 sehari (indikator: proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan di bawah US$1 sehari)	10.3	7.5	2006	Ya
	Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan (indikator: prevalensi malnutrisi)	8.7	28.2	2005	Belum
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua	Menjamin bahwa semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar (indikator: tingkat partisipasi pendidikan dasar)	100	94.7	2006	Ya
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Menghapus ketimpangan gender pada pendidikan dasar dan menengah, tahun 2005, dan di semua tingkat pendidikan sebelum tahun 2015 (indikator: angka partisipasi murni untuk sekolah dasar bagi anak-anak perempuan)	100	99.97	2006	Ya
4. Mengurangi kematian anak	Menurunkan sampai 2/3 tingkat kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun (indikator: tidak ada kematian anak di bawah usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup)	33	40	2005	
5. Meningkatkan kesehatan ibu	Menurunkan sampai 3/4 rasio kematian ibu (indikator: Rasio Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup)	105	307	2003	Belum
6. Memerangi HIV, malaria dan penyakit menular lainnya	mengendalikan penyebaran HIV/AIDSdan mengurangi kasus baru pada 2015 (indikator: Prevalensi HIV/AIDS)	-	0 .1	2007	Belum
	Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Tuberkulosis hingga tahun 2015 (indikator: Tingkat prevalensi TB per 100.000)	tidak ada	262	2005	Ya
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup	Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 (indikator: proporsi penduduk dengan akses terhadap air aman)	65.5	57.2	2006	Ya
	Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk tanpa akses berkelanjutan terhadap terhadap sanitasi dasar hingga tahun 2015 (indikator: proporsi penduduk dengan akses terhadap sanitasi dasar)	65.5	69.3	2006	Ya
	Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh, minimal 100 juta, pada tahun 2020 (indikator: proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah)	-	84	2005	Ya
	Memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program negara dan mulai menurunkan hilangnya sumber-sumber daya lingkungan hidup (berbagai Indikator)	-	-	-	
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan	Bekerja sama dengan negara-negara berkembang, membangun dan menerapkan strategi-strategi untuk kerja yang layak dan produktif untuk anak muda. (indikator: tingkat pengangguran anak muda)	Tidak ada	25.4	2007	Belum

Lampiran 3

Kemitraan Di Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Anti Korupsi

Pendahuluan

Selama dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan yang mengesankan dalam peningkatan akuntabilitas publik. Reformasi-reformasi tata kelola pemerintahan dan anti korupsi telah menjadi bagian dalam program-program pemerintah penerus reformasi dengan tahun-tahun awal "reformasi" yang terpusat pada reformasi secara menyeluruh dan amandemen konstitusi. Contohnya, antara tahun 1999 dan 2004 kebebasan pers ditingkatkan; wewenang diserahkan kepada daerah; checks and balances antar cabang pemerintahan eksekutif, legislatif dan judikatif diperkokoh; peran kekuatan pengamanan (polisi dan militer) dirumuskan ulang; pemilihan umum langsung Presiden dan Kepala-kepala Daerah diamanahkan; dan sebuah kerangka kerja kelembagaan untuk melakukan pencegahan, penyidikan, dan penuntutan korupsi telah dikembangkan. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menggerakan perubahan-perubahan ini yang nyata, khususnya melalui Kemitraan untuk Pembaharuan Pemerintahan (*Partnership for Governance Reform*). Pada tahun-tahun tersebut juga terjadi pemberlakuan undang-undang fiskal yang sifatnya mendasar dan penataan kembali kementerian-kementerian perekonomian utama, yang semuanya dirancang untuk memperbaiki sistem-sistem anggaran dan pengelolaan keuangan.

Sebelum tahun 2004, Indonesia meningkatkan fokus pada perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan konsolidasi lembaga-lembaga akuntabilitas. Upaya ini dibangun berdasar landasan-landasan legislatif yang mengatur pengelolaan keuangan publik, (termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, peraturan usaha, audit dan pengawasan dan evaluasi) dan memperkenalkan (di tingkat kementerian) reformasi-reformasi birokrasi meski masih terbatas. Konsolidasi akuntabilitas berlanjut pada bidang anti-korupsi, dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menonjol dan kini penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi berprofil tinggi menjadi hal yang semakin biasa terjadi. Meski demikian, Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung tetap menjadi sumber kekhawatiran. Kebebasan pers, tetap berfungsi dengan baik dengan adanya pemberitaan dan pengungkapan skandal-skandal korupsi secara teratur. Seiring dengan berkurangnya peran Kemitraan untuk Pembaharuan Pemerintahan, peran / Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organization* - CSO) lainnya telah meningkat dan organisasi-organisasi ini telah mengembangkan keahlian khusus. Contohnya, di bidang transparansi anggaran dan lingkungan hidup, kelompok organisasi ini telah memerankan peran penting dalam penerimaan status Indonesia menjadi kandidat dalam / Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (*Extractive Industry Transparency Initiative* - EITI).

Pemerintahan yang baru telah melanjutkan fokus terhadap reformasi sistem-sistem utama tata kelola pemerintahan. Pada kenyataannya terdapat peningkatan fokus pada reformasi birokrasi di seluruh tingkat pemerintahan, yang sebagaimana diketahui merupakan hambatan terhadap efektivitas reformasi-reformasi birokrasi di tingkat Kementerian. Sementara itu, walaupun menghadapi kesulitan dalam lingkungan politiknya, KPK terus memperlihatkan contoh yang kuat. Ancaman-ancaman terhadap kepemimpinan KPK dan keinginan nyata DPR untuk secara bersama-sama menghentikan kepemimpinan tersebut di akhir tahun 2011 memperlihatkan suatu risiko nyata. Sementara itu, Kepolisian dan Kejaksaan Agung terus terdera tuduhan-tuduhan korupsi. Terdapat kekhawatiran yang muncul terkait korupsi di tingkat pemilihan baik di tingkat nasional maupun daerah dan dampak korupsi ini terhadap keputusan anggaran dan kebijakan. Mengingat pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 2014, korupsi Pemilu merupakan bidang yang berisiko tinggi.

Bank Dunia dan mitra-mitra pembangunan lainnya telah memainkan peranan penting dalam mendukung reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. *Partnership for Governance Reform* telah memimpin aliansi CSO yang mendukung prakarsa-prakarsa Pemerintahan yang kritis yang mengubah wajah Indonesia setelah terjadinya Krisis Ekonomi Asia. Bank Dunia menyediakan analisis dan dukungan termasuk melalui publikasi utamanya "Memberantas Korupsi di Indonesia (*Combating Corruption in Indonesia*) ". Tim Tata Kelola Pemerintahan dan Anti-Korupsi (*Governance and Anti-Corruption* - GAC) Bank Dunia di Jakarta dipimpin oleh seorang penasihat senior tata kelola pemerintahan (senior governance advisor) dengan mandat untuk menjawab masalahan-masalah tata kelola pemerintahan baik yang bersifat sistemik maupun yang khusus berkaitan dengan Bank Dunia (termasuk hal-hal seperti rencana aksi anti-korupsi yang bersifat spesifik untuk masing-masing proyek).

Akan tetapi, sejak tahun 2004 fokus tata kelola pemerintahan ini makin berkembang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan kinerja yang kokoh selama

krisis ekonomi global, kredibilitas internasional Indonesia mengalami pembaharuan. Dengan adanya status negara dengan pendapatan menengah, dukungan politik untuk Kelompok Konsultatif untuk Indonesia (*Consultative Group for Indonesia* - CGI) berakhir dan diganti dengan dialog-dialog kebijakan yang spesifik untuk masing-masing donor. Program-program pembaharuan tata kelola pemerintahan yang kuat, khususnya di Kementerian Keuangan, juga di KPK dan instansi lain, telah menarik perhatian. Dengan latar belakang ini, dukungan Bank Dunia berkembang ke dua arah yang penting. Pertama-tama, program reformasi kelembagaan yang pada awalnya terbatas di Kementerian Keuangan (terkait perbaikan sistem-sistem anggaran dan perbendaharaan) telah menyebar ke administrasi perpajakan dan kemudian ke instansi pemerintah lainnya. Program-program ini berpusat pada perubahan kelembagaan secara menyeluruh, mengubah business processes atau tata laksana, memperbaiki pengelolaan sumber daya manusia, dan sistem dukungan informasi dan komunikasi. Selain itu, Bank Dunia telah meningkatkan dukungan untuk program-program utama pemerintah khususnya seputar tata kelola program pengentasan kemiskinan, program-program pendidikan dan transfer dana ke daerah kepada fokus awal yaitu pada pinjaman yang berorientasi kebijakan dan proyek pendanaan (policy and project lending).Akan tetapi, momentum reformasi pada lembaga-lembaga akuntabilitas utama, khususnya di bidang peradilan, terus tertinggal, dan pendekatan-pendekatan terorganisir terhadap masalah-masalah sistemik termasuk lewat sisi permintaan (oleh CSO) memainkan sebuah peran yang lebih terbatas dan terfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya.

Pendekatan tata kelola pemerintahan dan penurunan korupsi pada *Country Partnership Strategy* (CPS) untuk Tahun Fiskal 09-12 (FY09-12), terpusat pada "Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif (Investing in Indonesia's Institutions)' dan berkerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat akuntabilitas dan mendorong pengawasan fidusia terhadap proyek-proyek Bank Dunia. CPS menyajikan suatu pendekatan yang dirancang untuk memberdayakan upaya-upaya tata kelola pemerintahan dan anti-korupsi, melalui kerjasama dengan berbagai lembaga anti-korupsi dan lembaga pengawasan Indonesia untuk memperkuat lembaga-lembaga dan sistem-sistem nasional yang secara langsung berdampak pada kebijakan dan belanja pemerintah. Keterlibatan World Bank Group (WBG) dalam hal tata kelola pemerintahan dan anti-korupsi mempunyai tiga pilar utama: bermitra dengan lembaga-lembaga Indonesia yang terdepan dalam pemberantasan korupsi; membidik "*islands of good governance*" atau teladan dalam bidang tata kelola pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga dan kawasan-kawasan tertentu; memperkuat sistem-sistem untuk menekan dampak risiko korupsi dan menangani dugaan korupsi pada proyek-proyek yang didukung oleh WBG.

Bermitra dengan Lembaga-lembaga Indonesia yang terdepan dalam pemberantasan korupsi

Bank Dunia telah mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, dalam meningkatkan pelayanannya. Bidang-bidang dukungan tersebut termasuk:

- Memfasilitasi pelatihan profesionalisme dan kepemimpinan staf KPK;
- Menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat strategi komunikasi dan rencana aksi KPK;
- Menerbitkan temuan-temuan penelitian terbaru tentang korupsi di sektor publik dalam laporan Integritas Sektor Publik Indonesia pada tahun 2008 dan 2009.

Di bawah *Governance Partnership Facility* Bank Dunia, upaya persiapan sedang ditempuh untuk memungkinkan KPK mengaudit *business process* atau tata laksana di lembaga-lembaga utama dan memperkenalkan cara-cara inovatif untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kualitas pelayanan.

Sementara KPK adalah lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia, sebagian besar penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebagai pengakuan terhadap peran penting Kejagung, Bank Dunia memperkuat Biro Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung supaya reformasi lembaga ini didasarkan pada bukti penelitian lapangan dan konsultasi publik yang kuat. Sebagai contoh, konsultasi yang dilakukan bersama masyarakat telah merubah mekanisme ganti rugi untuk penyalahgunaan dana dalam proyek pemberdayaan masyarakat (*community driven development projects*). Setelah dilaksanakannya suatu proyek penelitian yang bersifat pilot atau rintisan dengan Kejaksaan Agung, saat ini berlangsung diskusi untuk memperluas penelitian dan menyusun rekomendasi kebijakan.

Dengan mengubah peran Bank Dunia dari 'pengawas' menjadi 'mitra' dalam upaya-upaya untuk memerangi korupsi, Bank Dunia berharap dapat bekerja secara lebih efektif dengan lembaga-lembaga pengawasan nasional dan para pemangku kepentingan utama lainnya. Perubahan-perubahan ini diharapkan mampu mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan menguatnya kepemilikan atas upaya untuk mencegah dan menekan dampak kerugian akibat korupsi di proyek-proyek pemerintah di Indonesia.

Walaupun sudah terdapat kemajuan yang terus menerus di KPK, merosotnya kemajuan pada badan-badan akuntabilitas utama dan munculnya kekhawatiran seputar korupsi pada pemilihan umum menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut khususnya yang melibatkan Parlemen. Munculnya kekhawatiran ini juga menyiratkan perlunya memperbaharui pemahaman terkait tata kelola pemerintahan untuk mempertimbangkan kemajuan yang dicapai oleh cabang pemerintahan eksekutif, sementara pada saat yang sama mengakui adanya kemajuan yang kurang cepat dalam lembaga peradilan dan meningkatnya kekhawatiran terhadap tindakan yang dilakukan oleh lembaga legislatif.

Membidik Islands of Good Governance

Pergeseran untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang melakukan reformasi pada program-program inti merupakan fokus utama CPS saat ini. Kerja-kerja bersama Kementerian Keuangan bergerak dengan cepat di bidang Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Nasional (SPAN) (dengan para Direktur Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Deputi Keuangan Bappenas) sebagai suatu model. Hal ini diikuti oleh keputusan Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan untuk mengembangkan Program Aministrasi Perpajakan (PINTAR) dalam reformasi modernisasi perpajakan untuk memperbaiki transparansi dan meningkatkan pendapatan. Salah satu kemitraan lainnya dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Perkerjaan Umum (Dirjen Bina Marga). Dirjen Bina Marga, yang secara historis merupakan lingkungan dengan tata kelola pemerintahan yang cukup sulit, mengambil sebuah prakarsa, yang didukung oleh Bank Dunia dan KPK, untuk memperkuat prakarsa-prakarsa *e-government* mereka untuk meningkatkan transparansi proyek dan proses pelaporan. Sebagai tambahan terakhir adalah sebuah program dengan Badan Pusat Statistik yang bekerja sama dengan Bank Dunia dalam mengatasi kelemahan-kelemahan kelembagaan yang menghambat pemahaman yang efektif terkait pertumbuhan dan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Program-program reformasi ini mempunyai unsur-unsur yang sama yang terpusat pada business process yang dimodel ulang, sistem-sistem Sumber Daya Manusia, perubahan manajemen dan perbaikan informasi dan teknologi komunikasi yang didorong oleh tujuan untuk peningkatan tata kelola pemerintahaan dan penyelenggaraan pelayanan.

Mungkin inovasi terbesar yang diperkenalkan oleh Bank Dunia melalui CPS adalah integrasi dukungan Bank Dunia, khususnya fitur-fitur tata kelola pemerintahan, ke dalam program-program utama Pemerintah. Yang pertama dari fitur-fitur ini diciptakan pada saat Pemerintah memperluas program-program pengentasan kemiskinan yang dirintis Bank Dunia ke dalam sebuah upaya yang bersifat nasional (PNPM). Program-program KDP (Program Pembangunan Kecamatan/*Kecamatan Development Program*) dan UPP (*Urban Poverty Program*/Program Kemiskinan Perkotaan) dibangun di atas landasan tata kelola pemerintahan yang baik , keterbukaan dan akuntabilitas, yang dirancang untuk melibatkan masyarakat ke dalam peran serta dan pengawasan yang aktif. Serupa dengan hal tersebut, Bank Dunia menambahkan dukungan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan konsep manajemen berbasis sekolah yang difokuskan pada keterlibatan orang tua untuk meningkatkan hasil (*outcome*) dari tata kelola dan pendidikan. Desentralisasi program BOS ke tingkat kabupaten memberikan kesempatan untuk melibatkan pemerintah-pemerintah daerah dalam hasil-hasil pendidikan ini, seraya memperbaiki tata kelola di tingkat sekolah dan kabupaten. Baru-baru ini, sebuah program baru Bank Dunia untuk mendanai DAK (Dana Alokasi Khusus) telah dikembangkan untuk mengganti pembelanjaan infrastruktur di tingkat daerah, atas hasil peningkatan pelaporan dan verifikasi. Program ini menambah pendanaan berbasis hasil (*results based financing*) seraya memperbaiki tata kelola dengan verifikasi yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah) dan sebuah sistem pelaporan berbasis web untuk meningkatkan keterbukaan.

Memperkuat Sistem Anti-Korupsi Indonesia pada Proyek yang Didukung oleh WBG

Integrasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan ke dalam kemitraan-kemitraan ini, dan semua prakarsa Bank Dunia dilakukan dengan mengarusutamakan langkah dan inisiatif pencegahan korupsi. Tim *Governance and Anti Corruption* (GAC) yang dipimpin oleh Penasehat Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Bank Dunia di Indonesia (*Country Office Governance Adviser*) Indonesia (seorang anggota

Country Leadership Team) yang bertugas mengkoordinasikan dialog kebijkan dan menjalin hubungan dalam bidang anti korupsi, mengawasi sisi operasional yang terkait dengan tata kelola pemerintahan, memberikan saran kepada team leaders setiap proyek terkait strategi tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi, dan bertanggung jawab untuk membangun agenda penelitian dan kerangka kerja pemantauan terkait tata kelola pemerintahan. Praktek pengawasan didukung oleh suatu Tim Operasional yang ada dilapangan. Suatu Komite *Governance and Anti Corruption* yang sifatnya lintas sektoral mengintegrasikan mekanisme pencegahan korupsi ke dalam rancangan proyek, mendukung dan mengkaji ulang Rencana Aksi Anti Korupsi/*Anti Corruption Action Plans* (ACAPs), memantau pelaksanaan ACAP dan berhubungan dengan mitra-mitra Pemerintah Indonesia. Tim GAC juga akan bekerja bersama badan-badan Pemerintah Indonesia berkaitan dengan ACAP dan mendukung penyidikan dugaan korupsi pada program-program yang didanai WBG.

Prosedur untuk menindaklanjuti dugaan korupsi telah disetujui bersama dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung integrasi ke dalam kelembagaan pemerintah. WBG sering kali memberikan bantuan teknis kepada instansi Pemerintah Indonesia yang melakukan kajian terhadap dugaan terjadinya korupsi pada proyek WBG di mana bantuan tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas teknis pencegahan di instansi pemerintah Indonesia yang terkait.

Pertemuan rutin telah diselenggarakan bersama Kementerian Keuangan untuk menilai perkembangan yang telah dicapai, mengembangkan tindak lanjut, dan merumuskan perbaikan-perbaikan dan sanksi-sanksi, serta langkah yang mungkin dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian. Ketika WBG mengajukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara hukum atau menerapkan sanksi-sanksi administratif, WBG merundingkan dasar untuk tindakan yang diajukan tersebut dengan Kementerian Keuangan dan dengan pemberitahuan yang memadai sebelumnya.

Lampiran 4

Mengarusutamakan Keterlibatan Dalam Keadilan Gender

Walaupun sudah terdapat kerangka kerja nasional yang relatif positif untuk keadilan gender, perempuan Indonesia masih tertinggal dibanding laki-laki di sejumlah bidang sosial dan ekonomi termasuk bidang kesehatan, partisipasi tenaga kerja, keterwakilan politik, akses terhadap keadilan hukum, serta proses-proses perencanaan pembangunan.[18] Contohnya, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan masih hanya sekitar 50 persen dibanding 80 persen untuk laki-laki, dan sementara keterwakilan politik sudah hampir dua kali lipat sejak 1999 (dari 10,8 menjadi 18,0 di tahun 2009), hanya 2 persen dari para pejabat publik yang berada pada posisi pembuat keputusan penting adalah perempuan. Perempuan miskin secara khusus menghadapi tantangan-tantangan yang sulit. Sementara tingkat kemiskinan untuk rumah tangga-rumah tangga yang dikepalai laki-laki di kawasan perkotaan menurun selama lima tahun terakhir (dari 10,7 persen menjadi 8,9 persen) seiring dengan keseluruhan perbaikan-perbaikan kemiskinan, untuk rumah tangga-rumah tangga yang dikepalai perempuan di kawasan perkotaan sebenarnya tingkat kemiskinannya naik dari 7,6 persen menjadi 8,3 persen, suatu kecenderungan yang mengkhawatirkan di masyarakat yang secara cepat mengkota.

Bank Dunia sudah bekerja secara aktif dengan Pemerintah pada program-program yang membantu menghilangkan hambatan-hambatan terhadap kesetaraan gender dan sudah terdapat sejumlah keberhasilan dalam mengintegrasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan ke dalam program kerjanya untuk mempromosikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mempunyai akses yang setara terhadap sumber-sumber daya, suara dalam pembangunan masyarakat dan negaranya, dan bisa memetik keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru yang muncul akibat pembangunan. Berdasarkan pada pengalaman-pengalaman ini dan dengan maksud untuk mendorong efektivitas dan meningkatkan dukungan kami untuk upaya-upaya Pemerintah Indonesia pada masalah-masalah keadilan gender di berbagai instrumen dan sektor, Bank Dunia telah memulai proses untuk mengembangkan sebuah Strategi Gender untuk menyelaraskan kesetaraan gender dan menyerasikan pelaksanaan CPS untuk sisa waktu ini dan setelahnya. Sebagai tambahan, Indonesia akan menjadi salah satu kasus kajian di WDR 2012 (World Development Report/Laporan Pembangunan Dunia) tentang Kesetaraan Gender dan Pembangunan.

RPJMN juga menekankan pentingnya peran serta wanita dalam pembangunan, terutama kepemimpinan wanita dalam sektor publik, komunitas bisnis dan organisasi sosial

Gender pada Program Pendukung Bank Dunia

Kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan sedang dilaksanakan dalam tiga ranah strategis: meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan, meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan dan penyelenggaraan layanan.

Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan

Gender merupakan salah satu dari delapan area tematis yang dipaparkan dalam Strategi Nasional untuk Akses terhadap Keadilan, yang dikembangkan oleh Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan, yang diselenggarakan oleh Bappenas, dimana Bank Dunia telah memainkan sebuah peran penting. Sebuah program pemberdayaan perempuan di bidang hukum yang berpusat pada penguatan akses perempuan terhadap keadilan di tingkat masyarakat dan pelibatan

[18] Pastinya, kebijakan-kebijakan, undang-undang dan peraturan-peraturan yang bias gender dan tidak ramah terhadap perempuan masih ada. Komisi Nasional Hak Perempuan, misalnya, telah mengidentifikasi 154 peraturan daerah yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

lembaga-lembaga peradilan resmi dan pemerintah daerah merupakan area-area inti dari program tim Keadilan untuk Orang Miskin. Beberapa kerja penelitian dan diagnostik tentang gender dalam area-area tematik ini telah dilakukan dan dikembangkan, seperti " Dampak Gender dari Sertifikasi Hak Milik" (Aceh Gender Impact of Titling) oleh tim MDF (Multi-Donor Fund/Dana Multi-Donor) untuk Aceh dan Nias; "Akses Perempuan untuk Keadilan di Indonesia: Studi Kasus Para Pencari Keadilan Perempuan di Cianjur, Brebes, dan Lombok"; "Studi Kasus tentang Penyelesaian Sengketa Perempuan lewat Lembaga-lembaga Adat di Aceh" oleh tim Keadilan untuk Orang Miskin; studi kerentanan, komparatif dan remitansi buruh migran perempuan.

Peran Serta Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan progam utama penurunan kemiskinan Pemerintah, yang didukung oleh Bank Dunia dan sejumlah donor, yang sedang diperluas untuk menjangkau 6.326 kecamatan. Termasuk di dalam pendekatan gender untuk PNPM pedesaan: (i) pemberdayaan ekonomi lewat dana-dana bergulir dan program-program keuangan mikro untuk perempuan (salah satu dari tiga proposal yang diserahkan dari desa diperbolehkan berasal dari perempuan); (ii) pemberdayaan politik dengan memastikan suara-suara para perempuan didengar selama pembuatan dan perencanaan program lewat pembentukan forum khusus perempuan; dan (iii) pemberdayaan sosial dengan mensyaratkan salah satu proposal pembangunan desa harus datang dari kelompok-kelompok perencanaan perempuan. Gugus PNPM perkotaan adalah Program Kemiskinan Perkotaan (*Urban Poverty Program* - UPP). Pendekatan gender PNPM-Perkotaan adalah: (i) untuk memastikan 40 persen peserta pertemuan di Badan Koordinasi Masyarakat (BKM) dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) adalah perempuan; (ii) persyaratan kuota 30 persen fasilitator perempuan; (iii) data terpilah berdasarkan jenis kelamin di Sistem Informasi Manajemen, seperti para peserta pertemuan, para peserta pelatihan, para anggota badan wali amanah, para anggota kelompok-kelompok masyarakat dan para penerima bantuan.

Sebuah program kemiskinan berskala besar yang didukung dengan bantuan teknis oleh Bank Dunia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH, yang masih dalam tahap proyek rintisan ini, memberi keuntungan-keuntungan keuangan secara tunai bagi rumah tangga-rumah tangga yang sangat miskin di 13 provinsi dengan syarat para ibu mendapatkan perawatan pranatal, melahirkan dengan tenaga terlatih dan perawatan paska melahirkan, bersama dengan ibu mereka, bayi dan balita mendapatkan layanan kesehatan untuk pencegahan , dan semua anak usia sekolah bersekolah. Program ini memberi keuntungan keuangan tunai secara langsung untuk para ibu seraya menggalakkan perilaku sehat dan investasi pada sumber daya manusia untuk melawan pewarisan kemiskinan kepada generasi-generasi berikutnya dari rumah tangga-rumah tangga tersebut, yang mana keuntungan juga dinikmati oleh anak-anak perempuan. Bukti awal memperlihatkan peningkatan yang menggembirakan dalam pemanfaatan layanan-layanan kesehatan oleh para perempuan di rumah tangga-rumah tangga peserta PKH serta peningkatan belanja kesehatan tanpa adanya penurunan belanja di bidang-bidang lain. Hal ini mestinya bisa memperbaiki kesehatan persalinan dan kelahiran serta munculnya perilaku sehat.

PEKKA, Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, juga sedang didukung oleh Bank Dunia. Menjangkau 11.195 janda daerah terpencil di lebih dari 345 desa di 73 kecamatan di 8 provinsi, PEKKA merupakan program pertama pemberdayaan utama untuk para janda di Indonesia.

Mendorong Pertumbuhan dan Penyelenggaran Layanan

Sistem Target Nasional (National Targeting System - NTS) akan digunakan untuk mensasar program yang ditujukan untuk rumah tangga miskin, termasuk rumah-rumah tangga rentan dengan kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis seperti rumah tangga dengan perempuan hamil. Rancangan NTS yang diajukan dan survey pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS11) akan memastikan bahwa program-program seperti itu bisa disasar secara memadai. Lebih jauh lagi, penelitian analitis dan percobaan di lapangan akan mempertimbangkan kebutuhan praktis dan strategis gender pada hasil-hasil yang disasar, seperti status hukum rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan bahkan jika ada status semacam itu, dan dampak gender dari penyelenggaraan peran serta masyarakat dan pertemuan-pertemuan pada siang ataupun malam hari. Dengan demikian, memperbaiki efektivitas pentargetan

akan menguntungkan elemen ini, baik secara langsung dengan memastikan adanya identifikasi atau suara yang memadai, atau secara tidak langsung dengan memberikan keuntungan untuk kelompok-kelompok marginal. Upaya-upaya lain termasuk menyelaraskan gender ke dalam Program Pendidikan Dasar termasuk ke dalam Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah untuk *Trust Fund-Kapasitas Pendidikan Dasar/Basic Education Capacity-Trust Fund* (BEC-TF), memperbaiki kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab pembuatan anggaran terkait gender di bawah *Program Analisa Belanja Publik dan Harmonisasi Kapasitas/ Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization Program* (PEACH), yang menjawab akses perempuan terhadap keuangan, dan meneliti peran perempuan dalam ketenagakerjaan. Kesetaraan gender juga diadopsi dalam melaksanakan operasi-operasi berdana hibah, termasuk Dana Multi Donor untuk Aceh dan Nias, Dana Rekonstruksi Jawa, serta Program Persediaan Air dan Sanitasi dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dan Khusus (*Support for Poor and Disadvantaged Areas*- SPADA))

Menuju Keadilan Gender

Sejumlah upaya ini adalah signifikan dan bisa dikembangkan dengan membangun sebuah strategi, pedekatan program secara meyeluruh untuk gender, yang akan meningkatkan efektivitas, memanfaatkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan mendorong kemampuan untuk mempengaruhi reformasi terkait gender. Pemerintah telah memberikan sinyal untuk komitmen yang diperbaharui dan tengah berupaya mempercepat perbaikan kesetaraan gender; Inpres No.3/2010 tentang pembangunan yang berkeadilan, menyoroti masalah-masalah keadilan untuk perempuan dan anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga memaparkan pentingnya untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, khususnya kepemimpinan perempuan dalam sektor publik, komunitas bisnis dan organisasi-organisasi sosial.

Bank Dunia akan terus mengarusutamakan gender ke dalam operasi, pendanaan, dan analisisnya di berbagai tingkat yang berbeda. Sebagai tambahan, walaupun banyak program/proyek mempunyai penasihat/analis/focal point gender, telah ditunjuk pula seorang spesialis gender di tingkat nasional. Spesialis gender tersebut akan memimpin tim dalam mengembangkan Strategi Gender untuk tingkat nasional. Spesialis gender juga akan memandu dan memberi nasihat kepada tim tentang cara merumuskan, menjalankan dan memantau upaya-upaya kebijakan gender Bank Dunia. Hal ini akan dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Australia.

Monitoring dan evaluasi yang cermat penting untuk mencapai komitmen Kelompok Bank Dunia terhadap kesetaraan gender. Saat ini, perangkat monitoring dan evaluasi tampaknya efektif dalam melacak indikator-indikator terpilah berdasar jenis kelamin pada keluaran/ output dan, di tingkat tertentu, pada hasil-hasil/outcome. Ke depannya, lebih banyak upaya akan diperlukan untuk memastikan bahwa dimensi gender diintegrasikan ke dalam hasil-hasil monitoring dan evaluasi dampak. Hal ini bisa dicapai dengan memperkuat kemitraan untuk menyepakati tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran gender dan untuk mengenali dan memilih indikator-indikator yang berhubungan dengan gender dalam mengukur hasil-hasil dan dampak-dampak. Informasi seperti itu dapat menjadi hal yang berharga dalam memperbaiki internvensi-intervensi program dan meningkatkan dampaknya.

International Finance Corporation/Korporasi Keuangan Internasional (IFC) sedang dalam proses merumuskan aspek-aspek gender pada kerja mereka mengenai hutan lestari dan infrastruktur. IFC juga merencanakan untuk memaparkan serangkaian modul keuangan [berperspektif] gender dengan Bank Indonesia, yang dimaksudkan untuk menyadarkan para pengambil kebijakan dan bankir dari bank sentral seputar pendanaan [berbasis] gender lewat pemanfaatan studi kasus dari daerah-daerah yang berbeda.

Kedepannya, prioritas-prioritas untuk kerja gender adalah:

- **Mengembangkan sebuah Strategi Gender:** Menetapkan tujuan-tujuan dan kerangka kerja hasil untuk strategi Gender Nasional, termasuk memperbaiki Bank Dunia - kinerja Indonesia dalam memperbaiki kesetaraan gender lewat nasehat kebijakan, jejaring, advokasi dan kerja tim, dan menghubungkannya dengan para pembuat kebijakan di seluruh sektor.
- **Membangun Kerjasama:** Bekerja dengan tim untuk memastikan integrasi prinsip-prinsip dan praktek-praktek gender yang memadai ke dalam proyek-proyek, program-program dan upaya-upaya analisis yang mana keprihatinan-keprihatinan gender merupakan hal yang penting.
- Mendorong Kemitraan: Membangun dan menjaga hubungan dengan Mitra-mitra Pembangunan, Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil/CSO.

Lampiran 5

Kinerja Portofolio

No	Negara	# Proyek	Portofolio Aktif (miliar $)	Komitmen Berisiko ($)	Komitmen Berisiko ($)	# Proyek Berisiko	% Proyek Berisiko
1	Indonesia	47	9,241	319	3%	6	13%
2	Cina	79	10,096	1,342	13%	13	16%
3	Filipina	27	1,848	173	9%	4	15%
4	India	76	21,775	2,877	13%	7	9%
5	Pakistan	22	4,095	254	6%	4	18%
6	Brazil	63	10,469	524	5%	8	13%
7	Meksiko	27	8,908	568	6%	3	11%
8	Turki	17	5,038	936	19%	4	24%
9	Mesir	21	3,444	145	4%	1	5%

Sumber: Portal Operasi (CPRT)

Di antara negara-negara Asia Timur Pasifik, Indonesia mempunyai portofolio terbesar setelah China, dalam hal jumlah komitmen bersih, yang per Oktober 2010, berjumlah total US$8,43 milyar, termasuk US$2 miliar untuk Pinjaman Kebijakan Pembangunan (Development Policy Loan - DPL) Opsi Penarikan Sewaktu-waktu (Deferred Drawdown Option - DDO). Portofolio terdiri dari 32 proyek peminjaman dan 16 hibah yang dijalankan penerima bantuan, dengan kebanyakan dana hibah ditujukan untuk upaya-upaya rekonstruksi Aceh, Nias dan Jogya. Portfolio investasi di Indonesia kebanyakan meliputi area-area kerja sebagai berikut: pemberdayaan masyarakat & perlindungan sosial (26%), pendidikan (16%) dan infrastruktur (15%).

Hasil-hasil Proyek dan Reformasi Pinjaman Investasi

Di Tahun Fiskal 2010, 11 proyek investasi baru disajikan kepada Dewan, untuk sebuah total komitmen senilai US$3,19 miliar. Di Tahun Fiskal 2011, DPL 7 (US$600 miliar) dan DPL 4 Infrastruktur (US$200 miliar) telah disetujui. Indonesia merupakan negara pilot untuk pendekatan baru berbasis risiko yang merupakan bagian dari reformasi Investasi Pinjaman (Invesment Lending - IL). Di antara proyek-proyek baru yang dijalankan, proyek Transmisi Tenaga Indonesia / Indonesia Power Transmission (US$255 miliar) merupakan proyek pertama yang disetujui oleh Dewan dengan menggunakan proses penyiapan proyek lewat Track 1 (percepatan).

Proyek-proyek Berisiko

Kinerja portofolio keseluruhan bisa dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah/ (Middle-Income Countries - MICs) dalam hal proyek-proyek berisiko.

Jumlah proyek-proyek berisiko di Indonesia telah turun dari 12 proyek di Tahun Fiskal 2008 menjadi 6 proyek di bulan November 2010. Sementara proyek-proyek berisiko saat ini hanya 5% dari total komitmen, Bank Dunia memberi dukungan kepada Pemerintah dalam upayanya mengambil tindakan-tindakan perbaikan, termasuk lewat restrukturisasi proyek dan tambahan anggaran supervisi.

Rasio Pencairan (Disbursement Ratio)

Rasio pencairan secara konstan telah lebih baik: dari 20% di akhir Tahun Fiskal 08 menjadi 48% dan 60%, di akhir Tahun Fiskal 09 dan 10 secara berturut-turut. Untuk Tahun Fiskal 11, rasio pencairan berada pada 10% sejak Oktober 2010. Bank Dunia juga memperkenalkan mekanisme pendanaan kembali untuk mengganti uang belanja Pemerintah yang disepakati untuk proyek-proyek BOS KITA dan PNPM.

Peringkat-peringkat Hasil Kelompok Evaluasi Independen (*Independent Evaluation Group*-IEG)

Sebagaimana dirinci dalam Lampiran B2, Program Indonesia mempunyai sebuah warisan hasil-hasil pembangunan yang kurang memuaskan. Hampir setengah proyek yang dinilai IEG selama lima tahun terakhir telah mendapat peringkat tidak memuaskan. Akan tetapi, peringkat-peringkat ini diharapkan membaik berdasarkan pada perubahan menyeluruh dalam rancangan proyek yang membuat proyek menjadi lebih sederhana, peningkatan kapasitas mitra-mitra and penyelarasan pinjaman dengan rencana dan program-program Pemerintah. Dalam hal ini, adalah penting untuk diperhatikan bahwa seluruh operasi yang mendapat peringkat tidak memuaskan tersebut disetujui sebelum tahun 2004. Lebih jauh lagi, sehubungan dengan portofolio saat ini, kurang dari 10 persen dari proyek mendapat

peringkat sebagai proyek-proyek bermasalah selama dua tahun fiskal terakhir.

Manajemen Keuangan, Pengadaan dan Sistem Tingkat Negara

Bank Dunia terus bekerja secara erat dengan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan proyek di area-area manajemen keuangan dan pengadaan, serta pada sistem negara sebagaimana yang dibayangkan dalam CPS. Bank Dunia secara aktif terlibat dalam dialog monitoring proyek Pemerintah setiap kwartal. Sebagai tambahan, sebuah presentasi tahunan portofolio lengkap di sampaikan kepada Bappenas yang mencakup baik proyek pinjaman maupun proyek yang berdana hibah. Berdasarkan kajian baru-baru ini, terdapat 9 proyek (19%) dengan peringkat pengadaan tidak memuaskan (MU, U) dan 4 proyek (8%) dengan peringkat manajemen keuangan tidak memuaskan.

- Terkait dengan manajemen keuangan, kemajuan sudah dibuat dalam perbaikan pengawasan internal dan sistem audit internal dan eksternal, dan pelaporan yang lebih tepat waktu dan bisa diandalkan dibuktikan dengan penurunan mencolok proyek dengan audit-audit opini wajar dengan pengecualian (*qualified*) Dalam hal perbaikan-perbaikan di sistem pengadaan publik, kemajuan telah dibuat dengan pembentukan sebuah badan pengadaan baru (LKPP), penerbitan revisi Keputusan Presiden dan standar dokumen tender, dan persyaratan untuk membentuk sebuah unit layanan pengadaan di setiap kantor perlaksana.
- Di bawah proyek BOS KITA dan DAK yang sedang berlangsung, sistem-sistem negara dalam hal pengawasan internal, manajemen keuangan dan pengadaan dijalankan. Di bawah proyek BOS KITA, sasarannya adalah untuk memperkuat manajemen berbasis sekolah dan peran serta masyarakat, memperbaiki pengaturan fidusia yang ada untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Fitur-fitur proyek DAK fokus kepada hasil, membayar kembali output-output yang memenuhi syarat, memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah, dan memperbaiki sistem monitoring dan fidusia Pemerintah yang ada saat ini.

Among the East Asia Pacific countries, Indonesia has the second largest portfolio after China.

Lampiran 6

Manajemen Operasi Dana Perwalian (*Trust Fund*)

Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya dapat memberikan tanggapan terhadap prioritas kebutuhan Pemerintah Indonesia secara tepat waktu dan melakukan eksplorasi serta menyikapi permasalahan yang muncul dengan kemampuannya untuk menggerakkan sumberdaya trust fund. Pertumbuhan dramatis dari portofolio dana perwalian Indonesia mencerminkan komitmen Bank Dunia untuk membangun kemitraan-kemitraan yang lebih luas dan mendalam di tengah komunitas pembangunan yang lebih besar. Pendanaan hibah yang disediakan di bawah trust fund ini membantu Indonesia menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam mengubah dan memperkuat lembaga-lembaganya. Hasil-hasil kemitraan ini termasuk: mengumpulkan sumber-sumber daya keuangan untuk strategi dan tindakan bersama - baik dalam untuk menyediakan bantuan pada tingkat daerah atau untuk mendukung kebijakan penting dan reformasi kelembagaan; tingkat tanggapan yang lebih besar untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak diantisipasi seperti dalam upaya-upaya pemulihan pasca bencana; dan dialog kebijakan dan penelitian berkualitas tinggi.

Program trust fund Indonesia juga telah membantu dalam meningkatkan pemanfaatan pengetahuan dan sumberdaya Bank Dunia sendiri dalam menyediakan dukungan bagi gerakan strategis khusus dalam agenda Pemerintah. Terdapat berbagai contoh dimana trust fund berfungsi sebagai penghasil pengetahuan, yang berkontribusi pada prakarsa pembangunan yang baru dan memungkinkan pengujian proyek rintisan yang sedang diduplikasi pada skala yang lebih besar. Ketersediaan trust fund telah memungkinkan terjadinya peningkatan yang mencolok dalam kegiatan Bank Dunia yang bersifat analisa dan penasehatan, dan pengawasan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan yang lazimnya dimungkinan oleh anggaran Bank Dunia yang terbatas. Selain dukungan pasca-bencana, kerjasama dalam analisa serta hal-hal lainnya, membantu memberikan pengaruh pada bidang-bidang yang meliputi reformasi kebijakan dalam pendidikan, penyelenggaraan pelayanan, tata kelola pemerintahan, desentralisasi, program-program pengentasan kemiskinan, belanja dan manajemen keuangan publik, dan iklim investasi.

Perubahan dalam Pendekatan Strategis

CPS menyoroti kebutuhan untuk mengubah pendekatan dalam mengerahkan dan mengelola dana-dana perwalian. Dengan dorongan CPS dalam membangun lembaga nasional, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskannya dengan program pemerintah dan secara lebih eksplisit menggunakan dana tersebut untuk mendukung pemberdayaan lembaga, yang mana Bank Dunia berperan sebagai fasilitator, penyelenggara, dan manajer fidusier. Sampai saat ini, kerangka kerja baru dimaksudkan untuk membantu memusatkan kembali pada penyelarasan prakarsa Pemerintah, mitra-mitra donor, dan Bank Dunia. Serasi dengan prakarsa berskala Daerah dan Bank Dunia mengenai Trust Fund, unsur-unsur pokok pendekatan yang diajukan adalah: menggalakkan suatu pendekatan yang lebih strategis yang secara selektif berpusat pada kepemimpinan dan program pemerintah dan kaitan-kaitan dengan mitra-mitra pembangunan; memperkuat manajemen risiko dan pengawasan; dan memperbaiki efektivitas dan proses operasional.

Selama dua tahun terakhir, program ini telah bergerak cepat untuk menerapkan suatu kerangka kerja baru. Secara internal, sebuah proses sistem penyaringan resmi telah dibentuk untuk semua proposal trust fund melalui Tim Kepemimpinan tingkat Negara/*Country Leadersip Team* untuk memastikan keselarasannya dengan program, prioritas dan sinergi Pemerintah. Secara eksternal, *focal point* telah dibentuk di Bappenas, dan pengetahuan Bank mengenai pengelolaan dan pemantauan dana-dana perwalian sedang diteruskan ke Pemerintah, yang juga telah memulai menyertakan RETF (*Recipient Executed Trust Fund*) dan BETF (*Bank Executed Trust Fund*) dalam pelaksanaan penerima manfaat (*recipient work*) dalam proses pembuatan anggaran pemerintah. Pertemuan rutin kini dilangsungkan baik dengan Pemerintah maupun Donor sehubungan dengan proposal dan kemajuan untuk membantu memastikan keselarasan dan kepemilikan.

Memperkuat manajemen risiko dan pengawasan dan memperbaiki efektivitas dan proses operasional juga mendapat keuntungan dari proses penyaringan resmi ini, serta dari prakarsa-prakarsa berskala Bank dan Daerah untuk membantu penyesuaian trust fund. Contohnya, TF (*Trust Fund*) kini sekarang dimasukkan dalam proses pembuatan anggaran tahunan negara dan daerah untuk alokasi sumber-sumber daya secara lebih baik dan untuk menyelaraskannya dengan bidang keterlibatan. Unit Monitoring Pusat (*Central Monitoring Unit* - CMU) suatu Pusat Pelayanan untuk Bantuan Manajemen Trust Fund (*Service Center for Trust Fund Management Support*) di kantor Jakarta yang bertanggungjawab untuk:

- Jaminan Mutu, Monitoring dan Evaluasi di tingkat portofolio, koordinasi donor secara keseluruhan,

pengawasan, standarisasi ketentuan-ketentuan pokok dalam perjanjian-perjanjian dengan donor, sosialisasi praktek yang baik (misalnya, dalam hal negosiasi dukungan dana perwalian);

- Pengkajian portofolio berbasis hasil, termasuk tindak lanjut trust fund berisiko dan dukungan untuk operasional tust fund yang rumit; dan,
- Peningkatan koordinasi dengan unit SDM, hukum dan unit pendukung lainnya.
- Peningkatan pengawasan manajerial terhadap para konsultan secara umum dan menciptakan unit penelitian/ dukungan internal di mana ketrampilan-ketrampilan bisa diserap dengan maksud untuk menggerakkan para konsultan dari BETF ke RETF dalam jangka menengah.
- Proses pemeriksaan satu atap, untuk menurunkan biaya-biaya transaksi.

Portofolio Dana Perwalian Indonesia Indonesia Trust Fund Portfolio

Portofolio Trust Fund Indonesia Bank Dunia telah tumbuh secara dramatis; pada saat yang sama, berbagai pengaturan trust fund telah sangat meningkatkan kerumitan pengelolaan program. Di satu sisi terdapat MDF yang sangat besar atau jumbo trust fund yang dibentuk untuk melaksanakan program-program rekonstruksi dan kegiatan pembangunan kapasitas. Contohnya: MDF untuk Aceh dan Nias, Decentralization Support Facility, Basic Education Capacity Building Program, and the EC/Dutch Trust Fund for Public Financial Management and Revenue Administration Reform Program. Di sisi lain terdapat trust fund sementara yang kecil untuk mendukung kegiatan pendukung yang bersifat khusus (walaupun jumlahnya menurun). Contohnya: Dukungan untuk pengawasan KDP di Aceh dan Sumatra Utara; JSDF: Improving Rural Connectivity for Sustainable Livelihoods; hibah PHRD untuk persiapan proyek; hibah IDF untuk kegiatan khusus pengembangan lembaga; dan, Kampanye TFESSD untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Program CDD.

Total kontribusi per September 2010 adalah sekitar US$1,4 miliar dengan 28 trust fund dengan peruntukan khusus negara dan lebih dari 10 trust fund daerah. Komponen terbesar dari portofolio tersebut adalah MDF untuk Aceh dan Nias, dengan total jumlah sekitar US$692 miliar. Dari segi volume, sekitar 82 persen dari portofolio tersebut merupakan Recipient Executed Trust Funds (RETF). Kontribusi dan pencairan baru tahunan selama tiga tahun terakhir adalah masing-masing sebesar USD150 miliar dan USD160 miliar.

Trust Fund Aktif Indonesia – per September 2010

	Jumlah Hibah (juta USD)
National Government Institution & System	
Public Financial Management & Expenditure Management	21
National Institution – Poverty	7
National Institution – Governance	3
Sub-National Government Institution & System	
PHRD local governance reform co-financing (USDRP)	5
Local governance Reform (DFID - cofinancing ILGRIP)	11
MDF Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA)	23
Decentralization Support Facility (DSF)	24
Decentralization (PEACH & PREM Aceh) Dutch + CIDA	2
Other Local Government	
Education	
Education - Bank executed	42
Education - Government executed	46
Education - Cofinancing ECED	25
Education - Cofinancing BERMUTU	52
Infrastructure	
MDF Infrastructure Reconstruction Enabling Project	42
MDF Infrastructure Reconstruction Financing Facility	100
Java Reconstruction Funds (Jogya housing)	89
Infrastructure grants (AusAid, PHRD, GEF, Dutch Geothermal)	7
MDF Economic Development Financing Facility	50
Water	
NTB Water (cofinancing WSIMP in NTB)	12
Cofinancing WSIMP	14
PAMSIMAS and WSLIC2 cofinancing	6
WSP : WASAP (Recipient Executed)	4
Other – WSP	26
Others – Water	5
Private Sector Development	
Investment Climate	6
Community Development & Social Protection	
PNPM Support Facility	64
Other KDP and community development	22
MDF Housing – Nias	26
Conflict	3
Justice for the Poor	4
Gender, Female-headed households & Female migrant workers	9
Environmental Sustainability and Disaster Mitigation	
MDF Aceh Forest	10
MDF Aceh Forest	8
Environmental Sustainability - excluding green KDP	14
Climate change / Global environment issues	53
Disaster Risk Reduction and Recovery	1
Rural Development	
GEF Coral Reef mapping	8
Others	
MDF Admin	22
Fiscal Agency - MDF Aceh and Nias	141
Fiscal Agency - Decentralization Support Facility	2

Lampiran 7

Pengelolaan Operasi Trust Fund

(Lampiran A)

Multi Donor Fund (MDF) for Aceh and Nias

Donor : Belanda, USAID, UK, Swedia, Norwegia, Selandia Baru, Irlandia, IBRD, Jerman, Finlandia, Komisi Eropa, Denmark, Kanada, Belgia, ADB
Jumlah: USD 697 juta
MDF mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias setelah gempa bumi dan tsunami di bulan Desember 2004, dan gempa bumi di bulan Maret 2005. MDF berfungsi sebagai badan bersama untuk memobilisasi sumber-sumber daya donor dan menyediakan bantuan keuangan untuk mendukung program pemulihan Pemerintah menggunakan kerangka kerja terkoordinasi untuk menyalurkan bantuan ke daerah-daerah rekonstruksi, rehabilitasi infrastruktur dan transportasi, sertifikasi tanah, pembangunan kapasitas dan tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Java Reconstruction Fund (JRF)

Donor: Belanda, UK, Finlandia, EC, Denmark, Kanada, ADB
Jumlah: USD 90 juta
Fokus JRF adalah menyikapi upaya-upaya rekonstruksi dan rehabilitasi menyusul gempa bumi Jawa Tengah - Jogjakarta pada bulan Mei 2006. JRF telah mendanai rekontruksi perbaikan rumah, infrastruktur yang rusak, dan kondisi mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana tersebut.

Decentralization Support Facility (DSF) I dan II

Donor : UK, Kanada, Australia
Jumlah : USD 39 juta
Trust Fund DSF I dan II mendukung pembentukan dan berfungsinya pemerintah-pemerintah daerah dan secara bersamaan membina harmonisasi pendekatan donor untuk mendukung program pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah Indonesia. Dana ini mendukung kemitraan di antara pemerintah, Bank Dunia, dan donor-donor yang memiliki pola pemikiran sama yang terlibat dalam desentralisasi. Dana ini digunakan untuk kegiatan analisis dan penasehatan untuk menyatukan kebijakan dan praktek donor yang berhubungan dengan desentralisasi.

Institutional Development and Capacity Building TF:

Donor : Belanda
Jumlah : Euro 19.5 million
Trust Fund, yang ditambah oleh dana lainnya, mendukung pembaharuan pemerintahan, perbaikan iklim investasi, reformasi-reformasi hukum dan peradilan, pembaharuan layanan sipil, pembangunan Indonesia Timur, dan belanja-belanja publik.

Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading Project (BERMUTU)

Donor : Belanda
Jumlah : USD 52 juta
TF bersama-sama mendanai Proyek BERMUTU yang didukung oleh Bank Dunia. Sasaran pembangunan hibah ini adalah untuk berkontribusi terhadap perbaikan kualitas dan kinerja guru secara keseluruhan melalui peningkatan pengetahuan guru akan mata pelajaran dan ketrampilan pedagogik di ruang kelas. TF ini juga akan berkontribusi terhadap perbaikan kompetensi dan kinerja guru untuk mendorong belajar siswa dan karenanya memberi sumbangan terhadap pembangunan kualitas sumber-sumber daya manusia, yang pada akhirnya mengarah kepada pertumbuhan produktifitas dan perbaikan tingkat persaingan Indonesia dalam ekonomi global.

Basic Education Capacity Program (BEC)

Donor : Belanda, Komisi Eropa
Jumlah : Euro 39 juta
Trust Fund BEC memberi sumbangan terhadap pencapaian MDG dan tujuan-tujuan EFA pemerintah lewat tata kelola yang baik dalam pendidikan. Maksud program ini adalah untuk mendukung perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan layanan-layanan pendidikan dasar terdesentaralisasi oleh pemerintah-pemerintah daerah di area-area program tertentu, dan melalui perluasan, di lokasi-lokasi lain.

PNPM Support Facility (PSF)

Donor: Belanda, UK, Komisi Eropa, Denmark,Australia, USAID
Jumlah : USD 155 juta
Fasilitas Pendukung PNPM merupakan fasilitas pendukung multi-donor yang menyediakan bantuan teknis utama dan pengawasan strategis untuk program utama pengentasan kemiskinan negara ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dengan tujuan membuat program ini sebagai operasi yang berkelanjutan. Dana-dana hibah yang disediakan lewat Fasilitas Pendukung PNPM pada intinya digunakan untuk membangun kapasitas Indonesia dalam menurunkan kemiskinan berskala besar. Program-program kapasitas yang didukung oleh Fasilitas ini melibatkan berbagai pemain Indonesia, termasuk pemerintah-pemerintah tingkat nasional dan daerah, universitas-universitas dan pusat-pusat penelitian, organisasi masyarakat sipil dan prakarsa-prakarsa akar rumput. Program-program fasilitas untuk energi terbarukan membantu membuat PNPM Mandiri menjadi program lingkungan hidup yang lestari, dan Fasilitas ini juga menempatkan sebuah penekanan khusus pada cara-cara inovatif untuk memastikan bahwa PNPM Mandiri menjangkau kelompok-kelompok rentan di seluruh Indonesia.

Lampiran 8

Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF)

Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Samudera Hindia pada tahun 2004 dan 2005 telah menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar di Aceh dan Nias. Tragedi ini memicu terjadinya upaya rekonstruksi besar-besaran yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Komunitas internasional, Pemerintah Indonesia, lembaga-lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil (CSO) berduyun-duyun memberikan komitmennya untuk membantu upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah tersebut. Komitmen yang terhimpun mencapai lebih dari AS$7 miliar. Saat ini upaya-upaya tersebut akan segera berakhir dengan mencapai hasil yang luar biasa.

Dengan nilai total komitmen sebesar AS$678 juta yang berasal dari 15 donor, Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias/Multi Donor Fund for Aceh and Nias (MDF) telah berkontribusi atas 10% dari keseluruhan biaya rekonstruksi. Tujuan utama MDF adalah untuk berkontribusi secara efektif dan efisien upaya rekonstruksi untuk "Aceh dan Nias yang Lebih Baik". Trust Fund ini dibentuk sebagai tanggapan atas permintaan Pemerintah Indonesia untuk mengkoordinir dan mengerahkan dukungan donor untuk proses rekonstruksi tersebut.

MDF terus memainkan peran kunci dalam upaya rekonstruksi Aceh dan Nias. Hal ini dilakukan melalui kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Kontribusi MDF berfokus pada pemberian bantuan pada bidang-bidang strategis yang tidak dicakup oleh kontributor lainnya. MDF terus menjadi mitra yang penting dan berharga untuk Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sisa tugas rekonstruksi dan membantu dalam meletakkan landasan untuk kelanjutan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola yang baik. MDF tetap tetap berkomitmen untuk mendukung Aceh dan Nias hingga mandatnya berakhir di tahun 2012.

Operasi MDF

MDF terus menindaklanjuti hasil Kaji Ulang Jangka Menengah/Mid Term Review (MTR). Temuan-temuan yang disajikan kepada Komite Pengarah di bulan November 2009, menyatakan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh MDF bekinerja sangat baik, dan memiliki arah yang tepat dan saling berkaitan. Sekretariat MDF menyajikan proposal rencana aksi tindak lanjut berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi MTR. Komite Pengarah setuju dengan cakupan dan sifat rencana tersebut. Sekretariat selama ini telah memantau dan melaporkan hasil dan kemajuan melalui laporan enam bulanan.

Saat ini Sekretariat MDF sedang mendiskusikan strategi penutupan dan upaya pemantauan dan evaluasi menjelang penutupan dengan berbaganya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar dampak dan pembelajaran dari upaya rekonstruksi yang dilakukan MDF dapat tertangkap dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Berbagai lokakarya dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan penutupan beberapa proyek. Transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui mekanisme penanganan keluhan. Seluruh upaya ini terus dilaporkan dan dipantau.

Laporan Umum Tahunan MDF keenam telah diluncurkan pada awal tahun ini di Banda Aceh. Tamu dari berbagai kalangan hadir dalam acara tersebut, termasuk para jurnalis lokal. Sebagai bagian dari acara, MDF juga mengadakan pameran dari berbagai proyek dan foto-foto dari lapangan. Acara ini telah secara sukses memberikan gambaran mengenai kinerja MDF di Aceh dan Nias. Selain acara peluncuran, beberapa pejabat pemerintah dan perwakilan donor juga berkesempatan untuk mengunjungi lokasi-lokasi proyek yang berada di sekitar Banda Aceh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat pemahaman mengenai kegiatan di lapangan.

Kemajuan dan Kinerja Portofolio

Portofolio MDF terdiri dari 23 proyek di enam bidang hasil, dengan sebagian besar proyek-proyek tersebut sedang dalam tingkat pelaksanaan penuh. Keenam bidang hasil tersebut adalah Pemulihan Masyarakat; Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastrukur Besar dan Transportasi; Penguatan Tata Kelola; Pelestarian Lingkungan; Peningkatan Proses Pemulihan; dan Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian. Selain itu, pembangunan kapasitas, langkah-langkah penurunan risiko bencana dan pengikutsertaan kelompok-kelompok tersisih, termasuk keikutsertaan perempuan telah dimasukkan dalam komponen masing-masing proyek.

Secara keseluruhan proyek-proyek yang didanai MDF berkinerja baik dan menghasilkan kemajuan yang signifikan. Seluruh proyek berada pada jalur yang tepat untuk mencapai masing-masing sasaran. Aceh dan khususnya Nias akan tetap menjadi wilayah yang memiliki banyak tantangan. Oleh sebab itu beberapa proyek telah dan akan memohon perpanjangan masa implementasi proyek mereka dengan maksud untuk menyelesaikan sasaran-sasaran dan memperkuat strategi penutupan mereka. Batas akhir pelaksanaan seluruh proyek adalah Juni 2012.

Kebanyakan proyek-proyek dibawah bidang hasil Pemulihan Masyarakat telah berakhir, dengan hasil yang sangat memuaskan. Melalui bidang hasil ini, hampir 15.000 rumah telah dibangun atau direhabilitasi di Aceh, dan sekitar 4.500 rumah telah atau dalam proses dibangun di Nias. Beberapa

proyek juga memberikan dukungan dalam pembangunan akses dan jalan desa sepanjang 2.623 km, jembatan sepanjan 7,5 km, sistim irigasi dan drainase sepanjang 1.549 km, serta sarana dan prasaran penting lainnya.Selain kontribusi fisik, proyek-proyek ini juga juga telah memberikan kontribusi penting dalam sertifikasi tanah dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi perempuan, dimana mereka dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pemulihan dan perencanaan masa depan mereka sendiri.

Proyek-proyek MDF di bidang hasil Infrastruktur Besar dan Transportasi memainkan peran penting dalam membangun kembali jaringan infrastruktur, seperti jalan-jalan nasional, provinsi dan kabupaten, serta pelabuhan-pelabuhan, di seluruh Aceh dan Nias. Sebesar AS$227 juta telah dialokasikan ke enam proyek dibawah bidang hasil ini. Jumlah ini mewakili kira-kira 35% dari total dana-dana yang dialokasikan oleh MDF ke proyek-proyek lain. Jumlah ini termasuk penambahan dana ke salah satu proyek yang sudah ada sebesar AS$37 juta untuk membangun sebagian jalan nasional antara Calang dan Meulaboh di pantai barat Aceh. Investasi strategis ini akan menghubungkan antara Banda Aceh dan perbatasan Sumatera Utara. Pembangunan jalan dan jembatan yang sangat dibutuhkan untuk menghubungkan daerah terpencil di Nias juga telah diperbanyak. Hasil-hasil yang menonjol dibawah bidang hasil ini termasuk penyelesaian tiga pusat pengolahan air bersih di Banda Aceh, pembangunan jalan nasional, provinsi dan kabupaten sepanjang 589 km, dan sembilan sistem pengairan perkotaan. Melalui dana hibah MDF, empat pelabuhan laut juga telah di bangun di Aceh dan satu lagi di Nias. Fasilitas ini telah menjadi gerbang pasar dalam dan luar negeri, Melalui Proyek Angkutan dan Logistik Laut, para pengelola pelabuhan juga diberi pelatihan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pelabuhan.

Proyek-proyek dalam bidang hasil Pembangunan Kapasitas dan Tata Kelola terus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah, masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam tata kelola yang baik dan meningkatkan efektivitas dari keseluruhan upaya rekonstruksi. Melalui proyek-proyek ini, MDF telah secara aktif membidik penguatan lembaga-lembaga inti pemerintahan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten untuk mendukung kesinambungan keseluruhan upaya rekonstruksi. Pengalihan aset rekonstruksi pada pemerintah daerah saat ini masih berlangsung, termasuk pembangunan kapasitas dan dukungan untuk pengelolaan aset. Kedua unsur ini juga masuk dalam kegiatan proyek lain, termasuk dalam proyek Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal Pedesaan (CBLR3). Penguatan institusi pemerintah berfokus pada peningkatan kemampuan pengelolaan aset negara melalui pendekatan praktek kerja langsung. Proyek tata kelola juga memiliki sasaran untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dan meningkatkan kualitas dari tata kelola dan pelayanan publik. Proyek ini juga berusaha untuk memasukkan unsur Pengurangan Risiko Bencana dalam perencanaan pemerintah.

Sejak awal, MDF telah berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup selama proses rekonstruksi dan rehabilitasi berlangsung. Melalui Proyek Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh/Aceh Forest and Environment Project (AFEP), MDF terus mendukung prakarsa Aceh Hijau pemerintah provinsi Aceh dan memperkuat kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan hutan yang memadai, termasuk mendukung berdirinya fasilitas pendanaan yang berkesinambungan. Pemantauan hutan oleh komunitas-komunitas dan badan-badan penegakan hukum telah diperkokoh melalui Program Jagawana. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan pemantuan dan penanganan kasus pembalakan liar. Proyek ini juga meningkatkan kesadaran lingkungan hidup. Sebuah buku dan kurikulum pendidikan lingkungan hidup telah dikembangkan dan direkomendasikan oleh Kantor Wilayah Pendidikan untuk dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Para guru juga sedang dan telah dilatih untuk mengajarkannya. Proyek Pengelolaan Sampah, juga telah memasuki tahap III, dimana mereka memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pemungutan iuran dan pengelolaan sampah. di Aceh dan Nias dalam termasuk menjaga kesinambungan operasi dan pemeliharaan layanan ini.

MDF saat ini telah memasuki fase akhir dari proses pemulihan pascatsunami dan gempa bumi. Hal ini ditunjukkan melalui dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan pemulihan mata pencaharian di Aceh dan Nias. Pada fase awal MDF dan Pemerintah Indonesia memang memprioritaskan pemulihan masyarakat dan rekonstruksi infrastruktur besar. Namun unsure pemulihan mata pencaharian dan pembangunan ekonomi sudah dimasukkan dalam unsur beberapa proyek. Pada fase akhir ini MDF khusus memberikan perhatian kepada dua unsur ini melalui dua proyek. Keduanya saat ini telah berjalan dan bergerak di sektor pertanian. Waktu implementasi keduanya terbatas hingga Juni 2012.

Keuangan

Sejauh ini MDF telah menerima AS$620 juta dari berbagai donor. Selain itu, MDF juga memperoleh AS$29.8 juta dari penghasilan investasi. Dari jumlah tersebut, sebesar AS$644.5 juta telah dialokasikan ke 23 proyek. Sekitar 78% dari dari

dana yang teralokasi telah dicairkan dan belanja kumulatif proyek dilaporkan berada pada AS$455 juta. Belanda akan menurunkan jumlah kontribusinya hingga AS$25. juta, dan CIDA tidak berencana untuk mencairkan sisa kontribusinya senilai AS$5 juta. Seluruh dana yang ada telah sepenuhnya diprogramkan untuk seluruh proyek tersebut.

MDF telah berkomitmen penuh untuk mengalokasikan dana yang tersedia ke proyek-proyek yang telah disetujui. Dalam pertemuan Ketua Bersama MDF pada Maret 2010, termasuk dalam hal ini Pemerintah Aceh, disepakati bahwa dua prioritas utama kebutuhan Aceh dan Nias adalah infrastruktur dan koordinasi yang berkelanjutan atas upaya rekonstruksi. Dalam rapat Komite Pengarah yang pada bulan September 2010, juga disetujui bahwa apabila terdapat sisa dana dari proyek-proyek yang telah berjalan, maka akan dialokasikan kembali ke proyek-proyek yang sudah ada yang bergerak di bidang peningkatan kapasitas institusi lokal dan rekonstruksi infrastruktur lokal.

MDF memberikan pemerintah fleksibilitas dalam menerapkan proyek melalui departemen terkait atau lembaga mitra pembangunan lainnya. Sekitar 73 persen hibah MDF telah dilah disalurkan ke proyek melalui mekanisme keuangan pemerintah. Sekitar 23 persen dijalankan oleh lembaga dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu UNDP, WFP dan ILO. Sekitar empat persen sisanya disalurkan ke LSM. Pemerintah Indonesia juga memimpin dalam penujukkan Lembaga Mitra yang bertugas memsupervisi proyek dan Lembaga Pelaksana yang menjalankan proyek. Penunjukkan ini mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kemampuan inti lembaga-lembaga tersebut.

Pandangan ke depan

MDF berada pada jalur yang tepat dalam memenuhi mandatnya untuk meletakkan landasan yang kuat untuk masa depan Aceh dan Nias yang berkelanjutan. Sumbangan MDF sangat berarti terhadap keseluruhan upaya rekonstruksi. Hal ini terlihat semakin nyata melalui pemulihan infrastruktur dan jaringan transportasi serta sumbangan-sumbangan lain yang berhubungan dengan rekonstruksi masyarakat yang saat ini telah mendekati akhir. Pembangunan kapasitas dan capain lain dalam hal pengelolaan lingkungan hidup juga telah memperlihatkan dampak. Namun penguatan kapasitas pemerintah daerah merupakan suatu agenda yang berjangka lebih panjang dan akan memerlukan investasi lebih lanjut di luar cakupan MDF untuk memastikan kesinambungan investasi baik fisik maupun non-fisik dari proses rekonstruksi tersebut.

Melihat tingkat alokasi dan pencairan dana hibah MDF yang mencapai 74%, keseluruhan portofolio berada pada posisi yang tepat untuk dapat terus berkinerja baik. Sebagian besar sisa pencairan dana dapat terjadi di sepanjang tahun 2011. Dana proyek yang disalurkan melalui mekanisme keuangan pemerintah akan menjadi pendorong utama pencairan dana serta belanja proyek hingga masa penutupan MDF pada tahun 2012.

Pemantauan kemajuan proyek akan sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan proyek dapat terselesaikan dan keseluruhan dana dapat dicairkan sebelum bulan Juni 2012. Beberapa proyek kunci yang saat ini sedang berjalan perlu dipantau secara lebih dekat untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan kegiatannya pada waktu yang telah ditentukan. Komitmen pemerintah yang kuat serta kerjasama antar instansi pemerintah yang erat perlu dilakukan untuk menghindari kesulitan dalam penerbitan Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA).

MDF telah sepenuhnya memprogram dana yang ada dan yang diharapkan akan masuk dari donor. Setelah memperhitungkan jumlah komitmen yang batal dicairkan oleh donor, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dana yang ada telah dialokasikan ke seluruh proyek.

MDF telah menjadi sumber pembelajaran yang penting bagi upaya rekonstruksi pascabencana. Gempa bumi yang menimpa Haiti pada tahun 2010 telah meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya belajar dari pengalaman Aceh, khususnya dalam mendesain dan menjalankan upaya rekonstruksi pascabencana. Berbagai pembelajaran penting telah dipetik dari berbagai proyek yang didanai MDF. Pembelajaran lain yang juga dapat diberikan adalah bagaimana mengelola sebuah dana perwalian (trust fund) besar. Di Indonesia sendiri, pembelajaran dari MDF telah diadopsi oleh pemerintah, khususnya pendekatan dalam rekonstruksi perumahan dan juga berdirnya sebuah dana perwalian khusus pascabencana, atau yang dikenal dengan *Multi Donor Trust Fund for Disaster Relief and Reconstruction*. Kedepannya perlu dipastikan bahwa pembelajaran dari MDF dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh dan Nias serta wilayah lain yang rawan bencana.

Lampiran 9

Perkembangan-perkembangan Ekonomi Makro Saat ini

Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa selama dekade terakhir dalam hal stabilitas mikro ekonomi dan politik. Kinerja ekonomi mikro sejak akhir tahun 1900an telah memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dan penurunan yang cepat pada neraca-neraca eksternal. Peningkatan pendapatan pajak telah memberi sumbangan terhadap penurunan pada defisit fiskal. Perbaikan pertumbuhan telah menjadi kokoh pada peningkatan investasi-investasi sektor swasta, konsumsi domestik yang terjaga dan surplus-surplus eksternal yang secara umum berkesinambungan. Dalam lingkungan inflasi terkontrol dan peningkatan pendapatan, standar hidup penduduk Indonesia telah membaik dan tingkat kemiskinan telah turun, walaupun banyak yang tetap dekat pada garis kemiskinan. Sebagai tambahan, sebagai hasil dari satu dekade reformasi politik dan kelembagaan yang sukses, Indonesia di tahun 2010 menjadi negara demokrasi dengan pemilu yang terdesentralisasi dan berdaya saing tinggi. Pemerintahan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, dengan tingkat kekalahan calon incumbent sekitar 40 persen (salah satu yang tertinggi dari demokrasi yang bersifat kompetitif manapun). Sebuah sistem check and balances di antara cabang legislatif, yudikatif dan eksekutif semakin menunjukkan keberadaannya, dengan tidak ada satu cabang pemerintah manapun yang dapat mendominasi, dan sedikit hasil kelembagaan yang bersifat 'terjamin'. Jika dulunya kekuasaan dulunya secara radikal terkonsentrasi di Jakarta, saat ini kekuasaan tersebut terbagi di antara 500 sekian pemerintahan kota, kabupaten dan provinsi.

Indonesia sedikit terkena dampak kemerosotan ekonomi global tahun 2008-09 dan sebelum pertengahan 2010 pola-pola pertumbuhan ekonominya telah kembali menjadi normal. Pertumbuhan menurun cepat namun tetap positif di kwartal ke empat tahun 2008, saat penurunan berada di tingkat terendah, kemudian secara bertahap pulih di sepanjang tahun 2009. Ekonomi tersebut kemudian tumbuh menjadi 4,5 persen secara keseluruhan selama tahun 2009 dan menjadi 5.9 persen di tahun 2010. Dampak sosial krisis juga terbatas pada beberapa laporan pemecatan karyawan, dan tingkat-tingkat kemiskinan dan pengangguran terus turun, sementara kemampuan belanja-belanja rumah tangga yang didukung oleh inflasi melambat sampai tingkat terendah dekade ini, walaupun berbagai gangguan-gangguan persediaan pangan sempat menaikkan inflasi kembali menjadi 7 persen di akhir tahun 2010. Selama krisis tersebut, keuangan-keuangan publik tetap dalam keadaan sehat, dengan defisit nominal yang membengkak di tahun 2008 menjadi 1,6 persen dari GDP tahun 2009, yang lebih kecil dari yang diperkirakan dan defisit 0.6 persen dari GDP di tahun 2010. Tingkat-tingkat hutang publik terus turun, sedikit di bawah 30 persen dari GDP di akhir tahun 2009. Badan pemeringkat internasional mengakui keperkasaan ekonomi Indonesia dan kekuatan manajamen keuangan publiknya, sehingga menaikan peringkat-peringkat mereka terhadap hutang pemerintah Indonesia di tahun 2009 dan 2010, pada satu kasus menjadi sedikit di bawah tingkat investasi/investment grade (dengan Moody menempatkan peringkat Indonesia pada status upgrade watch/dipantau di tingkat investment grade). Ekonomi Indonesia yang relatif kuat telah menarik banyaknya gelombang arus masuk portofolio yang mudah menguap, yang menantang para pembuat kebijakan ekonomi mikro.

Pandangan ke depan adalah agar momentum ekomomi Indonesia terus berkembang, dengan pertumbuhan yang terus meningkat menjadi 6,2 persen di tahun 2011 dan dengan cakupan pertumbuhan rata-rata 7 persen sebelum pertengahan dekade meskipun terdapat outlook global yang lebih lemah. Tingkat-tingkat pertumbuhan ini menunjukkan kemajuan yang terus berlangsung dalam penurunan kemiskinan, walaupun hal ini bisa melambat atau bahkan terbalik jika loncatan harga-harga pangan di tahun 2010 kembali mengarah kepada tingkat inflasi dekade sebelumnya. Dalam periode 2010-14, belanja anggaran diharapkan meningkat lebih dari 30 persen secara nyata dibandingkan dengan periode 2005-09 (sekitar US$500 milyar pada harga tahun 2008) yang menciptakan kesempatan-kesempatan yang signifikan untuk memperbaiki layanan-layanan publik. Untuk mengambil kesempatan-kesempatan ini, Indonesia memerlukan lembaga-lembaga yang lebih efektif dan akuntabel yang dapat menerjemahkan sumber-sumber daya yang ada ke dalam hasil-hasil pembangunan yang lebih baik. Sebagai contoh, secara khusus hal ini penting karena Indonesia berangkat dari generasi kedua periode reformasi untuk menyediakan layanan-layanan yang lebih canggih di bidang infrastruktur, pendidikan yang lebih baik, dan sistem kesehatan yang berkesinambungan. Tapi proyeksi tingkat-tingkat pertumbuhan yang meningkat ini dan memperbaiki hasil-hasil sosial baru bisa terjadi jika pemerintah beregerak maju secara agresif dalam agenda ini.

Keadaan Ekonomi Indonesia

Ekonomi Indonesia terus mengukuhan pemulihannya dari krisis ekonomi dan keuangan global di paruh pertama tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi tumbuh menjadi 5,8 persen sepanjang tahun sampai bulan September 2010. Pertumbuhan melemah di kwartal tahun 2010, namun Indonesia tetap menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat dalam kelompok negara G20. Pertumbuhan di tiga kwartal pertama 2010 didukung oleh permintaan sektor yang sangat besar, dengan percepatan investasi di kwartal terakhir. Ekomomi domestik terus tumbuh melampaui pertumbuhan di luar negeri sehingga meredam kontribusi dari sektor eksternal. Pertumbuhan di antara mitra perdagangan utama Indonesia juga telah mulai menguat menyusul peningkatan yang mapan di paruh kedua tahun 2009. Secara domestik, kepercayaan konsumen yang solid, inflasi sedang untuk sebagian paruh pertama tahun tersebut dan kondisi yang menguntungkan di pasar keuangan mendukung permintaan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah digerakkan oleh permintaan swasta. Di tiga kwartal pertama tahun 2010, konsumsi swasta didukung oleh kepercayaan konsumen yang tinggi dan inflasi yang relatif rendah dan stabil untuk di bagian terbesar paruh pertama tahun itu. Investasi swasta di tahun 2010 juga telah mulai pulih. Perumbuhan ekspor juga telah pulih, setelah secara relatif lemah sampai pertengahan 2010. Konsumsi pemerintah pulih agak di kwartal ketiga tahun 2010, setelah pertumbuhannya menyusut di paruh pertama tahun 2010 sebagai akibat pencairan yang lambat dan stimulus fiskal yang membaik. Di sisi produksi, sektor tersier yang terfokus secara domestik (komunikasi, transportasi) memberi sumbangan yang berarti terhadap pertumbuhan, dan laporan-laporan anekdotal menunjukkan bahwa beberapa subsektor telah mampu mengatasi hambatan-hambatan kapasitas sebelum pertengahan 2010. Manufaktur tumbuh cepat di akhir tahun 2009 dan 2010, walaupun terus ketinggalan dibandingkan ekonomi lainnya. Output pertanian, untuk sebagian besar tahun 2010, menghasilkan sedikit sumbangan pada pertumbuhan.

Neraca perdagangan membaik di akhir tahun 2010, yang pada intinya merupakan cerminan harga-harga komoditas dan ekspor-ekspor pertanian yang kuat. Neraca perdangan pulih di akhir tahun 2010, yang pada intinya merupakan cerminan harga-harga komoditas yang kuat. Akan tetapi, menurut hitungan tahunan surplus-surplus perdagangan terus menurun karena impor tumbuh dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Di sisi impor, barang-barang modal dan menengah terus menjadi penggerak utama pertumbuhan. Neraca rekening koran mencapai

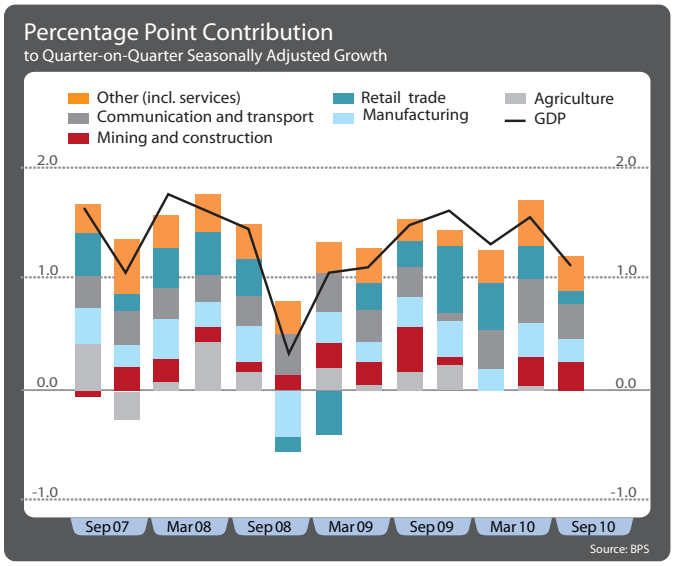

Gambar 1:

Pertumbuhan GDP melambat di Q3 2010 karena sumbangan pertanian terhadap pertumbuhan sudah diredam (sumbangan poin prosentase terhadap pertumbuhan kwartal ke kwartal yang disesuaikan secara musiman)

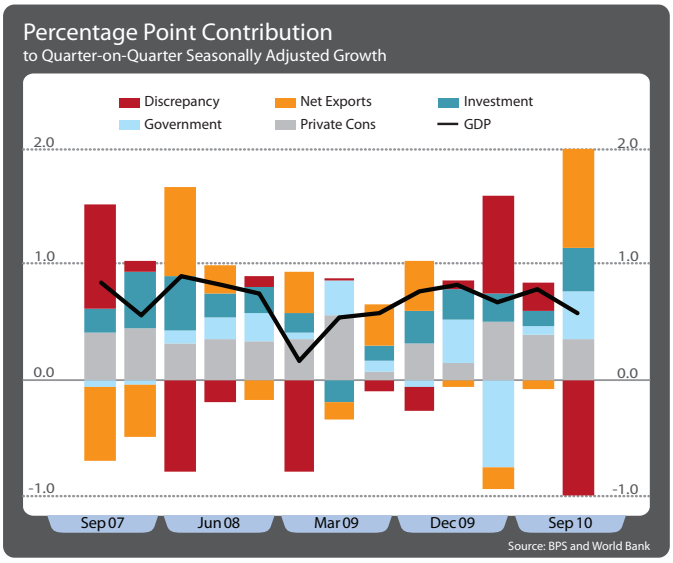

Gambar 2: Sumbangan konsumsi swasta terhadap pertumbuhan yang diperlunak di Q3 namun investasi ditingkatkan (sumbangan poin prosentase terhadap pertumbuhan kwartal ke kwartal yang disesuaikan secara musiman)

US$2,1 miliar di kwartal ketiga tahun itu. Surplus neraca pembayaran keseluruhan untuk tiga kwartal pertama tahun 2010 melampaui arus masuk tahunan tertinggi yang tercatat sebelumnya (US$19 miliar dibandingkan dengan US$14,5 miliar pada tahun 2006).

Setelah merosot dengan cepat selama puncak krisis keuangan global di akhir tahun 2008, pasar-pasar keuangan Indonesia pulih dan menunjukkan kinerja luar biasa sejak Maret 2009, selain koreksi singkat yang dikarenakan penghindaran risiko global yang diperbaharui di bulan Mei 2010. Untuk tahun 2010 secara keseluruhan rupiah terapresiasi sedikit (sekitar 4 persen), lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara lain di kawasan ini. Pasar hutang pemerintah telah mengikuti pola yang serupa, melemah secara drastis di akhir tahun 2008 dan di awal 2009 sebelum kemudian pulih ke tingkat terkuat dalam di tahun 2010. Opsi hutang US$ pemerintah Indonesia turun di bawah rata-rata negara berkembang di dunia untuk pertama kali selama hampir lima tahun di pertengahan tahun 2009. Sementara itu, hasil-hasil 5 obligasi rupah tercatat di rekor terendah sebelum awal tahun 2010, walaupun masih beberapa poin prosentase di atas hasil-hasil pada obligasi hutang mata uang negara ASEAN lainnya. Arus besar modal cair asing ke dalam aset-aset keuangan Indonesia telah mendorong sebagian besar penguatan ini. Arus portofolio bertanggung jawab atas arus masuk bersih terbesar, dan di antara arus-arus masuk tersebut adalah pembelian-pembelian sekuritas pemerintah jangka panjang (US$5,9 miliar dari total US$12,4 miliar arus masuk portofolio bersih di tiga kwartal pertama tahun 2010).

Cadangan-cadangan devisa lebih banyak yang dihemat dari krisis tersebut, sehingga Bank Indonesia mampu memperbesar surplus neraca-neraca pembayaran dan bekerja memperlambat dan memuluskan apresiasi rupiah. Surplus neraca-neraca pembayaran, yang mencerminkan surplus giro dan arus masuk portofolio yang signifikan, menyaksikan cadangan-cadangan devisa Indonesia naik menjadi US$96 miliar di akhir 2010, senilai US$36 miliar di atas puncak krisis di Juli 2008.

Selain faktor-faktor ini, pemulihan pada investasi langsung asing telah mendukung surplus neraca pembayaran. Program percepatan konstruksi pembangkit listrik pemerintah telah menarik investasi tambahan ini. Investasi bersih langsung asing sebesar US$6,8 miliar masuk ke Indonesia di tiga kwartal pertama tahun 2010. Dengan arus-arus masuk portofolio dan surplus-surplus giro yang sedang berlangsung, hal ini mengangkat surplus neraca pembayaran menjadi US$19 miliar di tiga kwartal pertama tahun 2010, di atas total US$12,5 miliar untuk tahun 2009.

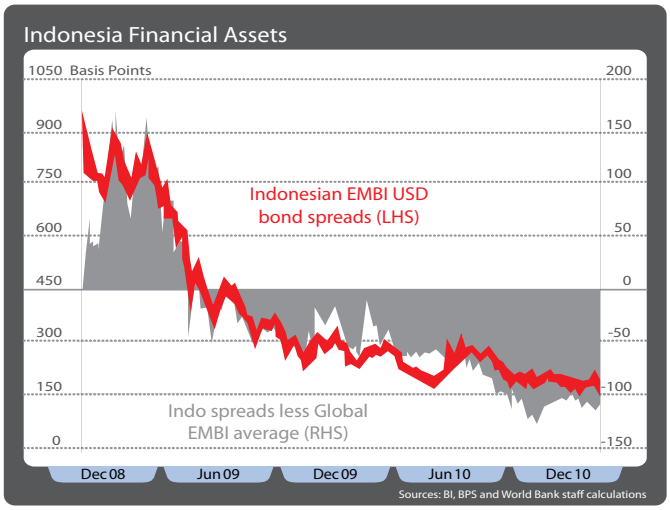

Gambar 3:

Persepsi-persepsi pasar keuangan aset-aset keuangan Indonesia telah menguat sejak awal 2009 (poin basis)

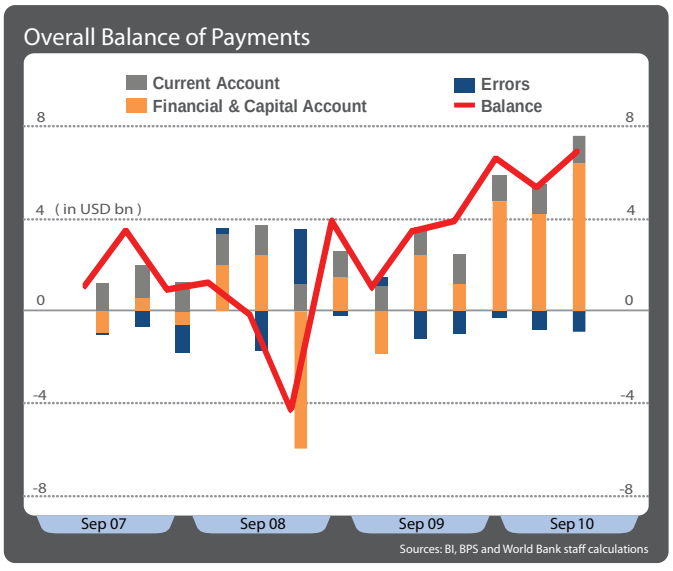

Gambar 4:

Setelah defisit singkat selama krisis keuangan global, neraca-neraca pembayaran global kembali surplus, yang didukung oleh arus-arus masuk portofolio yang berarti (miliar USD)

BI telah mengambil sikap kebijakan moneter sejak Bank Indonesia melunakkan siklus di akhir 2009, dan dengan memperbaiki kondisi-kondisi dan kepercayaan pinjaman, ekonomi telah melaju dengan cepat. Bank Indonesia memotong kebijakan tingkat bunganya 300 poin dari Desember 2008 sampai Agustus 2009, dan menahannya di tingkat tersebut di bulan Desember 2010, mengandalkan tingkat nilai tukar yang terapresiasi secara bertahap untuk mengurangi tekanan-tekanan dan penyesuaian-penyesuaian inflasi pada persyaratan-persyaratan rasio devisa untuk mendorong pinjaman. Bank komersial menurunkan tingkat bunga pinjamannya di bawah tingkat kebijakan, dengan rata-rata pinjaman tetap di atas 14 persen di pertengahan 2010 namun memotong tingkat deposito secara lebih agresif, yang menciptakan selisih-selisih bunga yang terbesar di kawasan ini. Namun hal ini tidak mencerminkan kelemahan di sektor perbankan. Indikator neraca keuangan sektor perbankan, seperti rasio kecukupan modal, rasio pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman terhadap simpanan, secara relatif masih tetap kuat. Pertumbuhan kredit naik menjadi 21 persen dari tahun ke tahun di bulan September, seiring pinjaman-pinjaman modal kerja kembali melambung. Pinjaman-pinjaman konsumsi, yang merupakan sepertiga dari dari pinjaman total, tumbuh di tingkat 25 persen. Persetujuan-persetujuan pinjaman (meskipun dilaporkan terdapat adanya ketertinggalan) juga naik. Dalam hal biaya kredit, tingkat pinjaman nominal telah menurun (turun 200 poin basis menjadi 13,4 persen di bulan September). Hal ini menyusul turunnya hasil-hasil obligasi pemerintah.

Inflasi, setelah melambat sampai ketitik terendah sepanjang dekade di tahun 2009, mulai melaju seiring harga-harga konsumsi terkena dampak kejutan-kejutan persediaan pangan yang negatif. Lonjakan-lonjakan melaju dengan tajam di bulan Juni dan Juli 2001 dikarenakan musim 'kemarau' basah yang tidak biasa yang pertama-tama berdampak pada harga-harga rempah dan kemudian pada harga-harga beras. Kenaikan-kenaikan inflasi mencapai 7 persen tahun ke tahun di bulan Desember 2010, di luar rentang target BI, sekali lagi sebagai akibat gangguan-gangguan sampingan persediaan yang signifikan pada item-item utama pangan seperti beras dan rempah-rempah. Tekanan-tekanan yang naik pada item-item pangan ini mungkin terus berlanjut setidaknya sampai musim panen di akhir kwartal tersebut. Seiring kenaikan-kenaikan harga-harga pangan mulai masuk ke dalam inflasi inti dan harapan-harapan inflasi, kebijakan pengetatan moneter mungkin diperlukan. Lonjakan-lonjakan di antara inflasi keranjang kemiskinan Bank Dunia, yang menempatkan beban pada item-item pangan tersebut, dan CPI (Consumer Price Index/ Indeks Harga Pangan) keseluruhan telah naik di tingkat

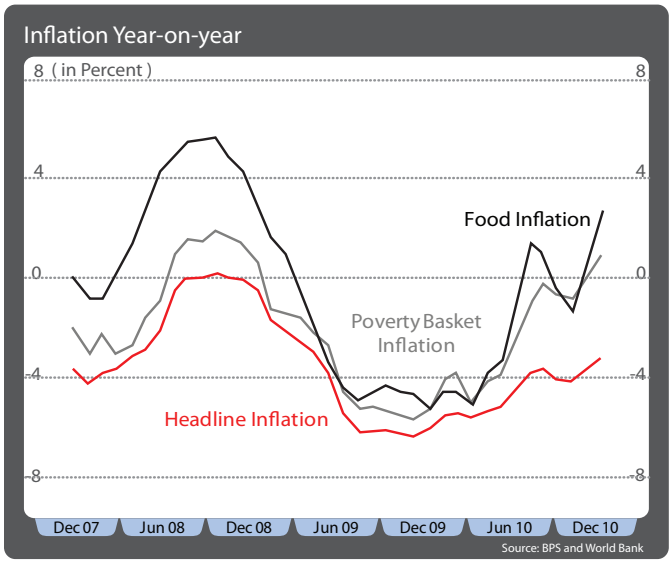

Gambar 5:

Kurva antara lonjakan inflasi dan inflasi keranjang kemiskinan terus naik (inflasi tahun ke tahun)

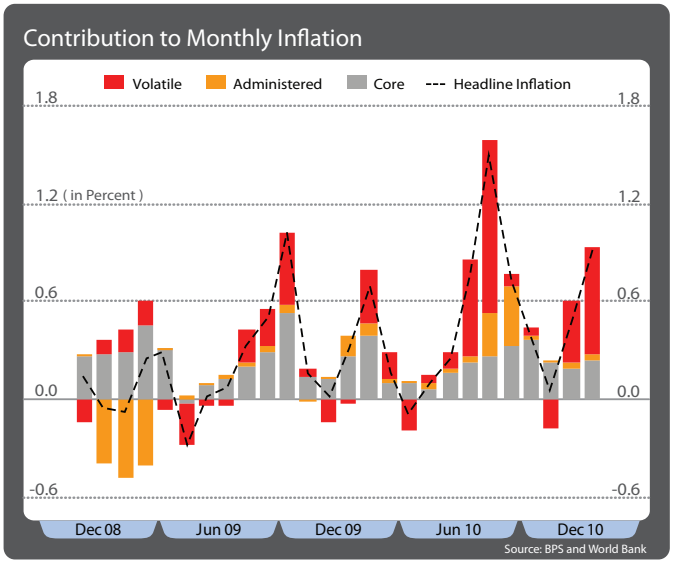

Gambar 6:

Lonjakan akhir-akhir ini pada inflasi bulanan bersifat sementara dan berhubungan dengan kejutan iklim (sumbangan pada inflasi bulanan)

tertinggi sejak indeks-indeks mulai bergerak di tahun 2001. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa kenaikan-kenaikan harga saat ini secara khusus mempengaruhi para miskin, dan kenyataan ini dapat tercermin pada kenaikan angka-angka kemiskinan di tahun 2011.

Defisit anggaran pemerintah tahun 2010 lebih rendah dari yang diperkirakan, di 0,6 persen dari GDP, menurut angka-angka awal Kementerian Kuangan yang tidak diaudit. Defisit anggaran secara signifikan lebih rendah dari proyeksi defisit anggaran yang direvisi di 2,1 persen dari GDP, yang sekali lagi mencerminkan kesulitan Pemerintah dalam mencairkan anggaran ini secara efektif, khususnya belanja-belanja modal. Realisasi pendapatan lebih kuat daripada yang diproyeksikan (102 persen dari proyeksi pendapatan-pendapatan pajak dan non-pajak) dan realisasi belanja pada posisi yang mengecewakan di 93 persen, agak membalikkan kecendrungan yang membaik pada realisasi anggaran dari tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan-pendapatan tahun 2009 2,5 persen lebih lemah dari tahun 2008, sebuah campuran potongan-potongan pajak, pertumbuhan nominal GDP yang lebih lambat dan impor dan ekspor yang lebih rendah dan belanja mencapai 95 persen dari keseluruhan anggaran. Reformasi-reformasi pada siklus anggaran (e.g. memperbaiki proses-proses pengadaan, dan cakupan yang baru untuk pengalihan anggaran) menyumbang pada realisasi anggaran yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menyetujui serangkaian langkah di bulan Agustus 2010 (peraturan pengadaan baru dan panduan-panduan yang baru dan lebih fleksibel mengenai tata-tata laksana pengiriman dan penunjukan otoritas keuangan) untuk mempercepat pencairan anggaran, namun dampaknya mungkin baru lebih nampak di tahun 2011.

Pemerintah Indonesia telah memulai pelaksanaan pembaharuan untuk memperbaiki target subsidi energi. Pemerintah menaikan tarif listrik per tanggal 1 Juli 2010 untuk sebagian besar kategori konsumsi yang diharapkan mampu menurunkan subsidi listrik, dengan syarat bahwa biaya-biaya persediaan listrik tidak naik pada angka yang lebih besar. Selain itu, kenaikan-kenaikan tahun 2010 diberlakukan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga subsidi tersebut akan membaik, seiring kenaikan tarif di berlakukan terhadap seluruh kategori konsumsi kecuali untuk konsumen-konsumen yang lebih miskin dengan 900 VA dan di bawah garis kemiskinan yang tidak akan melihat perubahan pada tagihan-tagihan mereka. Kenaikan juga diikuti oleh sebuah upaya untuk menyederhanakan serangkaian mekanisme-mekanisme tarif khusus yang rumit dengan tujuan untuk menyediakan pemberian harga yang seragam kepada para pelanggan di katogori voltase yang sama. Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengecualikan seluruh kendaraan roda empat swasta dari membeli BBM bersubsidi, mulai pertengahan tahun 2011 dan di wilayah Jakarta, yang secara bertahap memperluas reformasi ini ke seluruh Indonesia di beberapa tahun ke depan. Secara prinsip DPR telah menyetujui rencana tersebut namun masih harus menyelesaikan rinciannya.

Pandangan ke Depan Ekonomi Indonesia

Pandangan ke depan ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan ketidakpastian utama pada potensi Indonesia untuk menaikan tingkat-tingkat pertumbuhan menjadi atau di atas 7 persen sebelum pertengahan dekade. Ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh menjadi 5,9 persen pada tahun 2010 dan meningkat menjadi sekitar 6,2 persen di tahun 2011. Pertumbuhan akan didukung oleh meningkatnya permintaan dalam negeri yang mendukung stabilisasi ataupun penurunan ekspor bersih. Konsumsi swasta diharapkan melaju secara bertahap, tumbuh di sekitar 5,0 persen di tahun 2010 dan 5,1 persen di tahun 2011. Sektor-sektor yang terpusat pada permintaan dalam negeri (transportasi, komunikasi, berbagai layanan konsumsi dan usaha) mungkin terus menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada yang sektor-sektor yang berorientasi eksternal (manufaktur dan yang terkait sumber daya), walaupun yang terakhir ini menawarkan ruang lingkup yang lebih besar terhadap kejutan upside seiring membaiknya iklim investasi. Setelah berkinerja kuat di tahun 2009, konsumsi pemerintah mungkin tumbuh lebih lambat daripada ekonomi secara keseluruhan di tahun 2010 sebelum membaik di tahun 2011, walaupun program inti dan pembangunan pemerintah berkemungkinan akan meningkatkan pembelanjaan secara keseluruhan.

Tingkat pertumbuhan investasi Indonesia yang naik, permintaan dalam negeri yang besar dan perbaikan-perbaikan iklim investasi termasuk lewat proyek-proyek infrastruktur diproyeksikan mendorong pertumbuhan yang lebih cepat yang berhadapan dengan outlook eksternal yang mungkin lebih lemah dan tidak pasti. Pertumbuhan perdagangan diharapkan tetap berbasis luas. Impor diharapkan pulih lebih cepat daripada ekspor, seiring ekonomi dalam negeri tumbuh lebih cepat dari pada tujuan-tujuan ekspor Indonesia; dan produksi untuk mencapai pemulihan ekspor non-komoditas yang sedang berlangsung menuntut lebih banyak input-input impor, yang mengarah pada menyempitnya surplus perdagangan. Digabungkan dengan melebarnya defisit pendapatan yang dikarenakan oleh tingginya repatriasi keuntungan oleh perusahaan-perusahaan minyak dan gas, surplus giro diharapkan mengecil di tahun 2010, sebelum bergerak

menjadi defisit di tahun 2011. Bagaimanapun juga, neraca-neraca pembayaran keseluruhan tetap berada pada rekor-rekor tertinggi di tahun 2010, seiring arus masuk langsung modal dan investasi portofolio yang kuat lebih daripada hasil mengecilnya surplus giro. Surplus ini diharapkan mengecil di tahun 2011 seiring giro berubah menjadi defisit, sementara arus masuk modal tetap kuat. Tingkat inflasi tahunan untuk tahun 2010 adalah 5,1 persen, dengan harga-harga melaju di paruh akhir tahun sebagaimana yang digarisbawahi di atas. Masuk ke tahun 2011, tingkat-tingkat inflasi mungkin terus naik menjadi 6,3 persen, mengingat pemulihan pada pinjaman dan percepatan baru dalam basis ekonomi yang dialami sejak akhir tahun 2009, dan kemungkinan peningkatan harga energi yang diatur (khususnya BBM eceran). Outlook jangka yang lebih panjang sangat tergantung pada pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, walaupun hal ini ditujukan untuk membatasi inflasi menjadi antara 4-6 persen dan memastikan bahwa penyesuaian-penyesuaian pada harga-harga pokok yang diatur (khususnya energi) tidak mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi secara terus menerus.

Sementara risiko-risiko jangka pendek pada outook tetap signifikan, adalah masih tidak pasti apakah Indonesia dapat mencapai kecepatan reformasi yang disyaratkan untuk mengangkat tingkat pertumbuhan rata-rata di atas 7 persen. Perkembangan-perkembangan selama tahun 2010 menggarisbawahi risiko-risiko jangka pendek pada outook ekonomi Indonesia yang dihadapkan oleh arus-arus modal yang gampang menguap dan pertumbuhan mitra dagang yang tidak pasti. Sebagai tambahan, perkembangan-perkembangan politik sejak akhir 2009, khususnya pada pemeriksaan DPR terhadap bailout Bank Century sejak akhir 2009 dan hasilnya, telah menimbulkan beberapa pertanyaan tentang waktu dan dalamnya reformasi-reformasi serta perbaikan-perbaikan di masa depan sebagai syarat untuk para investor dan perusahaan-perusahaan, dengan potensi risiko kerugian terhadap kondisi dan pertumbuhan investasi, walaupun belum jelas apakah perkembangan-perkembangan ini memiliki dampak yang berarti pada persepsi-persepsi investor pasara keuangan. Untuk waktu yang lebih lama, perkembangan ini menimbulkan pertanyaan apakah Pemerintah dapat mencapai agenda reformasi yang dijabarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (PRJMN 2010-2014) ke arah pencapaian pertumbuhan yang lebih kuat dan yang bersifat lebih inklusif.

Tabel 1: Pandangan ke depan ekonomi jangka menengah Indonesia

	2009	2010 (p)	2011 (p)	2012 (p)	2013 (p)	2014 (p)
Variabel-variabel pokok makro						
GDP Nyata (% perubahan)	4.5	5.9	6.2	6.2	6.5	6.5
Investasi Nyata (% perubahan)	3.3	8.6	10.0	8.3	10.0	10.2
Konsumsi Nyata (% perubahan)	6.2	4.4	5.6	5.2	6.0	5.8
Ekspor Nyata (% perubahan)	-9.7	12.6	10.6	9.8	10.3	10.4
Impor Nyata (% perubahan)	-15.0	13.4	10.3	10.3	10.3	9.8
Defisit (% dari GDP)	-1.6	-0.6[1]	-1.0	-1.3	-1.0	-0.8
Hutang Publik (% dari GDP)	28.3	25.9	24.1	22.6	20.9	19.4
Neraca giro (% dari GDP)	2.0	1.3	-0.3	1.4	1.3	1.3
Deflator GDP (% perubahan)2	8.4	7.4	10.0	10.0	9.0	8.0
Inflasi CPI (%)2	4.8	5.1	6.3	6.0	6.0	6.0

Catatan: 1 Angka awal Kementerian Perekonomian . 2 Periode rata-rata.
Sumber: BPS, Bank Indonesia, Kementrian Keuangan dan Data historis Bank Indonesia, Proyeksi-proyeksi staf Bank Dunia

Lampiran 10

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Pemerintah Indonesia menerbitkan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2010-14 di bulan Februari 2010. RPJMN tersebut, yang terdiri dari tiga buku, mewakili fase kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025), dan berpatokan pada visi, misi dan program pemerintah yang baru. Buku I menguraikan 11 prioritas-prioritas, kebijakan dan strategi umum pembangunan nasional dan kerangka kerja ekonomi makro dengan tema "mewujudkan Indonesia yang makmur, demokratis, dan adil". Buku II menguraikan prioritas dan rencana pembangunan sektoral dengan tema "memperkuat sinergi lintas sektor-sektor pembangunan" dengan maksud untuk mencapai visi Buku I dan menekankan pada rincian program sektoral dengan capaian dan hasil yang diharapkan, dan anggaran yang bersifat indikatif. Buku III menguraikan strategi pembanguan daerah berdasarkan pulau dengan tema "memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan antar-daerah" untuk mencapai visi pembangunan Buku I.

11 prioritas pembanguan nasional yang dinyatakan dalam Buku I adalah:

- Reformasi birokrasi dan tata kelola kepemerintahan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Penanggulangan Kemiskinan
- Ketahanan pangan
- Infrastruktur
- Iklim investasi dan usaha
- Energi
- Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana
- Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca –konflik dan
- Budaya, kreatifitas, dan inovasi teknologi.

RPJMN juga menekankan pada tiga prioritas nasional lain yang berhubungan dengan (i) politik, hukum, dan keamanan (ii) ekonomi; dan (iii) kesejahteraan rakyat. Prioritas sektoral dalam Buku II termasuk (i) sosial budaya dan agama; (ii) sektor-sektor ekonomi; (iii) ilmu pengetahuan dan teknologi; (iv) infrastruktur; (v) politik; (vi) pertahanan dan keamanan; (vii) hukum; (viii) daerah dan tata ruang; (ix) sumber daya alam dan lingkungan hidup. Buku III memasukkan prioritas daerah dan strategi pembangunan untuk setiap pulau: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Rencana ini menjabarkan keterkaitan di antara prioritas nasional dan sektoral dengan hasil sektoral di bidang-bidang seperti penurunan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan yang menyumbang secara langsung terhadap tujuan-tujuan nasional. Strategi daerah menggarisbawahi rencana untuk mendorong pembangunan seluruh pulau (tidak hanya pulau-pulau yang besar); hubungan dalam negeri lewat perbaikan perdagangan antar pulau; pembangunan daerah terdepan, terluar, pasca-konflik dan yang rentan terhadap bencana; ekonomi yang bersifat kelautan dan kepulauan, dan memperbaiki daya saing daerah.

RPJMN mempunyai sebuah target tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6,3-6,8 persen untuk periode 2010-14, yang mencapai 7 persen sebelum 2014. Strategi ini menekankan pada pertumbuhan yang berkeadilan dan serangkaian kebijakan lintas sektoral untuk memastikan bahwa pembangunan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Penekanan RPJMN adalah pada sebuah strategi yang pro-pertumbuhan, pro-lapangan pekerjaan dan berpihak rakyat miskin, dengan keterkaitan khusus untuk meningkatkan investasi-investasi di bidang infrastruktur dan memperkuat agenda berpihak rakyat miskin. RPJMN ini juga mempunyai target-target kuatitatif dan kualitatif untuk lapangan pekerjaan, kesehatan (harapan hidup diharapkan naik menjadi 72 tahun; angka kekurangan gizi turun menjadi di bawah 15 persen; tingkat kematian ibu turun dari 228 menjadi 118; dan kematian bayi dari 34 menjadi 24), indikator-indikator pendidikan (angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah secara berturut-turut mencapai 96% dan 76%), produksi tanaman pangan utama, tingkat-tingkat produksi ekonomi dan listrik, panjang jalan, dan juga pengukuran-pengukuran persepsi penduduk terhadap kualitas berbagai layanan publik.

Rencana dan strategi jangka menengah diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 14,15 persen pada tahun 2009 menjadi 8-10 persen pada tahun 2014. Koordinasi program sosial dan penanggulangan kemiskinan akan dipadukan untuk memperbaiki efektivitas program tersebut, cakupan program-program saat ini akan diperluas, dan infrastruktur daerah terpencil akan dibangun untuk mencapai target tersebut. Akses terhadap, dan mutu, pendidikan akan diperbaiki dengan menyediakan beasiswa untuk siswa miskin, melaksanakan kriteria kinerja guru, dan rasionalisasi rasio guru-murid untuk mencapai standar pendidikan nasional.

Agenda PRJMN yang dibayangkan ini merupakan sebuah gabungan program saat ini dan program baru dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk penurunan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan yang meneruskan

atau memperluas program-program pembangunan yang ada. Beberapa prioritas program yang baru termasuk pembangunan 19.000 km jalan raya di lima pulau-pulau terbesar, meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sampai 3.000 MW per tahun, membangun infrastruktur transportasi yang berbasis pada Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi, memperkenalkan nomor identitas diri tunggal yang diberlakukan di tahun 2011, menurunkan jumlah daerah-daerah tertinggal menjadi 50 kabupaten sebelum 2014, mengembangkan sistem logistik nasional, dan melaksanakan sebuah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPSIE)

Bidang utama keterlibatan CPS WBG lintas sektoral dan hasil-hasil yang terkait terus diselaraskan dengan prioritas-prioritas RPJMN yang baru. Dari 11 prioritas RPJMN, sembilan yang teratas yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi didukung sepenuhnya oleh program CPS melalui kegiatan-kegiatan pinjaman, non-pinjaman, Bantuan Teknis, dan yang bersifat nasihat, dan instrumen WBG termasuk transaksi IFC. Penyelarasan-penyelarasan di antara sasaran RPJMN dan pencapaian hasil CPS disajikan di bawah ini. Revisi matriks hasil-hasil (Lampiran 1) menjabarkan lebih jauh mengenai kegiatan-kegiatan WBG yang besifat invidual, serta instrumen-instrumen yang direncanakan.

Penyelarasan Prioritas-prioritas RPJMN dan Capaian CPS

Prioritas-prioritas RPJMN	Capaian-capaian CPS
Prioritas 1: Reformasi birokrasi dan tata kelola kepemerintahan	
• Konsolidasi struktural dan perbaikan kapasitas • Otonomi daerah • Sumber daya manusia/pengelolaan layanan sipil • Peraturan-peraturan: harmonisasi hukum-hukum antara pusat dan daerah • Data populasi: kartu identitas diri	• Perbaikan arahan-arahan hasil dalam proses anggaran • Perbaikan sistem-sistem dan proses-proses Pemda untuk perencanaan, alokasi sumber daya dan penyelenggaraan anggaran yang lebih baik • Perbaikan standar penyelenggaraan pelayanan di perkotaan dan daerah terpencil • Perbaikan administrasi perpajakan melalui akurasi pendaftaran audit-audit pembayar pajak; dan penurunan jumlah para penunggak pajak
Prioritas 2: Pendidikan	
• Memperbaiki NER (Angka Partisipasi Murni) untuk pendidikan dasar dari 95% (2009) menjadi 96% (2014) • Memperbaiki GER (Angka Partisipasi Kasar) untuk pendidikan lanjutandari 18% (2009) menjadi 25% (2014) • Memperbaiki pengajaran dengan menekankan pendidikan holistik • Memperbaiki pengelolaan sekolah dengan memberdayakan para kepala sekolah • Memperbaiki kurikulum untuk merespons pada kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan pasar • Memperbaiki kualitas para guru	• Peningkatan jumlah guru sekolah dasar yang memenuhi mandat kualifikasi akademis • Perbaikan efisiensi dan pemerataan dalam penggunaan sumber-sumber daya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar • Perbaikan pelatihan dan pendidikan tingkat lanjutan lewat akreditas kelembagaan; kajian-kajian pelacak umum • Perbaikan informasi dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan yang lebih baik
Prioritas 3: Kesehatan	
• Program kesehatan masyarakat • Keluarga berencana • Fasilitas-fasilitas kesehatan: rumah-rumah sakit berkualitas terakreditasi di 3 kota (2012) dan 5 kota (2014) • Obat: pelaksanaan senarai nasional obat-obat pokok • Asuransi kesehatan nasional	• Perbaikan standar penyelenggaraan layanan baik di daerah perkotaan maupun di daerah terpencil • Belanja dibuat lebih berpihak pada rakyat miskin dengan mengalokasikan kembali subsidi-subsidi ke arah target dukungan strategis dan bantuan tunai bersyarat (CCT)
Prioritas 4: Penghapusan Kemiskinan	
• Bantuan sosial terintegrasi: bantuan langsung tunai (BLT), pendidikan anak usia dini (PAUD), dan program Program Keluarga Harapan (PKH) • PNPM Mandiri: aggaran tambahan, BLM, untuk menjangkau 30% kabupaten-kabupaten termiskin di daerah terpencil • Tersedianya Kredit Usaha Rakyat (KUR) • Revitalisasi Komisi Nasional untuk Penghapusan Kemiskinan	• Perbaikan kondisi sosial ekonomi dan pemerintahan daerah perkotaan dan daerah terpencil yang miskin melalui cakupan yang lebih luas program-program penurunan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat • Belanja dibuat lebih berpihak rakyat miskin dengan mengalokasikan subsidi-subsidi ke arah target dukungan strategis dan bantuan tunai bersyarat (CCT)

Prioritas-prioritas RPJMN	Capaian-capaian CPS
Prioritas 5: Ketahanan pangan	
• IMemperbaiki hak-hak hukum atas tanah • Membangun 2 juta hektar lahan pertanian baru • Infrastruktur untuk pertanian (transportasi, irigasi, listrik) • Riset dan pengembangan pertanian • Investasi, pembiayaan, dan subsidi dalam produksi pangan dan pertanian • Memperbaiki gizi • Adaptasi perubahan iklim	• Pengeluaran-pengeluaran publik dibuat lebih berpihak pada rakyat miskin • Belanja pemerintah nasional dan sub-nasional yang lebih banyak dan berkualitas di infrastruktur lewat perbaikan-perbaikan dalam kebijakan subsidi, kerangka kerja insentif, dan perencanaan dan penganggaran
Prioritas 6: Infrastruktur	
• Pengelolaan tata ruang terintegrasi • Jalan: Menyelesaikan pembangunan jalan raya (19.370 km di tahun 2014) • Transportasi: Ketentuan transportasi antar-moda dan antar-pulau • Perumahan publik: pembangunan 685.000 unit rumah murah bersubsidi • Pengendalian banjir: Kanal Banjir Timur (Jakarta) sebelum 2012 • Telekomunikasi: Menyelesaikan jaringan serat optik di Indonesia timur sebelum 2013 • Memperbaiki transportasi perkotaan; Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan termasuk MRT dan monorel di Jakarta sebelum 2014	• Belanja pemerintah nasional dan sub nasional yang lebih banyak di infratruktur lewat perbaikan-perbaikan di kebijakan subsidi, kerangka kerja insentif, dan perencanaan dan penganggaran • Peningkatan investasi swasa pada infrastruktur lewaet kerangka kerja Kerja Sama Pemerintah-Swasta (PPP) yang secara fiskal masuk akal, bisa dipercaya dan transparan
Prioritas 7: Iklim investasi dan usaha	
• Memperjelas kerangka kerja hukum dan harmonisasi undang-undang • Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPSIE), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penurunan biaya (TDP, SIUP) • Memperbaiki logistik untuk arus barang dan menurunkan biaya-biaya transaksi • National Single Window untuk impor (sebelum 2010) dan ekspor • Melaksanakan fase pertama CATS (sistem bea cukai) • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi selama PPP (Kemitraan Pemerintah-Swasta/Public Private Partnership) • Kebijakan ketenagakerjaan	• Penguatan sektor swasta lewat: kerangka-kerangka kerja peraturan yang lebih baik, perbaikan iklim investasi, lembaga-lembaga keuangan yang lebih kuat, perbaikan akses pasar, hubungan-hubungan dan kemitraan-kemitraan usaha. • Perbaikan kapasitas pemerintah sub-nasional tertentu untuk mendukung pelaksanaan usaha • Perbaikan iklim perundangan dan koordinasi antar lembaga dalam pengembangan kebijakan-kebijakan investasi • Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Perdagangan untuk kebijakan-kebijakan perdagangan yang lebih efektif
Prioritas 8: Energi	
• Kebijakan energi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Restrukturiasasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai dari PLN dan Pertamina sebelum 2010 • Penggunaan yang lebih besar sumber-sumber energi alternatif terbarukan (geothermal 2,000 MW di tahun 2012 dan 5,000 MW sebelum 2014) • Memperluas peralihan penggunaan minyak tanah ke gas (42 juta rumah tangga sebelum 2010)	• Perbaikan kuantitas dan efisiensi belanja pemerintah tingkat nasional dan sub-nasional pada infratruktur lewat perbaikan-perbaikan kebijakan subsidi, kerangka-kerangka kerja insentif, dan perencanaan dan penganggaran pengeluaran. • Peningkatan investasi swasta di infrastruktur lewat pembentukan sebuah kerangka kerja Kerjasama Pemerintah Swasta (PPP) yang secara fiskal masuk akal, bisa dipercaya dan transparan. •
Prioritas 9: Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana	
• Perubahan iklim: pengelolaan lahan gambut, rehabilitasi lahan (500.000 ha/tahun), mencegah percepatan penggundulan hutan • Mengurangi polusi lingkungan: limbah dan emisi air (680 kegiatan-kegiatan layanan dan industri sebelum 2010) • Penurunan titik-titik api kebakaran hutan (20% per tahun) • Adanya sistem peringatan dini tsunami sebelum tahun 2010 • Perbaikan kapasitas untuk penanganan bencana	• Pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan rintisan-rintisan untuk menurunkan emisi dari penggundulan hutan dan kerusakan lingkungan hidup • Penguatan penurunan risiko bencana dalam perencanaan dan administrasi pembangunan.

Lampiran 11

Indonesia – Pengembangan Peranandalam Pertukaran Antar Negara Berkembang (*South-South Knowledge Exchange*)

Indonesia telah mengemban peran yang semakin berkembang dalam mempromosikan South-South Cooperation melalui pertukaran pengetahuan antara rekan (*peer-to-peer*). Selama masa kepresidenan Korea dalam G20 pada tahun 2010, Indonesia memainkan peran utama dalam memastikan pentertaan "berbagi pengetahuan" (*knowledge sharing*) sebagai salah satu dari kesembilan pilar dalam Konsensus Pembangunan (*Development Consensus*) G20. Mendekati penyelenggaraan Summit di Seoul pada bulan Oktober 2010, Indonesia ditunjuk sebagai coordinator tema Knowledge Sharing dan Pemerintah telah mengutarakan keinginan yang kuat untuk memajukan implementasi mandate G20 yang terkait selama masa kepresidenan Perancis pada tahun 2011. Permintaan dari mandat G20 adalah bagi *Task Team for South-South Cooperation* (TT-SSC) internasional dalam kolaborasi dengan UNDP untuk menyusun rekomendasi tentang bagaimana kegiatan Berbagi Pengetahuan dapat ditingkatkan skalanya termasuk melalui *South-South* dan *Triangular Cooperation*.

Pada musim gugur tahun 2010, Indonesia diminta oleh Kolombia untuk bergabung sebagai ketua-gabungan (*co-chair*) untuk *Task Team for South-South Cooperation* yang dibentuk di bawah wewenang DAC-OECD setelah diselenggarakannya *High Level Forum III on Aid Effectiveness* di Accra pada tahun 2008. Hasil kerja Task Team diharapkan akan sangat berperan dalam *High-Level Forum IV* mendatang di Busan, Korea, 2011. Bagian dari bukti yang akan digunakan oleh TT-SSC berdasarkan pada pengalaman South-South Indonesia yang kaya. Menjelang Forum Busan, Indonesia secara bersama menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah bagi acara internasional tentang *Triangular Cooperation* pada bulan Februari-Maret 2011. Bappenas merupakan rekan utama (*counterpart*) untuk agenda *South-South* dalam pemerintah Indonesia.

Kepemimpinan Indonesia dalam arena pertukaran pengetahuan South-South yang berkembang selanjutnya didemonstrasikan dengan perannya yang kuat sebagai penyedia dan penerima pengetahuan pembangunan yang memberikan informasi tata cara (*"how-to"*) yang seringkali dalam kolaborasi dengan donor atau negara mitra. Indonesia telah berbagi keahliannya dalam bidang, antara lain, pertanian, mikro-keuangan, penanganan bencana dan pembangunan berbasis masyarakat dengan negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin dan Karibia. Lembaga-lembaga Indonesia telah menerima pengetahuan melalui pertukaran *peer-to-peer* dalam bidang pertanian, pembangunan perkotaan dan bidang kunci lainnya. Selain itu, Pemerintah telah mengambil bagian dalam beragam prakarsa pembelajaran multidireksi termasuk dialog regional tentang efektivitas bantuan dan kerjasama segitiga dengan negara ASEAN. JICA telah menjadi mitra utama dalam mendana dan mendukung agenda South-South Indonesia.

Indonesia telah meningkatkan skala kemitraannya dengan Bank Dunia dalam rangka mendukung partisipasi dan kepemimpinan Indonesia dalam kegiatan *South-South*. Selama setahun belakangan ini, beberapa pertukaran dengan Indonesia sebagai penyedia dan penerima pengetahuan telah didanai oleh *South-South Experience Exchange Trust Fund (SEETF)* Bank Dunia dan *the Knowledge and Learning Council Fund*, selain kegiatan pembelajaran *peer-to-peer* yang didanai melalui pinjaman Bank, anggaran Bank dan *trust funds. The Country Team* telah mendukung pertukaran pengetahuan termasuk dengan berpartisipasi dalam acara pembelajaran dan *Country Office* telah menjadi tuan rumah bagi delegasi yang berkunjung dan kegiatan dukungan. Beberapa kegiatan baru-baru ini dan yang masih berlangsung dalam South-South Exchanges dan *Learning Events* yang didukung oleh bank Dunia adalah sebagai berikut:

Indonesia sebagai Penyedia Pengetahuan

- *Understanding Experiences in Post-Conflict States*/ Memahami Pengalaman di Negara Pasca Konflik (SEETF, selesai): Indonesia, Rwanda dan Afrika Selatan berbagi keahlian dengan Nepal tentang meningkatkan otonomi pemerintah dalam situasi pasca konflik.
- *Bolivia Conditional Cash Transfer Program*/ Bantuan Dana Tunai Bersyarat Bolivia (SEETF, selesai): Indonesia merupakan satu dari empat negara yang berbagi keahlian dengan Pemerintah Bolivia tentang bagaimana mengembangkan program CCT yang berhasil.
- *Haiti Housing Reconstruction Exchange*/Pertukaran Rekonstruksi Perumahan Haiti (SEETF, selesai): Indonesia bersama dengan India dan Pakistan berbagi keahlian dengan Haiti setelah gempa bumi yang dialaminya pada bulan April 2010.
- *India-Pakistan Knowledge Exchange Program*/Program Pertukaran India-Pakistan (di bawah *the Punjab Education Sector Project*): Pinjaman WB ini mendukung studi tur ke Indonesia sehingga pejabat pendidikan Pakistan dapat mempelajari pendekatan untuk melakukan desentralisasi layanan pendidikan dan membangun peran serta masyarakat.

Indonesia sebagai Penerima Pengetahuan

- Belajar dari India tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (information and communications technology - ICT) yang inovatif dalam pertanian (Pemenang kompetisi *South-South knowledge exchange World Bank Institute*): untuk mendukung pembangunan kapasitas sebagai bagian dari *Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information Project*/Proyek Pemberdayaan Petani melalui Teknologi Pertanian dan Informasi yang didanai oleh Bank Dunia. Tim Bank Dunia menyelenggarakan studi tur untuk Pejabat dari Kementerian Pertanian Indonesia untuk belajar dari rekannya di India tentang potensi penggunaan ICT dalam bidang pertanian.
- Belajar dari India tentang transformasi perkotaan (Pemenang kompetisi *South-South knowledge exchange World Bank Institute*): sehubungan dengan analisa yang terus berlangsung tentang urbanisasi dan pemerintah setempat dan penilaian manajemen fiscal di Surabaya, tim Bank Dunia mendampingi pejabat dari Surabaya untuk mengunjungi Ahmedabad, India untuk belajar dari rekannya tentang bagaimana mereka telah megkatalisasi transformasi perkotaan dengan fokus pada manajemen perkotaan, perencanaan investasi dan pengambilan keputusan yang efektif.

Tim dari World Bank menyertai pejabat publik dari Surabaya mengunjungi Ahmedabad India untuk mempelajari bagaimana kolega mereka mengkatalisasi transformasi perkotaan

Annex A2

Country-at-a-Glance: INDONESIA

Prices and Government Finance	1988	1998	2007	2008
Domestic prices				
(%change)	8.5	58.5	6.4	9.8
Consumer prices	12.7	75.3	11.3	18.3
Implicit GDP deflator				
Government finance				
(% of GDP, includes current grants)				
Current revenue	-	-	17.9	19.4
Current budget balance	-	-	6.8	6.1
Overall surplus/deficit	-	-	-1.	-0.8

Note: This table was produced from the Development Economics LDB database. 12/9/09.

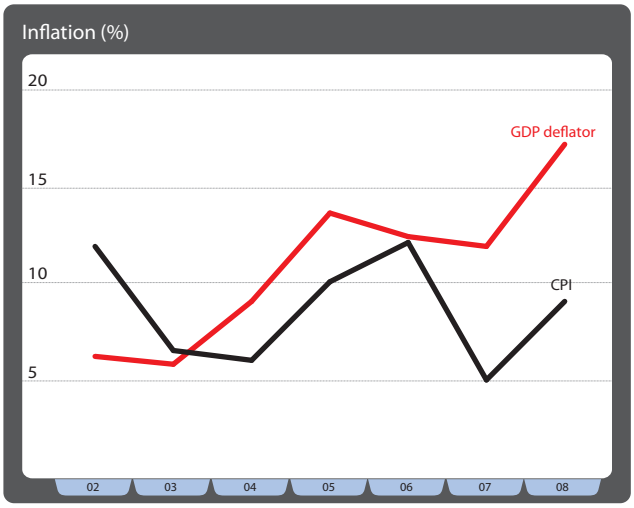

External Debt and Resource Flows	1988	1998	2007	2008
(US$ millions)				
Total debt outstanding and disbursed	54,078	151,484	142,638	150,851
IBRD	8,003	10,692	6,821	6,968
IDA	861	694	1,550	2,006
Total debt service	8,642	18,314	22,805	22,150
IBRD	1,063	1,456	1,803	1,622
IDA	13	26	38	40
Composition of net resource flows				
Official grants	201	279	991	837
Official creditors	2,876	2,754	-1,849	-1,119
Private creditors	63	-3,281	2,558	7,092
Foreign direct investment (net inflows)	576	-241	6,928	8,698
Portfolio equity (net inflows)	0	-4,371	3,559	322
World Bank Program				
Commitments	1,067	1,672	1,383	2,159
Disbursements	1,649	1,212	986	1,892
Principals repayments	435	754	1,396	1,279
Net flows	1,214	458	-409	613
Interest payments	641	728	445	383
Net transfer	574	-270	-855	230

Note: This table was produced from the Development Economics LDB database. 12/9/09.

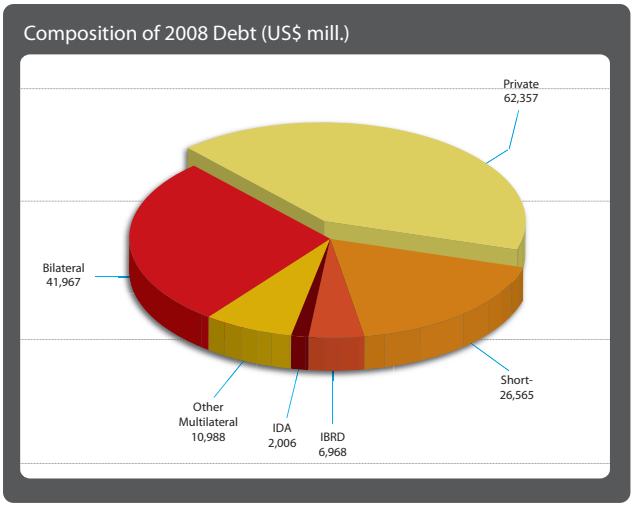

Trade

	1988	1998	2007	2008
(US$ millions)				
Total exports (fob)	19,335	48,848	118,015	139,605
Fuel	7,696	8,079	22,518	29,329
Estate crop	2,070	3,974	6,329	8,467
Manufactures	5,693	20,088	46,140	50,588
Total imports (cif)	15,279	35,286	94,187	128,907
Food	642	2,612	6,884	7,927
Fuel and energy	959	2,686	21,994	38,038
Capital goods	5,096	9,932	19,038	42,397
Export price index (2000= 100)	32	76	133	146
Import price index (2000= 100)	126	107	206	263
Terms of trade (2000= 100)	25	71	65	56

Note: This table was produced from the Development Economics LDB database. 12/9/09.

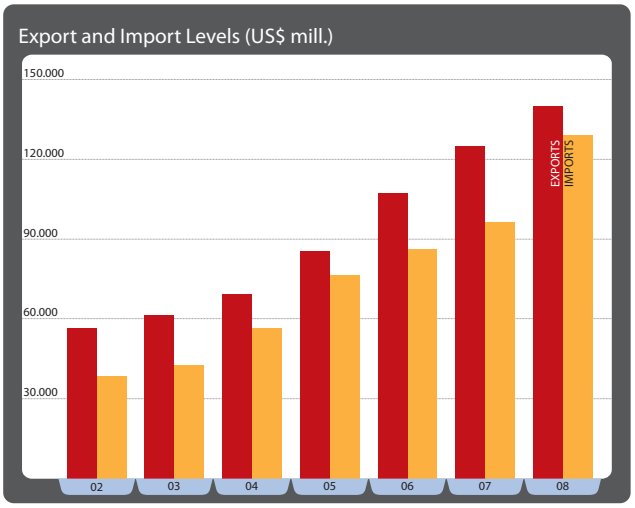

Balance of Payments

	1988	1998	2007	2008
(US$ millions)				
Exports of goods and services	20,878	105,221	130,501	154,849
Imports of goods and services	18,437	87,933	109,588	144,681
Resource balance	2,441	17,288	20,913	10,168
Net income	-8,184	-16,378	-15,525	-15,253
Net current transfers	254	3,184	5,104	5,385
Current account balance	-5,489	4,094	10,493	300
Financing items (net)	5,263	-7,531	2,223	-2,244
Changes in net reserves	226	3,437	-12,715	1,945
Memo:				
Reserves including gold (US$ millions)	4,814	23,516	55,798	81,110
Conversion rate (DEC, local/US$)	1,685.7	10,013.6	9,143.4	9,699.9

Note: This table was produced from the Development Economics LDB database. 12/9/09.

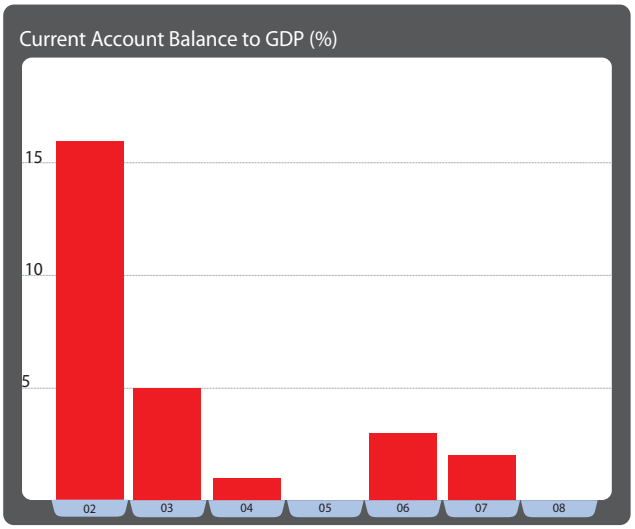

Annex B2

Selected Indicators* of Bank Portfolio Performance and Management

Indicator	2008	2009	2010	2011
Portfolio Assessment				
Number of Projects Under Implementation [a]	27	35	34	36
Average Implementation Period (years) [b]	3.8	4.5	4.1	4.3
Percent of Problem Projects by Number [a, c]	25.9	25.7	8.8	8.3
Percent of Problem Projects by Amount [a, c]	13.9	10.2	2.2	1.9
Percent of Projects at Risk by Number [a, d]	29.6	25.7	11.8	11.1
Percent of Projects at Risk by Amount [a, d]	17.5	10.3	3.0	2.7
Disbursement Ratio (%) [e]	24.9	45.0	54.5	18.4
Portfolio Management				
Country Portfolio Performance Review during the year	Yes	Yes	Yes	Yes
Supervision Resources (total US$)	2,327	2,177	2,684	
Average Supervision (US$/project)	89.5	70.2	83.9	

Memorandum Item	Since FY 80	Last Five FYs
Proj Eval by OED by Number	277	11
Proj Eval by OED by Amt (US$ millions)	25,415.1	1,890.9
% of OED Projects Rated U or HU by Number	24.7	45.5
% of OED Projects Rated U or HU by Amt	20.7	6.9

a. As shown in the Annual Report on Portfolio Performance (except for current FY).
b. Average age of projects in the Bank's country portfolio.
c. Percent of projects rated U or HU on development objectives (DO) and/or implementation progress (IP).
d. As defined under the Portfolio Improvement Program.
e. Ratio of disbursements during the year to the undisbursed balance of the Bank's portfolio at the beginning of the year: Investment projects only.
** All indicators are for projects active in the Portfolio, with the exception of Disbursement Ratio, which includes all active projects as well as projects which exited during the fiscal year.*

Annex B3

Indicative IBRD Lending Program, FY09-12

Fiscal year	Engagement Area	Fiscal year	IBRD US$m
Approved Lending Projects			
2009	Central Government	Fifth Development Policy Loan	750
		Second Infrastructure DPL (IDPL 2)	200
		Public Expend. Supp. Facility (DPL-DDO)	2,000
		Project for Indonesian Tax Administration Reform	110
	Infrastructure	Indo Infrastructure Finance Facility	100
		Dam Operational Improvement (DOISP)	50
	Community Based Development & Social Protection	PNPM Rural II	300
		PNPM UPP additional financing	115
	Education	BOS KITA Project	600
		Total FY09 Lending	***4,225***
2010	Central Government	Indonesia Sixth Development Policy Loan	750
	Subnational Government	Local Government and Decentralization	220
	Infrastructure	Urban Water Supply	24
		Third Infrastructure DPL (IDPL3)	250
		Java-Bali Power (Additional Financing)	30
	Community Based Development & Social Protection	PNPM-Rural III	785
		PNPM-Urban III Project	150
	Education	Health Professional Education Quality	78
		BOS KITA Project (Add'i Financing)	500
	Environmental Sustainability & Disaster Mitigation	Indonesia Climate Change DPL	200
		Total FY10 Lending	***2,987***
2011	Central Government	Seventh Development Policy Loan	600
		Fourth Infrastructure DPL (DPL4)	200
		Strengthening Indonesian Statistics	65
		Scholarship Program	113
	Infrastructure	Power Transmission Development	225
		Upper Cisokan Pumped Storage	640
		Water Resources & Irrig Mgt 2	150
		Western Indonesia National Roads Improvement	250
		Total FY11 Lending	***2,243***
2012	Central Government	Indonesia DPL-8	400
		Indonesia Food Access Program (DPL-DDO)	300
		Agriculture Research & Tech	80
	Sub National	DAK Support II (Standby)	200
	Infrastructure	Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)	480
		IIGF TA	30
		Jakarta Urgent Flood Mitigation	150
		Geothermal Clean Energy (CTF $125)	175
		Power Transmission II	375
	Community Based Development &Social Protection	PNPM Urban IV	150
		PNPM Rural IV	532
	Education	Research and Innovation	95
		BOS KITA3 (Standby)	250
	Environmental Sustainability & Disaster Mitigation	Restoration Concessions (GEF)	3.3
		Chiller Energy Efficiency (GEF)	3.7
		Climate Change DPL2 (proposed)	200
		Total FY12 Lending	***2,967***

Annex B4

Summary of Non Lending Services

Engagement Area	Product	FY	Cost (US$ m)	TF	Audience[a]	Objective[b]
Recent completions						
Economic and Sector Work						
Central Government	Development Policy Review	FY09	86	42	Public Dissemination	KG, PD
	Understanding Labor Market in Indonesia	FY09	79	-	Government	KG, PD, PS
	Budget reform in Indonesia, IMF-WB	FY09	78	-	Government	KG, PS
	Indonesia's Development Strategy	FY10	523	25	Government	KG, PD, PS
	Spending for Development (RPJM 2010-14)	FY10	277	406	Government	KG, PD, PS
	Corporate Governance: Indonesia II Country Assessment	FY10	186	-	Public Dissemination	KG, PD, PS
	Country Procurement Assessment Report	FY10	55	0	Government	KG, PD, PS
	Agriculture Public Expenditure Review	FY10	165	-	Government	KG, PS
Subnational Government	Intergovernmental Transfer (TF)	FY10	-	90	Government	KG
	Sub-national Surplus and Reserves (TF)	FY10	-	177	Government	KG
	Territorial Reform (TF)	FY10	-	228	Government	KG
Private Sector	Financial Sector Assessment	FY10	809	-	Government	KG
Infrastructure	Papua & W Papua ICT Infra Svc Assess	FY09	42	-	Public Dissemination	KG, PD, PS
	Papua Infra Strategy and Prioritization	FY10	364	-	Public Dissemination	KG, PD
	PPP Framework and Policy	FY10	1	455	Government	KG, PD, PS
Community Development	Poverty Reduction Thru Ec-Gov	FY10	128	2,952	Government	KG, PD, PS
and Social Protection	Empowering Female Migrant Workers	FY10	7	42	Public Dissemination	KG, PD, PS
	Evaluation of NGO Sector in Indonesia	FY10	3	55	Government	KG, PD, PS
Education	Health Workforce	FY10	360	-	Government	KG, PD, PS
	Teacher Management	FY10	50	-	Government	KG, PD, PS
Environmental Sustainability	Fuel Quality Issues & Air Pollut	FY09	0	-	Public Dissemination	KG, PD, PS
and Disaster Mitigation	Sustainable Econ. Dev. Strategy for Aceh	FY09	91	-	Government	KG, PD, PS
	Agric R&D Public Expenditure Analysis	FY09	52	-	Government	KG, PD
Health	Health Finance & Dialogue	FY09	345	6	Government	KG, PD, PS
	HIV Interventions	FY09	27	-	Government	KG, PD, PS
	Health System Strengthening	FY09	18	21	Government	KG, PD, PS
Technical Assistance						
Central Government	Supporting Corruption Eradication	FY09	41	-	Government	KG, PD, PS
	Supporting Ind Anti-Corruption Inst.	FY09	4	1,614	Government	KG, PD, PS

Engagement Area	Product	FY	Cost (US$ m)	TF	Audience[a]	Objective[b]
	Program to Improve Ind's Trade Policy	FY10	66	2,209	Government	PS
	Governance & Civil Service Reform Dialog	FY10	103	-	Government	PD, PS
	Indonesia - Civil Service Reform	FY10	147	-	Government	KG, PD, PS
	Study on Government Agencies (TF)	FY10	-	148	Government	KG, PD, PS
	PEFA Follow Up	FY10	60	-	Government	KG, PD, PS
Subnational Government	Aceh Support	FY09	1,593	278	Government	KG, PD, PS
	Aceh Response TA Facility	FY09	113	1,584	Government	KG, PS
	Decentralization	FY09	113	693	Government	KG
	Papua Public Expenditure Capacity B	FY10	2	1,046	Public Dissemination	KG, PD, PS
	Aceh Dialogue Economic Policy	FY10	52	-	Government	KG, PD, PS
	Indonesian National Single Window	FY10	109	-	Government	PS
	Improving Indonesia's Investment Climate	FY10	153	-	Government	PS
Private Sector	Enhancing Demand for Legal Reform	FY09	73	653	Other	KG, PD
	Access to Finance	FY10	356	-	Other	KG, PD, PS
	Support to Financial Sector Policy Implementation	FY10	72	-	Government	KG, PD, PS
	Life Insurance reform	FY10	13	349	Government	KG, PD, PS
	Indonesian National Single Widow	FY10	109	-	Government	PS
	Improving Indonesia's Investment Climate	FY10	153	-	Government	PS
Infrastructure	Aceh-Nias Water & Sanitation Facility	FY09	3	335	Other	PS
	National Slum Upgrading Policy	FY09	33	-	Government	KG, PS
	Indonesia Infrastructure Guarantee Fund	FY09	78	-	Government	PS
	TA for MIS and Evaluation Study (TF)	FY10	-	11	Government	KG, PS
	WSS Financing Initiative (TF)	FY10	-	858	Government	KG, PD, PS
	Indonesia Telecom & ICT Advisory Support	FY10	22	1	Government	PS
Community Development and Social Protection	Youth Investment GoI Support	FY09	112	140	Government	KG, PS
	National Program	FY09	64	1,186	Government	KG, PS
	MIS IMPROVEMENT FOR PNPM (TF)	FY09	-	101	Government	KG, PS
	Improved Evidence Base (PERDA) – TF	FY09	-	118	Other	KG, PS
	Information, Education & Communication (TF)	FY09	-	481	Government	KG, PS
	Cost Accounting Review for CDD (TF)	FY09	-	17	Government	KG, PS
	Technical Assessment for CDD Prog (TF)	FY09	-	54	Government	KG, PS
	CDD Summit (TF)	FY09	-	421	Government	KG, PS
	Policy Development for PNPM (TF)	FY09	-	21	Government	KG, PS
Education	Education Sector Assessment	FY10	173	-	Government	KG, PD, PS
Environmental Sustainability and Disaster Mitigation	Nias Disaster Risk Management (TF)	FY09	-	50	Government	KG, PD, PS
	CPS Sustainability Platform	FY09	120	-	Government	
	POPs Awareness and Capacity Building (TF)	FY10	-	98	Government	KG, PD, PS

Engagement Area	Product	FY	Cost (US$ m)	TF	Audience[a]	Objective[b]
	Integrate Econ Analysis for Climate Change	FY10	90	-	Government	KG, PD, PS
	Indonesia Post-Disaster Needs Assessment	FY10	7	121	Government	KG, PD, PS
Health	Health system strengthening (TF)	FY09	-	42	Government	KG, PD, PS
Underway						
Economic and Sector Work						
Central Government	Indonesia-Openness, Competition and Grow	FY11	158	-	Government	KG, PD, PS
Subnational Government	TF-Improving Intergovernmental Framework	FY11	31	263	Government	KG
	Sub-national Borrowing (TF)	FY11	-	598	Government	KG
	East Java Growth Diagnostic (TF)	FY11	-	42	Public Dissemination	KG, PD
	Financing Local Governments	FY11	1	-	Government	KG, PD
Private Sector	Indonesia ROSC Update	FY11	107	-	Government	KG
	Regulatory Reform and Investment Policy	FY11	0	-	Government	KG, PD, PS
Infrastructure	Assessment of Road Construction Industry (TF)	FY11	-	47	Government	KG, PD, PS
	Surabaya NRW Management Strategy (TF)	FY11	-	26	Government	KG, PD, PS
	National Road Map for Water Supply Investment	FY11	-	1		
	Improving Indonesia's connectivity	FY11	40	1	Government	KG, PS
Community Development	Youth Skills and Employment	FY11	40	-	Government	KG
and Social Protection	Impr. Targeting Performance of Pov. Prog	FY11	46	441	Government	KG
	Social Protection PER	FY11	35	335	Government	KG, PD, PS
	User Fee Assess for CDD Prog (TF)	FY11	-	392	Government	KG, PS
Health	HIV/AIDS PET Study	FY11	18	189	Government	KG, PD, PS
Technical Assistance						
Central Government	Capacity Build on Trade Policy Indonesia (TF)	FY11	-	60	Government	KG, PD, PS
	Indonesia 2010 PEFA	FY11	75	-	Government	KG, PD, PS
	Data for Monitoring and Evaluation (TF)	FY11	-	382	Government	KG
	Rapid Response Supp. on Trade Mon. & Pol	FY11	2	-	Government	KG,PS
	Trade & Clim. Change & Logistics Reform (TF)	FY11	-	93	Government	KG, PD, PS
	Support for Bureaucratic Reform in MoT	FY11	7	-	Government	KG, PS
	Monitoring and Evaluation TA	FY11	25	-	Government	KG, PS
	Building-Blocks for E-Government Capabil (TF)	FY11	6	307	Government	KG, PS
	Supp. SA Program Design & Implementation	FY11	77	363	Government	KG, PD, PS
	Indonesia's Non Tarriff Measures	FY11	1	1	Government	KG, PD, PS
	Support Enhanced Analysis & Monitoring (EFO)	FY11	EFO	-	Government	PS
	Rapid Response Supp.on Cross-Cutting	FY11	5	-	Government	PS
	Supp. Establishment of Crisis Monitoring (EFO)	FY11	EFO	-	Government	KG, PD, PS
	Promoting Development Effectiveness (TF)	FY11	-	86	Other	KG, PS
	Improving Poverty Data Quality	FY11	15	-	Government	PS

Engagement Area	Product	FY	Cost (US$ m)	TF	Audience[a]	Objective[b]
	Planning and Performance Measurement (TF)	FY11	-	534	Government	PS
	Support to Regulatory Reform	FY11	52	-	Government	PD, PS
	Monitoring and Evaluation TA	FY11	10	197	Government	KG, PS
	Policy Dialogue on Services	FY11	1	-	Government	PD, PS
	Corruption Prevention Capacity Building	FY11	77	-	Government	PS
Subnational Government	Knowledge Mgmt for Effective LGs (TF)	FY11	-	59	Other	KG, PD, PS
	Minimum Service Standards (TF)	FY11	-	-	Government	KG, PS
	Alternative Mech of Service Delivery (TF)	FY11	-	200	Government	KG, PS
	Local Government and Urbanization	FY11	44	226	Government	KG
	Strengthening Local Capacity for Poverty	FY11	85	298	Government	PS
	Supp. for Strengthening Sub-National PFM	FY11	21	-	Government	PS
Infrastructure	Indonesia Energy Sector Policy Dialogue	FY11	17	131	Other	KG, PD, PS
	Geothermal Power Support Program (TF)	FY11	-	592	Government	KG, PS
	Indonesia Telecoms/ICT Development TA (TF)	FY11	-	92	Government	KG, PD, PS
	Timely Land Acquisition for Infra Dev (TF)	FY11	-	93	Government	KG, PD, PS
	Value of a Well Run Water Utility Study (TF)	FY11	-	52	Public Dissemination	KG, PD, PS
	Indonesia Telecom & ICT Policy Advice	FY11	24	-	Government	KG, PD, PS
	Indonesia Broadband Internet PPP	FY11	4	36	Government	KG, PD, PS
	Low-income Housing Policy and Finance	FY11	74	306	Government	KG, PD, PS
	Unique ID and National Database TA					
Private Sector	Access to Islamic Finance for SMEs (TF)	FY11	-	-	Government	KG, PD, PS
	Logistics and Connectivity	FY11	6	0	Government	KG, PD, PS
	Rapid Response Supp. on Fin. Sec. Policy	FY11	20	-	Government	KG, PS
	Enhancing Fin. Incl. & Access to Finance	FY11	55	-	Government	KG, PD, PS
Community Development and Social Protection	CCT (Conditional Cash Transfers)	FY11	170	-	Government	KG, PD, PS
	Poverty Dialogues on Pro Poor & Pro Jobs	FY11	84	182	Government	KG, PD, PS
	Supp. SA Program Design & Implementation	FY11	69	-	Government	KG, PS
	Supp for Social Insurance & Labor Reform	FY11	50	-	Government	KG, PS
	Helping Generate Jobs for Pro-Poor Growt	FY11	20	177	Government	KG, PD, PS
	PNPM Supv. and Monitoring (Urban) - TF	FY11	-	203	Government	KG, PS
	PNPM - Strategic Directions	FY11	75	-	Government	PS
	Food Security Policies in Indonesia	FY11	21	41	Government	PS
	Indonesia SP Engagement TA	FY11	8	-	Government	PD
Education	Indonesia School Based Management Study	FY11	117	-	Government	KG, PD, PS

Engagement Area	Product	FY	Cost (US$ m)	TF	Audience[a]	Objective[b]
	Educ Sector Dialogue and Strategy	FY11	127	-	Government	KG, PD, PS
Environmental Sustainability	Mainstreaming DRR in Indonesia (TF)	FY11	-	1,105	Government	PS
and Disaster Mitigation	Persistent Organic Pollutant	FY11	-	90	Government	KG
	Disaster Risk Financing	FY11	3	-	Government	KG, PS
	Climate Policy and Institutional Supp	FY11	11	-	Government	KG, PD, PS
Health	Health Sector Reform Agenda TA	FY11	54	-	Government	KG, PD, PS
	HIV/AIDS Analysis	FY11	7	5	Government	KG, PD, PS
Planned						
Economic and Sector Work						
Central Government	Economic Quarterly and Policy Notes	FY12	147	-	Government	KG, PD, PS
Subnational Government	Subnational Capital Markets	FY12	6	-	Government	KG, PD
	PEACH -TA, Capacity Building	FY12	-	-	Government	KG
	PEACH - TA for CSO/Media - TF	FY12	-	-	Other	KG
Private Sector	Manufacturing Sector Study	FY12	35	-	Public Dissemination	KG, PD
Infrastructure	Improving Indonesia's connectivity	FY12	202	-	Government	KG, PD, PS
	Infrastructure Public Expenditure Review	FY12	227	-	Government	KG, PD, PS
Education	Education Public Expenditure Review	FY12	50	-	Government	KG, PD, PS
Technical Assistance						
Central Government	Public Exp. Ana. & Capacity Harm.	FY12	203	-	Government	KG, PS
	Support for Public Expenditure Analysis	FY12	50	-	Government	KG, PD, PS
	Demand for Legal Reform (TF)	FY12	-	-	Government	PS
	Fiscal Decentralization & Capacity Devt (TF)	FY12	-	-	Government	KG, PS
	Public Procurement Reform (TF)	FY12	-	-	Government	PD, PS
	Support for Public Expenditure Analysis	FY12	-	-	Government	KG, PD, PS
Infrastructure	Indonesia Program Administration and Advisory Services (TF)	FY12	-	-	Government	KG, PD, PS
	Indonesia Sanitation Sector Development Program (TF)	FY12	-	-	Government	KG, PD, PS
	Sanitation Sector Development (TF)	FY12	-	-	Government	PS
	Water and Sanitation Sector Monitoring (TF)	FY12	-	-	Government	KG, PD, PS
	Aligning Water Resources Sector (TF)	FY12	-	-	Government	KG, PD, PS
	Technical Assistance for Flood Mitigation (TF)	FY12	-	-	Government	PS
	GPOBA: Improved Access to Water Services in Jakarta	FY12	-	-	Other	PS
	GPOBA: Expanding Piped Water Supply to Surabaya's Urban Poc	FY12	-	-	Government	PS
Community Development	Supporting Post-Conflict Dev (TF)	FY12	9	-	Government	KG, PD, PS
and Social Protection	PNPM Supervision and Monitoring (TF)	FY12	-	-	Government	KG,PS
	Supp. for Dev. Gender Engagement (TF)	FY12	-	-		
	Indonesia: Urban Poverty Analysis	FY12	126	-	Government	KG, PD, PS
	PNPM Peduli	FY12	TF	-	Government	KG,PS

a. Government, donor, Bank, public dissemination.
b. Knowledge generation, public debate, problem-solving.=

Annex B5

Social Indicators

	Latest single year			Same region/income group	
	1980-85	1990-95	2002-08	East Asia & Pacific	Lower-middle income
POPULATION					
Total population, mid-year (millions)	162.3	191.5	227.3	1,929.6	3,703.0
Growth rate (% annual average for period)	2.0	1.5	1.3	0.8	1.2
Urban population (% of population)	26.1	35.6	51.5	44.1	41.3
Total fertility rate (births per woman)	3.7	2.7	2.2	1.9	2.5
POVERTY *(% of population)*					
National headcount index	-	-	16.7	-	-
Urban headcount index	-	-	12.1	-	-
Rural headcount index	-	-	20.1	-	-
INCOME					
GNI per capita (US$)	530	1,020	1,880	2,644	2,073
Consumer price index (2000=100)	13	28	132	122	126
Food price index (2000=100)	15	37	121	-	-
INCOME/CONSUMPTION DISTRIBUTION					
Gini index	-	-	37.6	-	-
Lowest quintile (% of income or consumption)	-	-	7.4	-	-
Highest quintile (% of income or consumption)	-	-	45.5	-	-
SOCIAL INDICATORS					
Public expenditure					
Health (% of GDP)	-	-	1.2	1.9	1.8
Education (% of GDP)	-	-	3.5	2.7	4.0
Net primary school enrollment rate					
(% of age group)					
Total	-	98	95	-	87
Male	-	100	97	-	89
Female	-	96	94	-	86
Access to an improved water source					
(% of population)					
Total	-	74	80	87	86
Urban	-	91	89	96	94
Rural	-	65	71	81	81
Immunization rate					
(% of children ages 12-23 months)					
Measles	26	63	83	91	81
DPT	27	69	77	92	79
Child malnutrition (% under 5 years)	-	27	20	12	25
Life expectancy at birth *(years)*					
Total	58	64	71	72	68
Male	57	63	69	70	66
Female	60	66	73	74	70
Mortality					
Infant (per 1,000 live births)	65	46	31	23	45
Under 5 (per 1,000)	101	67	41	29	64
Adult (15-59)					
Male (per 1,000 population)	368	275	166	161	204
Female (per 1,000 population)	308	219	116	101	138
Maternal (modeled, per 100,000 live births)	-	-	420	150	370
Births attended by skilled health staff (%)	-	37	79	89	65

Note: 0 or 0.0 means zero or less than half the unit shown. Net enrollment rate: break in series between 1997 and 1998 due to change from ISCED76 to ISCED97. Immunization: refers to children ages 12-23 months who received vaccinations before one year of age or at any time before the survey.

World Development Indicators database, World Bank - 23 April 2010.

Annex B6

Key Economic Indicators

	Actual	Estimate	Projected				
Indicator	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
National accounts (as % of GDP)							
Gross domestic product[a]	100	100	100	100	100	100	100
Agriculture	14.5	15.3	15.6	12.5	10.6	9.2	8.4
Industry	48.1	47.6	43.4	36.9	33.2	30.0	27.4
Services	36.0	34.1	41.0	50.6	56.2	60.7	64.2
Total Consumption	71.1	66.2	65.1	67.1	65.7	65.7	65.7
Gross domestic fixed investment	27.7	31.1	31.4	31.1	31.5	32.3	33.1
Government investment	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
Private investment	26.3	29.5	29.9	29.7	30.1	30.9	31.7
Exports (GNFS)[b]	29.8	24.1	27.4	26.3	23.8	22.6	21.5
Imports (GNFS)	28.7	21.3	30.3	28.1	26.3	24.9	23.6
Gross domestic savings	28.9	33.8	34.9	32.9	34.3	34.3	34.3
Gross national savings[c]	25.3	30.3	33.1	31.6	33.1	33.2	33.4
Memorandum items							
Gross domestic product (US$ million at current prices)	510,502	514,389	540,274	702,292	828,713	968,103	1,123,822
GNI per capita (US$, Atlas method)	1,900	2,050	2,660	3,110	3,780	4,420	5,080
Real annual growth rates (%)							
Gross domestic product at market prices	6.0	4.5	5.9	6.2	6.2	6.5	6.5
Gross Domestic Income	0.7	6.9	5.7	6.1	6.4	6.5	6.5
Real annual per capita growth rates (%)							
Gross domestic product at market prices	4.8	3.4	4.7	5.0	5.0	5.3	5.3
Total consumption	2.5	2.9	3.3	4.4	4.0	4.8	4.6
Private consumption	1.6	1.3	3.8	3.9	6.5	4.8	4.5
Balance of Payments (US$ millions)							
Exports (GNFS)[b]	154,853	133,259	212,486	232,938	254,886	279,386	305,319
Merchandise FOB	139,606	119,480	197,467	217,553	239,021	262,815	287,294
Imports (GNFS)[b]	144,935	112,234	192,719	217,814	230,759	253,649	278,237
Merchandise FOB	116,690	84,347	156,124	176,731	184,397	199,923	218,729
Resource balance	9,918	21,025	19,767	15,123	24,127	25,736	27,082
Net current transfers	5,264	4,861	4,900	5,253	5,623	6,011	6,419
Current account balance	126	10,746	6,900	-1,900	11,566	13,049	14,722
Net private foreign direct investment	3,419	1,928	5,400	4,600	5,000	5,000	5,000
Other capital (net, incl. errors & omissions)	-7,414	-11,271	14,300	10,500	7,000	7,000	7,000
Change in reserves[d]	1,945	-12,506	-25,584	-11,404	-10,268	-3,486	-5,271
Memorandum items							
Resource balance (% of GDP)	1.9	4.1	3.7	2.2	2.9	2.7	2.4
Real annual growth rates (YR00 prices)							
Merchandise exports (FOB)	13.7	-19.5	13.8	11.4	10.5	11.0	11.1
Public finance (as % of GDP at market prices)[e]							
Revenues	19.8	15.1	16.0	14.9	14.4	14.2	13.8
Expenditures	19.9	16.7	16.6	15.9	15.7	15.1	14.6
Overall deficit	-0.1	-1.6	-0.6	-1.0	-1.3	-1.0	-0.8
Monetary indicators							
M2/GDP	38.3	38.1	41.7	40.0	40.0	40.0	28.6
Growth of M2 (%)	14.9	13.0	26.0	14.4	16.8	16.1	-17.8
Private sector credit /total credit (%)	93.0	94.0	96.6	91.6	90.9	90.3	89.8
Price indices(YR00 =100)							
Merchandise export price index	309.0	328.5	474.2	487.8	474.5	464.0	458.7
Merchandise import price index	464.9	435.5	769.9	777.2	756.2	748.4	745.0
Merchandise terms of trade index	66.5	75.4	61.6	62.8	62.8	62.0	61.6
Real exchange rate (US$/LCU)[f]	130.0	129.3	115.3	104.3	97.7	91.4	86.3
Consumer price index (% change)	9.8	4.8	5.1	6.3	6.0	6.0	6.0
GDP deflator (% change)	18.2	8.4	7.4	10.0	10.0	9.0	8.0

a. GDP at market prices
b. "GNFS" denotes "goods and nonfactor services."
c. Includes net unrequited transfers excluding official capital grants.
d. Includes use of IMF resources.
e. Consolidated central government.
f. "LCU" denotes "local currency units." An increase in US$/LCU denotes appreciation.

Annex B7

Key Exposure Indicators

	Actual		Estimated		Projected		
Indicator	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Total debt outstanding and disbursed (TDO) (US$m)[a]	146,247	157,517	166,070	169,445	172,557	176,145	175,537
Net disbursements (US$m)[a]	1,561	6,573	2,328	(4,065)	(5,037)	(5,294)	(10,059)
Total debt service (TDS) (US$m)[a]	21,368	24,852	22,406	26,282	24,636	24,980	30,302
Debt and debt service indicators (%)							
TDO/XGS[b]	104.5	96.3	78.2	72.7	67.7	63.0	57.5
TDO/GDP	33.8	30.9	30.7	24.1	20.8	18.2	15.6
TDS/XGS	15.3	15.2	14.4	15.3	13.0	12.0	13.2
Concessional/TDO	29.6	27.7	29.0	31.0	32.2	32.5	33.7
IBRD exposure indicators (%)							
IBRD DS/public DS	17.6	14.0	14.2	15.2	15.9	16.2	13.5
Preferred creditor DS/public DS (%)[c]	26.2	29.4	25.3	22.2	23.0	23.3	25.1
IBRD DS/XGS	1.0	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
IBRD TDO (US$m)[d]	6,968	7,876	9,659	11,485	13,116	14,625	16,058
Share of IBRD portfolio (%)	5.7	6.8	8.7	11.0	12.4	14.7	15.8
IDA TDO (US$m)[d]	2,006	2,234	2,278	2,300	2,303	2,283	2,244
IFC (US$m)							
Loans							
Equity and quasi-equity							
MIGA							
MIGA guarantees (US$m)[e]	50	50	50	257	n/a	n/a	n/a

a. Includes public and publicly guaranteed debt, private nonguaranteed, use of IMF credits and net short- term capital.
b. "XGS" denotes exports of goods and services, including workers' remittances.
c. Preferred creditors are defined as IBRD, IDA, the regional multilateral development banks, the IMF, and the Bank for International Settlements.
d. Includes present value of guarantees.
e. Preliminary figure for 2011.

Annex B8.1

Operations Portfolio (IBRD/IDA and Grants)

As of Date: 1/14/2011	
Closed Projects	**319**
IBRD/IDA *	
Total Disbursed (Active)	3,190.22
of which has been repaid	42.68
Total Disbursed (Closed)	7,093.98
of which has been repaid	10,811.99
Total Disbursed (Active + Closed)	10,284.21
of which has been repaid	10,854.67
Total Undisbursed (Active)	2,017.33
Total Undisbursed (Closed)	2,000.39
Total Undisbursed (Active + Closed)	4,017.73

Active Projects									Difference Between		
		Last PSR Supervision Rating			Original Amount in US$ Millions					Expected and Actual Disbursements [a/]	
Project ID	Project Name	Development Objectives	Implementation Progress	Fiscal Year	IBRD	IDA	GRANT	Cancel.	Undisb.	Orig.	Frm Rev'd
P085133	Govt Finl Mgt & Revenue Admin Project	MS	MS	2005	55	5			34.9404	34.97053	3.516721
P071316	ID-Coral Reef Rehab and Mgmt Prog II	MU	MU	2004	33.2	23		3.168374	3.179241	5.438194	
P096921	ID-National UPP (PNPM UPP)	S	S	2008	167.68	125			61.33699	-51.22708	54.88403
P115052	ID PNPM-Rural III	#	#	2010	785				293.393	-24.94032	
P092218	ID-Indo Infrastructure Finance Facility	MS	MS	2009	100				100	0.000038	
P097104	ID-BERMUTU	S	MS	2008	24.5	61.5			35.35315	15.3615	
P107661	ID-BOS KITA Project	S	MS	2009	1100				328.6943	-171.3057	
P077175	ID-Domestic Gas Market Development Proj.	S	MS	2006	80				26.47495	24.39162	
P089479	ID-Early Childhood Education and Dev	S	MS	2006		67.5			14.70552	-12.22262	
P074290	ID-Eastern Indonesia Region Transp. 2	MS	MS	2004	200			1	16.89536	17.89536	11.56203
P083742	ID-Farmer Empower. Agric.Tech.&Info	MU	MU	2007	32.8	60			29.85064	12.87706	
P068133	ID-GEF MARINE ELECTRONIC HWY	MS	MU	2006			8.3		4.390473	4.390473	
P071318	ID-GEF-Coral Reef Rehab & Management II	MU	MU	2004			7.5		2.612189	2.612189	
P099757	ID-GEF-Geothermal Power Generation Dev	MS	MS	2008			4		3.195472	2.966306	
P085374	ID-HIGHER EDUCATION	S	MS	2005	50	30			22.52985	20.44233	-2.35767
P113341	ID-Health Professional Education Quality	S	S	2010	77.822				70.892	9.903333	
P076174	ID-Initiatives for Local Govern. Reform	S	S	2005	14.5	15			5.063365	4.878081	4.878081
P063913	ID-Java-Bali Pwr Sector & Strength	S	S	2003	303.715			3.57293393	41.67005	15.24299	7.597986
P111577	ID-Local Government and Decentralization	#	#	2010	220				220		
P079906	ID-Strategic Roads Infrastructure	MS	MS	2007	208			1.54482357	128.5119	112.7234	62.05674
P078070	ID-Support for Poor and Disadvant Areas	MS	MS	2005	69	35			8.789126	5.175815	
P084583	ID-UPP3	S	S	2005	67.3	71.4			0.002318	-0.583443	
P090991	ID-URBAN WATER SUPPLY	#	#	2010	23.56				22.06	1.416667	
P071296	ID-USDRP	MS	MS	2005	45				18.64171	17.35004	2.955877
P085375	ID-WSSLIC III (PAMSIMAS)	MS	MS	2006		137.5			41.97118	6.161514	
P096532	ID: Dam Operational Improvement (DOISP)	S	MS	2009	50				47.99348	10.61015	
P117323	Indonesia Power Transmission Development	#	#	2011	225				225		
P105002	National Program for Community Empower	S	S	2008	341.19	190			0.876917	-294.1362	8.442993
P100740	PINTAR	MS	MS	2009	110				109.725	4.739333	
P118113	PNPM - Urban III Project	#	#	2010	149.98				108.7833		
	Overall result				4533.247	820.9	19.8	9.2861315	2027.532	-266.0651	153.5368

a/ Intended disbursements to date minus actual disbursements to date as projected at appraisal.

Annex B8.2

Committed and Disbursed Outstanding Investment Portfolio (IFC)

		Committed					Disbursed Outstanding				
FY Approval	Company	Loan	Equity	**Quasi Equity	*GT/ RM	Participant	Loan	Equity	**Quasi Equity	*GT/ RM	Participant
2006	Bank danamon	91.58	0	0	5	0	91.58	0	0	0	0
2007	Bank int'l indo	36.01	0	0	0	0	36.01	0	0	0	0
2008/10	Bank of banks	0	7.22	0	0	0	0	5.22	0	0	0
2008/10	Bima	15	10.29	0	0	0	15	9.41	0	0	0
2011	Biocarbon	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	Bonavista school	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0
2009	Btpn	54.1	0	15.9	0	0	0	0	0	0	0
2007/08	Fugui indonesia	35	0	0	0	7.33	35	0	0	0	7.33
2009	Iiff	0	40	0	0	0	0	2.22	0	0	0
2010	Jict	30	0	0	0	40	17.14	0	0	0	22.86
2009/10	Oto finance	97.72	0	0	0	0	72.72	0	0	0	0
2004/05	PT ecogreen	18.33	0	0	0	0	18.33	0	0	0	0
0/06/07/08	PT karunia (kas)	28.75	0	0	0	2	28.75	0	0	0	2
1993	PT nusantara	0	0	0.92	0	8.14	0	0	0.92	0	8.14
2004/08	PT prakars (pas)	14.89	0	0	0	6.67	14.89	0	0	0	6.67
2008	PT sas	4.09	0	0	0	2	4.09	0	0	0	2
2006/08	PTtas	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0
2008/09	PT tvs	18.18	0	12	0	0	18.18	0	12	0	0
2009	PT viscose	36.67	0	0	0	90	36.67	0	0	0	90
0	Rei indonesia	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
2008	Salamander	43.75	0	0	0	0	23.51	0	0	0	0
2008/09	Saratoga asia ii	0	27.85	0	0	0	0	7.27	0	0	0
2010	Trada	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0
2005/06	Wom	2.52	1.86	0	0	0	2.52	1.86	0	0	0
Total Portfolio:		574.09	92.22	32.82	5	156.14	461.89	25.98	12.92	0	139

* Denotes Guarantee and Risk Management Products.
** Quasi Equity includes both loan and equity types.

Map of Indonesia (IBRD No. 33420RI)

The World Bank Office Jakarta
Jakarta Stock Exhange Building Tower 2, 12th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia